

Chega!

Bagian

6.

Profil pelanggaran hak asasi manusia
di Timor-Leste, 1974-1999

Bagian 6. Profil pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste, 1974-1999

529 | Pendahuluan

530 | Rangkuman temuan penting

530 | Pelanggaran fatal

531 | Pemindahan

531 | Pelanggaran nonfatal

532 | Tinjauan manajemen informasi dan metode pengumpulan data Komisi

533 | Estimasi pelanggaran bersejarah di Timor-Leste dan keterbatasannya

533 | Estimasi bersejarah jumlah kematian yang berhubungan dengan konflik di Timor-Leste (1974 - 1999)

535 | Bukti terdahulu dari migrasi dan pemindahan paksa

536 | Pelanggaran nonfatal di Timor-Leste

536 | Pelanggaran-pelanggaran fatal: analisis dari keseluruhan lingkup, pola, kecenderungan, dan tingkat pertanggungjawaban untuk pelanggaran fatal dan pemindahan di Timor-Leste, 1974-1999

536 | Latar belakang dan tinjauan analisis statistik pelanggaran fatal

538 | Tujuan-tujuan analisis

538 | Tinjauan data dan metode

540 | Perkiraan-perkiraan pembunuhan, kematian karena kelaparan dan sakit, dan pemindahan

540 | Pembunuhan

542 | Kematian karena kelaparan dan sakit

547 | Pemindahan

550 | Analisis statistik deskriptif mengenai pelanggaran fatal yang dilaporkan pada Komisi

550 | Pola lintas-waktu pembunuhan dan penghilangan para non-petempur yang dilaporkan

553 | Pola lintas-ruang pembunuhan dan penghilangan dari para non-petempur yang dilaporkan

554 | Pola lintas-waktu dan lintas-ruang pembunuhan dan penghilangan para non-petempur yang dilaporkan

556 | Pola pembunuhan dan penghilangan dari para non-petempur yang dilaporkan menurut pertanggungjawaban institusional yang terkait

- 560 | Pola kasus pembunuhan dan penghilangan non-petempur yang dilaporkan terhadap korban perorangan dan kelompok
- 564 | Pola dari pembunuhan dan penghilangan non-petempur yang dilaporkan menurut karakteristik demografis dan afiliasi politik korban
- 567 | Hubungan antara kematian terkait konflik dengan lamanya penahanan

571 | Pelanggaran-pelanggaran nonfatal

- 571 | Pengantar
- 572 | Tinjauan dari temuan statistik mengenai pelanggaran nonfatal
- 574 | Keterangan mendalam analisis statistik pelanggaran nonfatal
 - 574 | Distribusi keseluruhan pelanggaran nonfatal yang dilaporkan
 - 578 | Tiga tahap kekerasan skala besar di Timor-Leste
 - 581 | Tingkatan pertanggungjawaban institusional yang dilaporkan untuk pelanggaran nonfatal
 - 581 | **Distribusi keseluruhan dari pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran nonfatal yang dilaporkan**
 - 582 | **Pola-pola lintas waktu pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran nonfatal**
- 594 | Variasi dalam pelanggaran nonfatal yang dilaporkan lintas wilayah
- 597 | Pelanggaran nonfatal lintas ruang dan waktu
- 598 | Demografi usia - jenis kelamin korban untuk pelanggaran nonfatal yang dilaporkan
 - 598 | **Pelaporan tingkat informasi usia dan jenis kelamin bagi korban**
 - 599 | **Analisis korban berdasarkan jenis kelamin**
 - 602 | **Analisis korban berdasarkan umur**
 - 605 | **Analisis korban berdasarkan umur dan jenis kelamin**
- 612 | Perbandingan antara pemantauan Hak Asasi Manusia retrospektif dan pemantauan dalam masa yang sama
- 614 | Sifat pelanggaran terhadap individu dan kelompok
- 620 | Penggunaan penahanan dan sifat pelanggaran yang dilakukan selama masa penahanan
 - 620 | **Hubungan antara penahanan dan bentuk-bentuk penganiayaan fisik**
 - 621 | **Pola-pola pelanggaran yang dilakukan selama masa penahanan**
 - 627 | **Pola-pola statistik yang dilaporkan tentang penahanan di Ataúro**
- 629 | Pola pelanggaran menurut afiliasi politik korban yang dilaporkan

634 | Studi kasus Mau Chiga: suatu analisis kuantitatif pelanggaran yang terjadi selama operasi menumpas Resistansi

634 | Pendahuluan

634 | Latar belakang usaha pendokumentasian

634 | Keterbatasan data

635 | Latar belakang historis

636 | Analisis statistik deskriptif pelanggaran yang dilaporkan pada Proyek Dokumentasi Mau Chiga

636 | Laporan pemindahan dan penangkapan yang diderita penduduk Mau Chiga

636 | **Profil demografis para korban pemindahan dan penangkapan**

637 | **Pertanggungjawaban pemindahan dan tindak penangkapan dalam skala besar terhadap penduduk Mau Chiga**

637 | **Pola tindak pemindahan dan penangkapan lintas waktu**

638 | **Pola tindak pemindahan dan penangkapan lintas ruang geografis dan lamanya penahanan**

640 | Pelanggaran fatal yang diderita penduduk Mau Chiga

640 | **Distribusi pelanggaran fatal lintas waktu dan penyebab kematian yang dilaporkan yang dialami penduduk Mau Chiga**

641 | **Pola pertanggungjawaban yang diterakan untuk pelanggaran fatal yang dilaporkan terjadi pada penduduk Mau Chiga**

641 | **Pola pelanggaran fatal terhadap penduduk Mau Chiga menurut afiliasi politik korban**

643 | **Pola pelanggaran-pelanggaran fatal terhadap penduduk Mau Chiga yang dilaporkan menurut usia dan jenis kelamin korban**

644 | Ringkasan dan kesimpulan

Daftar tabel:

- 552 | **Tabel 1** : Penghitungan kejadian pembunuhan penduduk sipil, 1975
- 556 | **Tabel 2** : Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan
- 560 | **Tabel 3** : Persentase pertanggungjawaban atas pembunuhan yang dilaporkan, berdasarkan periode, 1975 - 1999
- 569 | **Tabel 4** : Pelanggaran yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 - 1999
- 570 | **Tabel 5** : Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 - 1999
- 571 | **Tabel 6** : Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan tahapan, 1974 - 1999
- 575 | **Tabel 7** : Pelanggaran nonfatal berdasarkan sumber data, 1974 - 1999
- 577 | **Tabel 8** : Distribusi relatif korban per pelanggaran, data CAVR
- 577 | **Tabel 9** : Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Fokupers
- 578 | **Tabel 10** : Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Amnesty International
- 582 | **Tabel 11** : Pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi
- 595 | **Tabel 12** : Pelanggaran berdasarkan distrik
- 600 | **Tabel 13** : Pola korban menurut jenis kelamin
- 600 | **Tabel 14** : Pola korban menurut jenis kelamin dalam lintas waktu
- 602 | **Tabel 15** : Pola korban menurut jenis kelamin di tiap distrik
- 603 | **Tabel 16** : Pola korban menurut usia
- 603 | **Tabel 17** : Pola korban menurut usia per tahun, 1974 - 1999
- 605 | **Tabel 18** : Pola korban menurut usia per distrik
- 612 | **Tabel 19** : Tabel distribusi data berdasarkan data CAVR, Fokupers, Amnesty International
- 623 | **Tabel 20** : Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 - 1999
- 624 | **Tabel 21** : Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan tahap, 1974 - 1999
- 625 | **Tabel 22** : Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 - 1999
- 626 | **Tabel 23** : Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 626 | **Tabel 24** : Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan usia korban, 1974 - 1999
- 638 | **Tabel 25** : Tabel penyebaran lamanya periode dari peristiwa pemindahan penduduk Mau Chiga, 1982 - 1985
- 639 | **Tabel 26** : Tabulasi silang lamanya periode tindak pemindahan penduduk Mau Chiga menurut lokasinya, 1982 - 1985
- 642 | **Tabel 27** : Tabel penyebaran pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik korban, 1974 - 1999
- 642 | **Tabel 28** : Penyebaran pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik dan lokasi geografis, 1974 - 1999

Daftar grafik:

- 540 | **Grafik 1** : Perkiraan jumlah total pembunuhan di Timor-Leste
- 541 | **Grafik 2** : Perkiraan total pembunuhan di Timor-Leste
- 544 | **Grafik 3** : Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 545 | **Grafik 4** : Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 546 | **Grafik 5** : Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 548 | **Grafik 6** : Perkiraan peristiwa pemindahan di Timor-Leste (dengan rentang kesalahan)
- 549 | **Grafik 7** : Jumlah total rumah tangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah
- 551 | **Grafik 8** : Jumlah kejadian pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 552 | **Grafik 9** : Jumlah kejadian penghilangan yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 553 | **Grafik 10** : Penghitungan pelanggaran yang dilaporkan, berdasarkan jenis dan distrik
- 554 | **Grafik 11** : Jumlah penghilangan berdasarkan wilayah secara lintas-waktu, 1974 - 1999
- 555 | **Grafik 12** : Jumlah pembunuhan penduduk sipil secara lintas-waktu, 1974 - 1999
- 558 | **Grafik 13** : Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh satuan teritorial
- 558 | **Grafik 14** : Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh satuan nonteritorial
- 559 | **Grafik 15** : Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh pasukan Pertahanan Sipil
- 561 | **Grafik 16** : Jumlah korban penduduk sipil berdasarkan ukuran kelompok, 1974 - 1999
- 561 | **Grafik 17** : Jumlah korban tindakan penghilangan berdasarkan ukuran kelompok, 1974 - 1999
- 562 | **Grafik 18** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 563 | **Grafik 19** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 564 | **Grafik 20** : Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 565 | **Grafik 21** : Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 565 | **Grafik 22** : Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per10.000 orang), 1974 - 1999
- 566 | **Grafik 23** : Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per10.000 orang), 1974 - 1999
- 566 | **Grafik 24** : Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 567 | **Grafik 25** : Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 568 | **Grafik 26** : Jumlah tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 568 | **Grafik 27** : Jumlah tindak penahanan yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 579 | **Grafik 28** : Jumlah pelanggaran nonfatal yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 580 | **Grafik 29** : Jumlah penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan, 1999
- 581 | **Grafik 30** : Pelanggaran dalam lintas-waktu
- 583 | **Grafik 31** : Jumlah pelanggaran nonfatal yang dikaitkan dengan Fretilin, UDT, dan Apodeti, 1975
- 584 | **Grafik 32** : Pelanggaran dalam lintas-waktu

- 585 | Grafik 33 :** Pelanggaran nonfatal yang dilakukan oleh satuan Pertahanan Sipil dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 585 | Grafik 34 :** Pelanggaran yang dilakukan oleh Kopassus dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 586 | Grafik 35 :** Pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 586 | Grafik 36 :** Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 587 | Grafik 37 :** Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1999
- 588 | Grafik 38 :** Tindak penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 589 | Grafik 39 :** Tindak penyiksaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 590 | Grafik 40 :** Tindak penganiayaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 590 | Grafik 41 :** Tindak penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 591 | Grafik 42 :** Tindak penyiksaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 591 | Grafik 43 :** Tindak penganiayaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 592 | Grafik 44 :** Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 593 | Grafik 45 :** Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 594 | Grafik 46 :** Tindak pelanggaran ekonomi/properti yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 596 | Grafik 47 :** Bagan pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 597 | Grafik 48 :** Jumlah pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 598 | Grafik 49 :** Jumlah pelanggaran nonfatal berdasarkan wilayah dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 606 | Grafik 50 :** Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 606 | Grafik 51 :** Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 607 | Grafik 52 :** Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 607 | Grafik 53 :** Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 608 | Grafik 54 :** Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 608 | Grafik 55 :** Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 609 | Grafik 56 :** Jumlah tindak pemerkosaan yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 609 | Grafik 57 :** Tingkat pemerkosaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 610 | Grafik 58 :** Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 610 | Grafik 59 :** Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 611 | Grafik 60 :** Jumlah kekerasan seksual yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999

- 611 | Grafik 61** : Tingkat kekerasan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 614 | Grafik 62** : Pelanggaran dalam lintas-waktu
- 615 | Grafik 63** : Jumlah korban tindakan penahanan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 615 | Grafik 64** : Jumlah korban tindakan penyiksaan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 616 | Grafik 65** : Jumlah korban tindakan penganiayaan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 617 | Grafik 66** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 618 | Grafik 67** : Jumlah tindakan penyiksaan yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 618 | Grafik 68** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 619 | Grafik 69** : Jumlah tindakan pengancaman yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 619 | Grafik 70** : Jumlah tindakan kekerasan berbasis seksual yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 620 | Grafik 71** : Jumlah pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 621 | Grafik 72** : Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 628 | Grafik 73** : Jumlah tahanan yang tercatat di Ataúro, Juni 1980 - Oktober 1984
- 628 | Grafik 74** : Jumlah penahanan yang tercatat, di dalam dan di luar Ataúro, 1974 - 1999
- 629 | Grafik 75** : Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 630 | Grafik 76** : Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1979
- 630 | Grafik 77** : Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1980 - 1989
- 631 | Grafik 78** : Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1990 - 1998
- 631 | Grafik 79** : Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1999
- 632 | Grafik 80** : Jumlah penahanan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban
- 632 | Grafik 81** : Jumlah penyiksaan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban
- 633 | Grafik 82** : Tindakan penganiayaan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 633 | Grafik 83** : Tindakan pelanggaran properti/ekonomi yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 637 | Grafik 84** : Jumlah korban pemindahan yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 640 | Grafik 85** : Pelanggaran fatal dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 644 | Grafik 86** : Jumlah kematian akibat kelaparan/sakit yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999

Profil pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste, 1974-1999

Pendahuluan

1. Guna mencapai tujuan inti dari mandatnya untuk mencari kebenaran, Komisi mengembangkan sejumlah program, termasuk penelitian empiris kualitatif dan analisis statistik kuantitatif. Bab ini menyajikan temuan yang dihasilkan dari kerja statistik Komisi dan membahas pendekatan metodologis yang digunakan untuk sampai pada temuan ini.
2. Segmen pendahuluan, yaitu 6.1.1, memberi rangkuman singkat temuan penting, ulasan konteks sejarah yang mendasari kerja demografis dan statistik Komisi, dan garis besar keputusan mengenai manajemen informasi Komisi.
3. Segmen 6.2 menyajikan perkiraan demografik dan statistik dari keseluruhan cakupan, pola, dan kecenderungan pelanggaran fatal di Timor-Leste antara 1974 dan 1999 serta tingkat pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Perkiraan ini diperoleh dari analisis statistik dan demografis dari data yang dikumpulkan oleh Komisi dan data eksternal dari badan-badan statistika resmi serta lembaga hak asasi manusia. Walaupun pemindahan (*displacement*) belum tentu merupakan pelanggaran fatal, tapi ia terkait erat dengan kematian yang berhubungan dengan konflik dan kelaparan. Karena itu, analisis pemindahan skala besar diikutsertakan dalam segmen 6.2.
4. Segmen 6.3 menyajikan analisis terhadap pola umum pelanggaran nonfatal. Komisi tidak berhasil menemukan sumber-sumber yang memiliki informasi ekstensif tentang pelanggaran nonfatal selain dari kesaksian-kesaksian yang ada pada Komisi. Karena itu, tidak dapat dibuat perkiraan kuantitatif yang seksama dari keseluruhan pelanggaran nonfatal selama 1974 – 1999. Sehingga, analisis statistik yang dideskripsikan dalam bagian ini terfokus pada pandangan makro mengenai pola dan kecenderungan pelanggaran nonfatal seperti yang terungkap dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi.
5. Segmen 6.4 menyajikan studi kasus statistik mengenai pelanggaran yang dilaporkan oleh komunitas Desa Mau Chiga dalam rangka pemberontakan oleh pihak Resistansi di wilayah mereka pada Agustus 1982, disertai pukulan balik oleh angkatan bersenjata Indonesia. Studi kasus ini dipakai untuk menyoroti pola serta kecenderungan penahanan

sewenang-wenang, pemindahan paksa, dan kematian akibat konflik yang dialami pada tahap ‘konsolidasi dan normalisasi’ pendudukan Indonesia di Timor-Leste di seluruh wilayah.*

6. Segmen 6.5 memberikan ringkasan singkat beserta kesimpulan.

7. Selebihnya, Lampiran menerangkan cara-cara pengumpulan data serta teknik statistik yang dipakai oleh Komisi untuk mencapai kesimpulannya. Di sini terdapat latar belakang metodologis dan pembahasan terperinci mengenai berbagai set data beserta metode pengolahan, teknik penghubungan, dan teknik perkiraan yang telah dipakai.

Rangkuman temuan penting

Pelanggaran fatal

8. Komisi memperkirakan bahwa batas minimal untuk jumlah kematian yang berkaitan dengan konflik selama periode acuan Komisi, 1974 – 1999, adalah 102.800 (+/- 12.000). Perkiraan ini diambil dari (i) perkiraan sebesar 18.600 untuk jumlah keseluruhan pembunuhan (+/- 1.000) dengan menggunakan teknik ‘*multiple systems estimation*’ (MSE) dan (ii) perkiraan sebesar 84.200 (+/- 11.000) untuk jumlah kematian karena kelaparan dan sakit, yang melampaui perkiraan jumlah total jika tingkat kematian karena kelaparan dan sakit adalah sama dengan tingkat kematian tersebut di masa damai sebelum invasi.

9. Pola perkiraan pelanggaran fatal secara keseluruhan menunjukkan angka yang tinggi untuk pembunuhan dan kematian karena kelaparan dan sakit selama masa awal periode pasca-invasi antara 1975 dan 1980. Jumlah kematian yang dikaitkan para responden dengan ‘kelaparan atau sakit’ melonjak ke tingkat yang paling tinggi selama periode langsung sesudah invasi, yaitu 1975 – 1980. Meskipun begitu, 1999 ditandai dengan angka yang tinggi untuk perkiraan pembunuhan, yaitu 2.634 (+/- 626).

10. Pola dan kecenderungan kematian karena kelaparan dan sakit dan karena pembunuhan berkorelasi secara positif dalam lintas waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kedua gejala itu mempunyai sebab pokok yang sama pada tahap pertama konflik. Dari kejadian pembunuhan dan orang hilang yang dilaporkan dalam proses pengambilan pernyataan Komisi, 57,6% (2.947/5.120) keterlibatan pelaku tindakan dalam pelanggaran fatal dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi, dan 32,3% (1.654/5.120) dengan pasukan pembantu asal Timor- Leste (seperti para milisi, pasukan pertahanan sipil, dan pejabat lokal yang bekerja dalam pemerintahan Indonesia).

.....
* Di bagian ini, untuk keperluan metode penelitian kuantitatif, Komisi menetapkan wilayah dengan cara berikut: Wilayah Timur meliputi Lautém, Viqueque, Baucau, dan Manatuto; Wilayah Tengah meliputi Manufahi, Aileu, Dili, dan Ainaro; sedangkan Wilayah Barat meliputi Ermera, Liquiçá, Covalima, dan Bobonaro.

Pemindahan

11. Peristiwa pemindahan terjadi secara luas: 55,5% dari rumah tangga yang disurvei melaporkan satu kali atau lebih peristiwa pemindahan. Jumlah total peristiwa pemindahan yang dilaporkan adalah sebanyak 2.011 antara 1974 dan 1999.*

12. Sebagian besar pemindahan terjadi antara 1975 dan 1980. Tahun saat pemindahan paling banyak terjadi adalah 1975 dan 1976, dengan berturut-turut 61.400 (+/- 13.300) dan 59.800 (+/- 7.200) peristiwa pemindahan. Jumlah peristiwa pemindahan pada 1999 jauh lebih sedikit, yaitu kira-kira 28.100 (+/- 5.600) peristiwa.

13. Sebagian besar pemindahan terjadi secara lokal. Dari keseluruhan peristiwa pemindahan, 54,3% terjadi di satu kecamatan, 15,6% terjadi di satu kabupaten, 17,4% terjadi di satu wilayah, 9,3% terjadi di Timor-Leste, dan 2,4% terjadi di luar Timor-Leste.† Penemuan ini mungkin terbatas oleh restriksi bahwa orang-orang yang berada di kamp pengungsian di Timor Barat tidak turut diwawancarai. Banyak pemindahan terjadi berturut-turut dengan cepat: 22,2% dari peristiwa pemindahan berlangsung dalam waktu satu bulan atau kurang, dan 50,1% berlangsung dalam waktu satu tahun atau kurang. Tapi, pemindahan lainnya berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sehingga rata-rata periode pemindahan adalah 46,7 bulan.‡

14. Lembaga yang dilaporkan penduduk sebagai kelompok yang paling sering menyuruh mereka pindah adalah militer Indonesia (46,4%), diikuti oleh Fretilin/Falintil (15,0%), dan kelompok milisi (8,8%).§ Responden melaporkan bahwa “konflik” merupakan motivasi dari 52,3% keseluruhan pemindahan mereka, dengan tambahan 16,3% “dipaksa oleh Militer Indonesia”.

Pelanggaran nonfatal

15. Pola temporal pelanggaran nonfatal yang dilaporkan mirip dengan pola pelanggaran fatal: pelanggaran nonfatal besar-besaran pada tahun-tahun awal invasi dan pendudukan, diikuti oleh pelanggaran yang relatif rendah pada masa tahun-tahun konsolidasi dan normalisasi, lalu kenaikan pelanggaran kembali terjadi pada 1999. Pelanggaran-pelanggaran nonfatal sekitar masa invasi Indonesia pada 1975 paling banyak terjadi di wilayah barat dan tengah; setelah 1976, fokus pelanggaran nonfatal bergeser ke wilayah timur.

16. Pola statistik yang diamati dari penahanan dan penyiksaan yang dilaporkan menunjukkan bahwa seiring waktu (dan terutama setelah 1984) praktik penahanan

.....
* Pada saat sensus 1990, terdapat kira-kira 4,5 orang per rumah tangga. Sensus 2004 mencatat penambahan sampai kira-kira 4,75 orang per rumah tangga (924.642/194.943). Selang kepercayaan nominal (*nominal confidence interval*) adalah 51,8%-59,2% dari rumah tangga ini.

† Ambang kesalahan nominal (*nominal margin of error*) untuk pemindahan dalam satu kecamatan adalah sebesar +/-10,4%, dan 4,6% atau kurang untuk perkiraan-perkiraan lain.

‡ Ambang kesalahan nominal adalah 41-52 bulan

§ Ambang kesalahan nominal adalah +/- 4,2%.

sewenang-wenang menjadi lebih bersasaran dan semakin umum digunakan bersama tindak peniksaan. Pada tahun-tahun awal invasi ada sekitar tiga kasus penahanan untuk setiap kasus peniksaan yang dilaporkan. Setelah 1985, kedua pelanggaran itu makin tampak lebih erat terkait satu sama lain, dengan jumlah penahanan yang dilaporkan kurang-lebih sama dengan tindak peniksaan setiap tahunnya.

17. Keseluruhan temuan kuantitatif Komisi konsisten dengan hipotesis bahwa individu-individu yang ditahan selama periode acuan Komisi mengalami kerentanan semakin tinggi terhadap peniksaan dan penganiayaan. Peniksaan dan penganiayaan lebih sering dilaporkan oleh korban-korban yang ditahan selama periode acuan Komisi: dari pelanggaran-pelanggaran peniksaan yang didokumentasikan oleh Komisi, 83,6% (9.303/11.123) diderita oleh korban yang ditahan selama masa konflik. Pelanggaran yang paling sering terjadi dalam masa penahanan yang diketahui adalah peniksaan (46,9%, 4.267/9.094), penganiayaan (30,8%, 2.798/9.094), dan pengancaman (7,0%, 634/9.094).

18. Demografi korban bervariasi untuk berbagai tipe pelanggaran. Dibanding dengan keseluruhan penduduk Timor-Leste, laki-laki paruhbaya mengalami tingkat tertinggi bentuk-bentuk pelanggaran nonfatal seperti penahanan, peniksaan, dan penganiayaan. Sebaliknya, pelanggaran seksual hampir seluruhnya disasarkan pada perempuan, dengan 90,2% (769/853) pelanggaran seksual yang dilaporkan dialami oleh perempuan.

19. Data kuantitatif Komisi menunjukkan perbedaan nyata dalam pola pertanggungjawaban pelanggaran nonfatal antara 1975 dan 1998, dibandingkan dengan pelanggaran nonfatal pada 1999. Khususnya, antara 1975 dan 1998, 51,7% (11.658/22.547) tindak penahanan sewenang-wenang dikaitkan dengan tindakan militer Indonesia dibandingkan dengan 8,4% (1.897/22.457) tindak penahanan yang hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu asal Timor-Leste atau gabungan antara pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu Timor-Leste. Tapi, 75,7% (2.104/2.779) dari tindak penahanan sewenang-wenang 1999 yang didokumentasi oleh Komisi dikaitkan baik dengan tindakan mandiri pasukan bantuan Timor-Leste atau kolaborasi dengan militer Indonesia dan polisi. 19,2% (534/2.779) tindak penahanan yang didokumentasi yang terjadi pada 1999 terkait hanya dengan militer Indonesia.

Tinjauan manajemen informasi dan metode pengumpulan data Komisi

20. Sebagian besar komisi kebenaran mendasarkan temuan empiris mereka pada basis data yang diperoleh dari pengumpulan kesaksian kualitatif skala besar. Dalam hal ini, CAVR tidak berbeda dengan komisi-komisi di Haiti, Afrika Selatan, atau Peru. Komisi-komisi kebenaran di negara-negara lain dapat memanfaatkan banyak informasi tambahan yang telah dikumpulkan oleh proyek-proyek hak asasi manusia pemerintah dan nonpemerintah. Sumber-sumber tambahan ini penting untuk membandingkan informasi dari tiga sumber (triangulasi) atau memahami pola

dan skala kejadian-kejadian hak asasi manusia dari sudut pandang selain materi kualitatif yang dimiliki sebuah komisi. Tanpa koraborasi dari luar, kerja komisi dapat saja dicap sebagai memihak.

21. CAVR tidak memiliki banyak sumber eksternal sehingga perlu diciptakan sumber-sumber baru. Pertama, Komisi mengembangkan basis-data pelanggaran hak asasi manusia, atau Human Rights Violations Database (HRVD), dari kesaksian-kesaksian naratif yang dikumpulkan melalui pernyataan langsung dari saksi atau korban. Ini dilakukan sebagai bagian dari proses sosialisasi Komisi, yang bermaksud memenuhi tujuan pencarian kebenaran serta memajukan rekonsiliasi dan penerimaan. Komisi menggunakan narasi HRVD untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif.

22. Kedua, Komisi membuat survei tingkat kematian retrospektif (*retrospective mortality survey*, RMS) dari 1.396 rumahtangga yang dipilih secara acak dari sekitar 180.000 rumahtangga di Timor-Leste. Tiap rumahtangga yang dijadikan sampel memberikan informasi mengenai pola bermukim mereka dan anggota rumahtangga serta kerabat yang meninggal selama periode mandat Komisi. Survei tingkat kematian seperti ini umum dijalankan oleh kantor-kantor statistik pemerintah untuk menaksir kondisi-kondisi kesehatan atau memperbaiki hasil sensus. Otoritas kesehatan antarinstansi pemerintah dan para akademisi ahli demografi dan epidemiologi juga biasa melakukan survei semacam ini. Tapi, belum pernah ada sebelumnya komisi kebenaran yang melakukan survei rumahtangga yang disampel secara teliti.

23. Kelompok data ketiga yang dikumpulkan oleh CAVR adalah basis data sensus kuburan (*graveyard census database*, GCD). Setiap perkuburan umum di Timor-Leste dikunjungi, dan nama, tanggal lahir, serta tanggal kematian dicatat dari setiap makam yang memiliki informasi tersebut. Sekitar 327.000 catatan kuburan berhasil dikumpulkan; setelah pengulangan data dibersihkan, tersisa sekitar 319.000 kuburan dalam sampel tersebut, dan sekitar setengahnya memiliki informasi lengkap nama dan tanggal. Catatan-catatan makam sudah digunakan oleh para ahli demografi historis untuk merekonstruksi ulang pola-pola kematian bersejarah, tapi belum pernah ada komisi kebenaran yang menggunakan data sejenis ini sebelumnya sebagai bagian dari rekonstruksi ingatan sejarah. Dalam dunia pengukuran hak asasi manusia, ini adalah inovasi berharga yang sangat memperkaya pemahaman tentang masa lalu.

Estimasi pelanggaran bersejarah di Timor-Leste dan keterbatasannya

Estimasi bersejarah jumlah kematian yang berhubungan dengan konflik di Timor-Leste (1974 – 1999)

24. Skala kematian yang berkaitan dengan konflik selama pendudukan Indonesia di Timor-Leste telah cukup sering menjadi pokok perdebatan: perkiraan bervariasi

antara yang terendah 40.000 sampai lebih daripada 200.000.* Para komentator yang memiliki informasi terbaik menyimpulkan analisis mereka dengan rekomendasi agar dikumpulkan bukti langsung dan dianalisis untuk mendapatkan perkiraan yang lebih tepercaya. Misal saja, sejarawan Robert Cribb menyebutkan bahwa ada lima teknik untuk mengukur jumlah total kematian:

- laporan dari para pelaku
- menghitung jasad orang yang meninggal atau batu-batu nisan
- menangkap ingatan sejarah melalui wawancara
- perkiraan tidak langsung melalui catatan sensus
- perkiraan naluriah (“intuitif”) yang diproyeksikan dari apa yang diketahui para peneliti tentang kondisi setempat

25. Cribb mengeluhkan bahwa pada 1999 – 2001, saat dia menerbitkan serangkaian tulisan mengenai pokok permasalahan tersebut, semua perkiraan yang dapat diperoleh sampai saat itu, termasuk perkiraannya sendiri, terbatas pada dua metode yang paling lemah, yakni: perkiraan tidak langsung dan perkiraan intuitif. Dalam ulasannya yang luas mengenai kematian yang berhubungan dengan konflik di Timor-Leste, John Waddingham menulis: “Tapi, kita harus mengakui, bahwa sampai saat ini dari data-data yang ada mengenai jumlah keseluruhan korban kematian di Timor-Leste, belumlah bisa dihasilkan jumlah akurat yang diakui secara umum.”¹

26. Komisi benar-benar sadar akan kesensitifan dan kepentingan perkiraan pola mortalitas keseluruhan (*total mortality pattern*) maupun pola mortalitas teragregasi (*aggregated mortality pattern*). Komisi-komisi kebenaran lainnya (terutama yang di El Salvador, Guatemala, dan Peru) memanfaatkan daftar data kematian yang luas, meskipun tetap belum lengkap, yang sudah didokumentasikan sebelum komisi kebenaran itu mulai bekerja. Informasi seperti ini tidak dipunyai oleh CAVR, dan oleh sebab itu tiga set data baru telah diciptakan, yaitu: survei kualitatif dari responden yang merasa terdorong untuk memberikan kesaksian kepada Komisi; sampel probabilitas dari 1.396 rumah tangga yang pada masa lalu mengalami kematian karena konflik; dan sensus kuburan di permakaman umum di Timor-Leste. Sumber-sumber ini sesuai dengan definisi Cribb yang kedua dan ketiga mengenai sumber data yang bisa digunakan untuk menganalisis korban kematian.

27. Sementara para aktivis hak asasi manusia kadang-kadang mengutip perbedaan yang besar antara satu perkiraan dengan yang lainnya sebagai bukti tingginya korban

.....
* Perkiraan yang berdasarkan data resmi Portugal, Indonesia, dan Gereja Katolik menunjukkan besarnya jumlah keseluruhan kematian, yaitu kira-kira 200.000. Lihat, misalnya, Ben Kiernan “The Demography of Genocide in Southeast Asia: The Death tolls in Cambodia, 1975 – 1979, and East Timor, 1975 – 1980” *Critical Asian Studies* 35:4 (2003), hal. 585-597, dan Geoffrey Gunn, *East Timor and the United Nations: The Case for Intervention*. Red Sea Press. Lawrenceville, NJ: 1997, hal. 26 – 27. Untuk sisi yang lebih rendah, lihat Robert Cribb “How Many Deaths? Problems in the statistics of massacre in Indonesia (1965 – 1966) and East Timor (1975 – 1980)” dalam Ingrid Wessel dan Georgia Wimhofer, eds. *Violence in Indonesia*. Abera-Verl, Hamburg: 2001. John Waddingham memberikan ulasan perkiraan yang diperoleh dengan pendekatan “intuitif” dan metode tak langsung, lihat John Waddingham “Timor-Leste Death Toll Claims: a Proposal for Listing dan Critical Commentary,” submisi untuk CAVR, 14 Juli 2003.

mati karena pendudukan Indonesia di Timor-Leste, kelihatannya penjelasan yang mungkin [untuk perbedaan ini] adalah ketiadaan data penduduk dan demografis yang tepercaya pada periode tersebut. Sensus penduduk Timor-Leste yang terakhir sebelum pendudukan Indonesia adalah sensus yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Portugis 1970. Sensus-sensus juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada 1980 dan 1990, tetapi ketelitiannya dipertanyakan. Kecurigaan, ketakutan, dan penolakan secara umum penduduk Timor-Leste terhadap pemerintah yang melakukan sensus, serta seringnya peristiwa pemindahan, menghasilkan kesulitan pengukuran data.

28. Bahkan apabila sensus dari 1980 dan 1990 itu teliti, pendataan sensus-sensus tersebut atas jumlah penduduk semata tanpa pemecahan menurut data variabel pokok demografi (seperti usia dan jenis kelamin) banyak mengurangi kemungkinan bagi para ahli sosial untuk menerapkan teknik perkiraan demografis standar terhadap data penduduk resmi. Informasi kependudukan dari sumber-sumber nonpemerintah juga terbatas nilainya karena selama masa konflik, akses para pengamat independen dan kelompok kemanusiaan terhadap Timor-Leste sangat terbatas. Dalam hal Timor-Leste, Terence Hull, seorang ahli demografi, menulis bahwa “keragaman estimasi dalam publikasi BPS (Biro Pusat Statistik) bukannya merupakan indikasi manipulasi data untuk kepentingan politik, tetapi lebih karena sulitnya pemastian tingkat kematian untuk jumlah penduduk yang kecil, apabila untuk estimasinya kita memakai metode demografis tak langsung.”² Karena keterbatasan ini, perdebatan ilmiah mengenai korban mati di Timor-Leste waktu itu belum terpecahkan.

29. Banyak masalah dari para analis terdahulu terpecahkan dengan adanya publikasi hasil awal sensus Timor-Leste 2004, yang terbit pada Maret 2005. Analisis mortalitas yang dilakukan Komisi sangat banyak memakai data sensus yang baru untuk menghitung hasil survei Komisi sendiri dengan cara yang semestinya.

Bukti terdahulu dari migrasi dan pemindahan paksa

30. Kelompok-kelompok besar penduduk pernah dipindahkan selama terjadinya konflik, terutama pada tahun-tahun awal pendudukan (1975 – 1980) dan pada 1999. Misalnya, menurut angka-angka resmi dari pemerintah Indonesia, 268.644 atau 318.921 ‘orang yang terpindahkan’ (*displaced persons*) telah ditampung di 15 pusat penampungan pada Desember 1978.³ Laporan-laporan kualitatif dan penelitian Komisi sendiri menunjukkan bahwa orang-orang dipindahkan paksa ke kamp-kamp pemukiman kembali di mana rezim keamanan yang ketat sangat membatasi kesempatan mereka untuk bertani dan memperoleh akses ke sumber makanan (lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan). Seperti halnya perkiraan mengenai kematian yang berhubungan dengan konflik, analisis demografis yang akurat mengenai pemindahan di Timor-Leste, terutama pada awal-awal tahun invasi, juga bermasalah karena hanya ada sedikit data. Hal ini terutama disebabkan oleh ketiadaan sistem pendaftaran administratif yang sistematis di seluruh negeri dan terbatasnya akses ke penduduk sipil yang diberikan kepada organisasi kemanusiaan internasional dan organisasi hak asasi selama masa konflik tersebut.

Pelanggaran nonfatal di Timor-Leste

31. Cakupan dan kedalaman informasi tentang situasi hak asasi manusia di Timor-Leste selama pendudukan Indonesia bervariasi dari waktu ke waktu. Hal ini terutama karena akses para pengamat hak asasi manusia mancanegara ke wilayah ini sangat dibatasi oleh pemerintah Indonesia. Terlebih lagi, akses oleh lembaga-lembaga kemanusiaan internasional (seperti Palang Merah Internasional atau ICRC dan Catholic Relief Services) ke daerah tersebut dibatasi hanya ke daerah-daerah tertentu dan periode waktu tertentu. Keterbatasan akses organisasi-organisasi internasional ke wilayah ini secara signifikan telah memengaruhi pengetahuan komunitas internasional tentang situasi hak asasi manusia di Timor-Leste.

Pelanggaran-pelanggaran fatal:

analisis dari keseluruhan lingkup, pola, kecenderungan, dan tingkat pertanggungjawaban untuk pelanggaran fatal dan pemindahan di Timor-Leste, 1974 – 1999*

Latar belakang dan tinjauan analisis statistik pelanggaran fatal

32. Dalam analisis kematian karena konflik di Timor-Leste, berbagai pengarang menggunakan bermacam-macam istilah mengenai cara orang meninggal. Misal saja, sebuah tulisan pada 2002 mencatat bahwa di Maubisse, 5.021 dari 9.607 penduduk yang hidup pada 1975 *dibunuh* pada April 1979.⁴ Tapi, sumber asli pernyataan ini menyatakan bahwa desa tersebut “kehilangan” orang-orang ini; maksudnya, mereka mati dengan cara yang tidak dijelaskan lebih jauh.⁵

33. Analisis di sini membedakan antara kematian orang sipil karena kekerasan, yang disebut pembunuhan; kematian karena kelaparan dan sakit, yang sebagian memang disebabkan karena konflik tersebut; kematian para petempur; dan kematian lainnya.[†] Hanya pola dan ukuran besarnya pembunuhan penduduk sipil, kematian karena kelaparan dan sakit, dan orang-orang hilang yang akan diperkirakan dan dianalisis.

34. Perbedaan antara kematian karena kelaparan dan sakit dengan kematian karena pembunuhan berguna untuk dua alasan. Alasan pertama, orang atau lembaga yang menyebabkan kematian karena kekerasan yang disengaja mempunyai pertanggungjawaban langsung dan jelas atas kematian itu, sementara pertanggungjawaban

* Komisi dan Human Rights Data Analysis Group (HRDAG, Kelompok Analisa Data Hak Asasi Manusia) berterimakasih untuk komentar dan saran Profesor David Banks (Duke University), Profesor Claes Cassel (Statistics Sweden), Dr. Michael Cohen (US Department of Transportation), Dr. Peggy Jennings (Women's Rights International), Richard Öhrvall (Statistics Sweden), Dr. Fritz Scheuren (National Opinion Research Center dan American Statistical Association), Profesor Herbert F. Spier (University of Connecticut dan Columbia University), dan Dr. Shana Swiss (Women's Rights International).

† Kategori “lain” termasuk kecelakaan dan kematian pada waktu bersalin, di antara penyebab kematian lain. Kematian-kematian ini tidak ditanyakan secara khusus di dalam kuesioner.

untuk kematian karena kelaparan dan sakit lebih rumit. Kedua, jumlah pembunuhan jauh lebih sedikit dibanding dengan kematian karena kelaparan dan sakit di Timor-Leste antara 1975 dan 1999. Metode yang digunakan di sini untuk memperkirakan jumlah keseluruhan pembunuhan lebih tepat, dan rendahnya (*underestimate*) yang terjadi terhadap nilai totalnya tak separah yang terjadi pada perkiraan tingkat kematian akibat kelaparan dan penyakit.

35. Dalam bagian-bagian di bawah ini, perkiraan dibulatkan ke bilangan ratusan terdekat untuk memperlihatkan bahwa perkiraan selalu merupakan jumlah kurang-lebih dan harus ditafsirkan dengan suatu ambang kesalahan. Tapi, hitungan spesifik atas kematian yang telah terdokumentasi langsung dimasukkan ke daftar secara persis karena angka ini telah diketahui secara tepat. Data dasar statistik telah disediakan agar para ilmuwan dapat meneruskan menganalisa pola kematian baik karena pembunuhan maupun karena kelaparan dan sakit di Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia.*

36. Baik kematian karena pembunuhan maupun kematian karena kelaparan dan sakit mencapai titik lebih tinggi pada periode langsung setelah invasi, yaitu mulai akhir 1975 sampai 1979, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan waktu lainnya sampai dengan 1999. Kedua sebab kematian itu mencapai puncak lain pada 1999, saat pembunuhan mencapai puncak tertinggi sejak 1975 – 1979 sedangkan kematian karena kelaparan dan sakit jauh lebih sedikit terjadi saat itu dibanding masa 1975 – 1979. Analisis Komisi menunjukkan bahwa selama periode 1975 – 1999, ada kurang lebih 18.600 orang bukan petempur yang terbunuh. Selanjutnya, diperkirakan ada lebih daripada 100.000 orang meninggal di atas jumlah yang akan meninggal pada masa damai akibat kelaparan dan penyakit.

37. Kedua rangkaian ini—pembunuhan serta kematian karena kelaparan dan sakit—mengikuti pola yang sama: koefisien korelasi antara perkiraan tahunan (dijelaskan di bawah) untuk jumlah pembunuhan dan jumlah kematian karena kelaparan dan sakit adalah 0,81, suatu tingkat yang termasuk amat tinggi untuk kebanyakan penemuan penelitian sosial.† Analisis terhadap pola pemindahan menunjukkan bahwa pemindahan mencapai puncak tertinggi pada periode 1975 – 1979. Korelasi yang tinggi antara perkiraan jumlah pembunuhan, jumlah kematian karena kelaparan dan sakit, dan jumlah pemindahan menunjukkan bahwa kejadian-kejadian itu berakibat dari kondisi dasar yang sama. Yaitu, ketiga gejala itu kelihatannya mempunyai sebab yang sama. Pola peningkatan yang cepat dalam jumlah pembunuhan, kematian karena kelaparan dan sakit, dan pemindahan pada masa awal pendudukan Indonesia sesuai dengan pernyataan bahwa pendudukanlah yang menyebabkan peningkatan angka kematian.

* Lihat <http://www.hrdag.org/timor> untuk salinan data statistik. Perhatikan bahwa di dalam data ini tidak ada informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi para saksi, korban, ataupun pelaku.

† Korelasi ini menghubungkan perkiraan jumlah tahunan pembunuhan berdasarkan MSE dengan perkiraan jumlah kematian karena lapar dan sakit dari RMS.

Tujuan-tujuan analisis

38. Analisis ini dimulai dengan tinjauan data dan metode yang relevan untuk analisis pelanggaran fatal dan pemindahan. Di segmen 6.2.4, disajikan perkiraan jumlah pembunuhan dan kematian karena kelaparan dan sakit. Untuk setiap cara kematian, perkiraan dari RMS dan MSE diperlihatkan dan diperbandingkan. Segmen pemindahan mengulas keseluruhan peristiwa pemindahan yang diperkirakan dan jumlah rumahtangga yang dipindahkan menurut lintas waktu dan ruang. Pada segmen 6.2.5 disajikan analisis deskriptif kematian yang dilaporkan kepada Komisi dalam HRVD. Analisis menetapkan pola-pola lintas waktu dan ruang, kematian kolektif, demografi, dan afiliasi politik korban, pertanggungjawaban institusional, dan hubungan antara penahanan dan kematian karena konflik.

Tinjauan data dan metode

39. Perkiraan pola-pola dan besarnya jumlah kematian didasarkan pada tiga sumber data asli yang dikumpulkan oleh Komisi, termasuk:

- Basis data pelanggaran hak asasi, Human Rights Violations Database (HRVD), berisi cerita naratif dari 7.669^{*} deponen mengenai pelanggaran yang mereka derita atau mereka saksikan pada periode 1974 – 1999. Narasi ini juga termasuk informasi mengenai kematian karena deprivation atau kekurangan [makanan dan obat-obatan] dan pembunuhan penduduk sipil. Para responden memilih sendiri untuk datang memberikan kesaksian mereka kepada Komisi. Karena itu, hasil proyek ini mungkin tidak mewakili keseluruhan orang yang terkena pelanggaran hak asasi manusia.
- Survei tingkat kematian retrospektif (RMS) merekam sejarah kematian dengan sampel probabilitas dari 1.396 rumahtangga. Di setiap rumahtangga, dua orang dewasa dipilih secara acak. Untuk responden laki-laki, orangtua dan saudara kandung responden tersebut juga dicatat, termasuk apakah mereka itu masih hidup atau sudah mati. Apabila mereka sudah mati, tanggal, tempat, dan cara kematiannya juga didata. Untuk responden wanita, anak-anak responden itu juga dicatat dengan cara yang sama. Dalam 60% rumahtangga, hanya responden dari satu jenis kelamin saja yang bisa diwawancarai, dan dengan begitu hanya ada satu responden yang memberikan informasi mengenai orangtua, saudara kandung, dan anak-anak.
- Sensus perkuburan umum di Timor-Leste, mendata lebih daripada 319.000 batu nisan (disebut GCD).

40. Setiap sumber data hanya mendokumentasikan sebagian kecil dari jumlah keseluruhan kematian di Timor-Leste selama masa 1975 – 1999. Bahkan pada waktu

.....
^{*} Tim Komisi mengumpulkan seluruhnya 7.824 pernyataan. Beberapa di antaranya (155 pernyataan) tidak disertakan dalam HRVD karena tidak menyebutkan pelanggaran yang terkait dengan mandat Komisi, atau pelanggaran yang mereka sebutkan tidak tercakup dalam masa acuan Komisi.

tidak ada konflik, tidak semua orang mati dikubur di perkuburan umum: Ada orang yang dikuburkan jauh dari lokasi tinggalnya atau ada juga orang yang dikuburkan di perkuburan keluarga. Apabila kondisi kematian amat parah, lebih sedikit orang yang dikuburkan dengan penanda yang resmi. Mutu penanda kubur terus merosot, sehingga pada waktu diadakan sensus kuburan pada 2003 – 2004, banyak batu nisan yang tidak bisa didokumentasikan karena informasi yang tertulis hampir tidak bisa dibaca lagi. Penanda kubur lainnya samasekali sudah hancur pada periode antara penguburan dan waktu GCD dikumpulkan.

41. Survei tingkat kematian retrospektif (RMS) memperlihatkan pengalaman yang dilaporkan dalam 1.396 rumahtangga, tetapi mengabaikan pengalaman dari hampir 190.000 rumahtangga yang tidak disampel. HRVD memperlihatkan pengalaman dari 7.668 responden, tetapi kira-kira 940.000 orang Timor-Leste lainnya tidak memberikan kesaksian kepada Komisi. Meskipun begitu, bahkan jika HRVD dan RMS mencerminkan pengalaman setiap orang hidup di Timor-Leste, masih banyak orang meninggal yang belum didokumentasikan karena semua orang yang mungkin masih ingat akan kematian mereka sudah mati juga, meninggalkan Timor-Leste, atau sudah tidak mampu baik secara kejiwaan maupun fisik untuk mengulang cerita tersebut pada waktu pendataan diadakan. Di desa-desa tempat pembunuhan sangat banyak terjadi, ada kemungkinan tidak satu pun saksi yang masih selamat sampai 2002 – 2003. Keluarga-keluarga lain mungkin telah meninggalkan Timor samasekali, dengan membawa ingatan sosial mereka mengenai kematian itu. Ada juga keluarga yang memutuskan untuk tetap merahasiakan pengalaman masa lalu mereka, sehingga tidaklah mungkin mendokumentasikan secara langsung kematian yang pernah menimpa keluarga mereka. Ingatan sosial memang selalu tidak lengkap.

42. RMS menggunakan teknik standar survei rumahtangga yang didasarkan pada kematian yang dilaporkan untuk memperkirakan jumlah keseluruhan pembunuhan, mati karena kelaparan dan sakit, dan mati bertempur. Bagaimana pun, jumlah keseluruhan ini adalah perkiraan jumlah keseluruhan kematian yang *masih mungkin diingat oleh penduduk Timor-Leste masa kini*, yang merupakan himpunan bagian atau subset dari keseluruhan angka kematian yang sesungguhnya terjadi. Perbandingan kematian yang diingat menurut masa kini dengan seluruh jumlah kematian seluruhnya disebut angka cakupan (*coverage rate*).

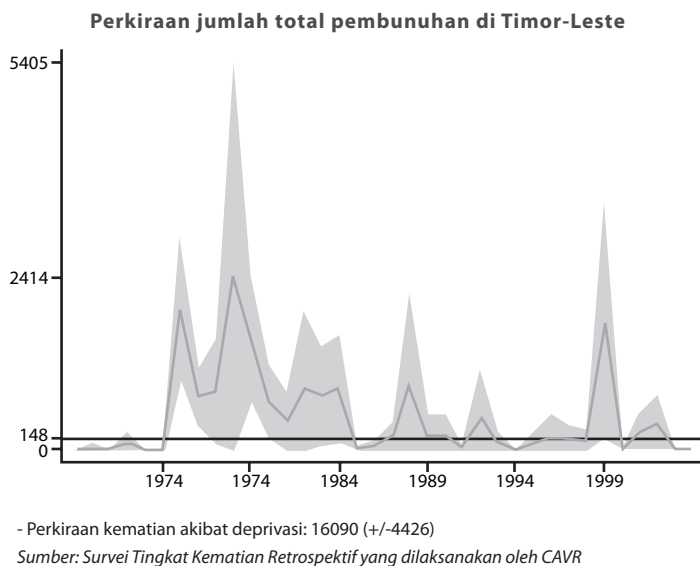
43. Metode alternatif untuk perkiraan jumlah keseluruhan kematian adalah dengan memakai *multiple systems estimation* (MSE). Metode ini dipakai untuk mengoreksi sensus dengan memperbandingkan cakupan antara berbagai proyek dokumentasi. Perkiraan MSE mengenai jumlah kematian karena kelaparan dan sakit dan karena pembunuhan disajikan dan diperbandingkan dengan estimasi RMS. Untuk pembunuhan, perkiraan MSE lebih sesuai, sementara untuk perkiraan seluruh jumlah kematian karena kelaparan dan sakit, perkiraan RMS lebih sesuai.*

.....
* MSE dipakai di mana-mana untuk memperkirakan penaksiran rendah (*under-reporting*) dalam hal sensus kependudukan. (Untuk contohnya, lihat J. G. Robinson, B. Ahmed, P. Das Gupta dan K. Woodrow, "Estimation of Population Coverage in the 1990 United States Census Based on Demographic Analysis", *Journal of the American Statistical Association*, 88 (423), 1992, hal. 1061-1071).

Perkiraan-perkiraan pembunuhan, kematian karena kelaparan dan sakit, dan pemindahan

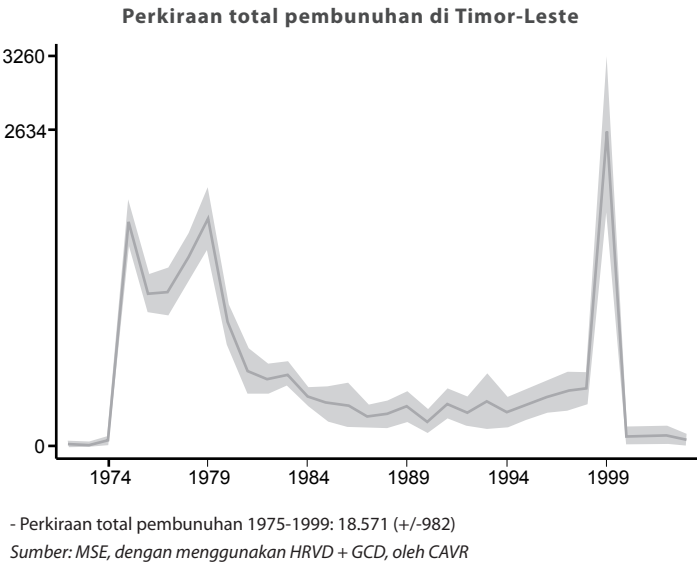
Pembunuhan

44. Jumlah keseluruhan tahunan pembunuhan dapat diperkirakan dari RMS, dan hasilnya diperlihatkan di bawah ini pada Bagan. Bagan ini memperlihatkan tingkat yang relatif tinggi untuk pembunuhan pada periode 1975 – 1979, di samping peningkatan-peningkatan pada awal dasawarsa 1980 dan sebuah puncak lagi pada 1999. Keseluruhan pembunuhan yang diperkirakan melalui RMS adalah 16.000, dengan ambang kesalahan ± 4.400 . Perkiraan RMS untuk pembunuhan didasarkan hanya pada 235 pembunuhan yang dilaporkan. Akibatnya, kesalahannya cukup besar, seperti terlihat pada banyaknya tahun saat rentang kesalahan (*error bands*) menyentuh angka nol (*zero*). Untuk tahun-tahun ini, hipotesis bahwa jumlah kematian yang diperkirakan adalah nol tidak dapat ditolak. Selain itu, rentang kesalahan itu cukup lebar sehingga memungkinkan banyak pola tafsiran yang lain.



45. Seperti halnya kematian karena kelaparan dan sakit, juga dimungkinkan untuk memperkirakan jumlah keseluruhan tahunan pembunuhan dengan menggunakan *multiple systems estimation* (MSE). Untuk pembunuhan, kesaksian-kesaksian CAVR (disebut HRVD) mendokumentasikan hampir sepertiga dari keseluruhan pembunuhan yang diperkirakan, sedangkan seperti disebutkan di atas, hanya ada 235 pembunuhan yang didokumentasikan melalui RMS. Maka, MSE untuk

pembunuhan menggabungkan data GCD dan HRVD. Hasilnya diperlihatkan pada Bagan Perkiraan total pembunuhan di Timor-Leste. MSE memperkirakan, seluruhnya ada 18.600 pembunuhan (+/- 1.000). Sumbu vertikal memperlihatkan maksimum kesalahan (3.260) dan nilai perkiraan maksimum (2.634), keduanya muncul pada 1999. Pola lintas waktu kelihatan lebih jelas di MSE daripada di dalam perkiraan survei RMS: jumlah keseluruhan pembunuhan yang diperkirakan meningkat dari hampir nol (tidak ada pembunuhan) pada periode pra-invasi, lalu naik memuncak dua kali yaitu pada 1975 dan 1979. Sesudah itu pembunuhan merosot dan juga pada dasawarsa 1980 dan dasawarsa 1990. Garis memuncak pada 1999 menandakan titik tertinggi untuk pembunuhan yang diperkirakan, jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya.



46. Perkiraan pembunuhan mengalami kekosongan yang penting dalam data: 1991 seharusnya mempunyai puncak kecil yang menunjukkan pembantaian di Santa Cruz, tetapi tidak cukup laporan yang diterima mengenai peristiwa tersebut sehingga perkiraan pembunuhan di tahun itu tidak bisa tepat. Perkiraan untuk 1991 sebenarnya sedikit lebih rendah dari perkiraan untuk 1990. Hal ini menggambarkan masalah yang dihadapi pada semua koleksi data berskala besar: pembunuhan merupakan peristiwa yang relatif jarang terjadi pada keseluruhan penduduk, sehingga sampel probabilitas tidaklah mungkin merangkum kejadian spesifik (misalnya, tidak adanya laporan mengenai Santa Cruz dalam RMS). Pada laporan kualitatif seperti HRVD, sumber-sumber investigasi harus dikhususkan untuk peristiwa-peristiwa spesifik; kalau tidak, tidak ada jaminan peristiwa itu terdokumentasi. Meskipun HRVD menerima lebih daripada 20 kematian yang dilaporkan untuk peristiwa tersebut, itu

hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhannya. Peristiwa-peristiwa yang lebih kecil dapat tercakup dengan lebih baik, sehingga perkiraan lintas waktu tidak secara teliti mencerminkan pentingnya 1991.*

47. Tidak seperti untuk kematian karena kelaparan dan sakit, pembunuhan sepertinya tidaklah mungkin ditaksir jauh terlalu rendah. Pertama, pembunuhan lebih jarang menimpa keseluruhan keluarga dibandingkan dengan kematian karena kelaparan dan sakit, sehingga lebih besar kemungkinan ada anggota keluarga yang selamat yang bisa melaporkan kejadian ini. Kedua, perbandingan antara pembunuhan yang didokumentasikan dengan seluruh pembunuhan yang diperkirakan (angka cakupan) adalah 0,637. Angka itu lebih tinggi daripada perbandingan antara kematian karena kelaparan dan sakit yang terdokumentasi dengan kematian karena kelaparan dan sakit yang diperkirakan (0,513). Angka cakupan yang tinggi untuk pembunuhan berarti bahwa MSE sendiri sebenarnya dapat lebih baik mengoreksi pembunuhan yang tidak dilaporkan dibandingkan dengan karena kelaparan dan sakit yang tidak dilaporkan. Selanjutnya, pembunuhan biasanya relatif jarang terjadi, dan karena itu tidaklah mungkin menggunakan analisis spekulatif yang menggunakan data sensus untuk menentukan angka pembunuhan, seperti yang sering dilakukan untuk menentukan angka kematian karena kelaparan dan sakit. Atas dasar ini, kami menemukan bahwa telah terjadi kurang lebih 18.600 pembunuhan, dengan ambang kesalahan +/- 1.000.

Kematian karena kelaparan dan sakit

48. Analisis jumlah keseluruhan kematian karena kelaparan dan sakit dimulai dengan analisis jumlah total kematian yang diperkirakan berdasarkan RMS, dan hasilnya disajikan di bawah pada Bagan Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste.† Kematian yang diperkirakan disajikan bersamaan dengan jumlah kematian yang diproyeksikan dari angka kematian karena kelaparan dan sakit 1972 – 1974 (dijelaskan di bawah). Jumlah kematian yang dikaitkan responden dengan “kelaparan atau penyakit” meningkat ke tingkat yang paling tinggi selama masa pasca-invasi, 1975 – 1980. Pada periode 1983 – 1998 jumlah perkiraan total berfluktuasi sekitar nilai median sebesar 3.632 perkiraan kematian tahunan. Jumlah total tahunan lambat laun meningkat selama dasawarsa 1990, dan mencapai puncak terakhirnya pada 1999.‡

* Ingat bahwa ambang kesalahan merepresentasikan “lubang” dalam data seperti ini. Maksudnya, kegiatan *sampling* itu memang hanya mencakup informasi sejumlah kecil dari keseluruhan peristiwa yang ada. Beberapa peristiwa besar mungkin jadi tidak tertera (seperti pembantaian di Santa Cruz). Tingkat kesalahan yang dihitung untuk perkiraan keseluruhan jumlah peristiwa dirancang untuk mencerminkan ketidakpastian jumlah keseluruhan yang diperkirakan, termasuk juga kenyataan bahwa peristiwa penting mungkin tidak dicatat.

† Data tersebut tidak mencakupi untuk perkiraan sistem-tiga tentang kematian karena lapar dan sakit.

‡ Seperti yang telah dibahas dalam subbab mengenai metodologi, kenaikan lamban kematian karena kelaparan dan sakit yang diperkirakan mulai dari awal dasawarsa 1980 sampai akhir dasawarsa 1990 adalah merupakan akibat kenaikan jumlah penduduk, dan juga karena berkurangnya jumlah kematian yang tidak dapat diingat lagi berhubung tidak adanya anggota keluarga lagi yang masih selamat pada 2004 ketika survei dilakukan.

49. Jumlah total kematian yang diperkirakan karena kelaparan dan sakit pada 1975 – 1999 adalah kira-kira 143.700, dengan ambang kesalahan kira-kira +/- 11.000.* Sebagian dari kasus kematian ini adalah kematian normal, dalam arti hal itu juga akan terjadi bila tidak ada konflik atau bahaya kelaparan. Untuk taksiran kematian yang bisa dikaitkan dengan konflik, kita harus menetapkan lebih dahulu berapa banyak kematian yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh kelaparan dan penyakit pada saat tidak ada konflik.

50. Tahun-tahun masa prapendudukan 1972 – 1974 merupakan masa damai, saat jumlah kasus kematian karena kelaparan dan sakit dapat dianggap wajar. Pertama, untuk menghitung data patokan awal jumlah penduduk, estimasi penduduk untuk 1971 – 2003 diinterpolasikan antara jumlah total yang dilaporkan dalam sensus Portugis 1970 (609.477) dan jumlah total dari sensus 2004 (924.642). Dari RMS, jumlah kematian karena kelaparan dan sakit selama 1972 – 1974 yang diperkirakan ada kurang-lebih 1.686 – 2.252. Angka kematian setiap tahunnya dihitung dengan cara membagi jumlah proyeksi penduduk tiap tahunnya dengan perkiraan RMS atas jumlah kematian tahun itu. Dengan cara itu, rata-rata angka kematian tahunan karena kelaparan dan sakit 1972 – 1974 dapat dihitung.

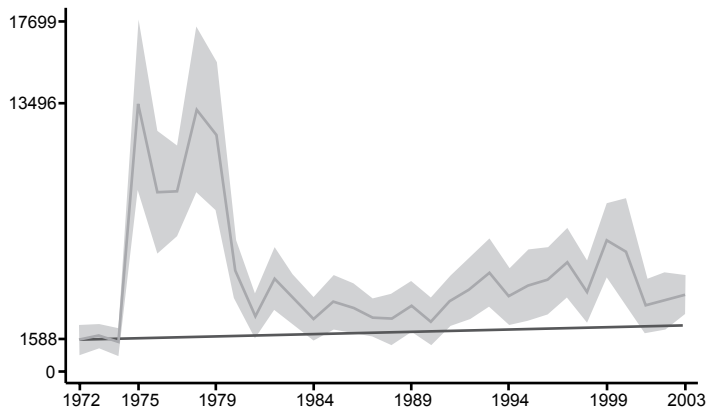
51. Perkiraan angka kematian (3,1 kematian per 1.000 orang) diterapkan terhadap penduduk yang diproyeksikan setiap tahunnya sampai dengan 2003.† Perkiraan angka-angka kematian ini membentuk data patokan awal (*baseline*) yang diperlihatkan pada Bagan Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste. Pengurangan perkiraan tahunan RMS dengan proyeksi jumlah kematian wajar pada masa damai menghasilkan adanya kelebihan sebanyak 84.200 kematian karena kelaparan dan sakit (+/- 11.000).‡ Jumlah kematian ini merupakan perkiraan berdasarkan RMS dari kematian yang melampaui jumlah total yang memang dapat diduga apabila angka kematian karena lapar dan sakit terus berlangsung seperti pada masa damai sebelum invasi.

.....
* Jumlah total ambang kesalahan dihitung dengan menghitung akar kuadrat jumlah varian (*variances*) estimasi tahunan dan dikalikan dengan angka konvensional 1,96 untuk mendapatkan selang kepercayaan 95%.

† Angka patokan dasar ini (3,1 kematian per 1.000 orang) termasuk rendah: angka rata-rata wilayah di Asia Tenggara pada awal dasawarsa 1970 adalah 12-14 per 1.000. Lampiran metodologi menyebut bagaimana penaksiran lebih rendah ini bisa disesuaikan dengan menggunakan perkiraan berbasis sensus dari angka-kematian kasar (*crude death rate* - CDR). Bagaimanapun juga, penambahan dengan pengukuran berbasis sensus meminta banyak asumsi mengenai kualitas perkiraan CDR. Penemuan-penemuan inti yang disajikan di sini hanya didasarkan pada estimasi-estimasi sensus 1970 dan 2004 dan data yang dikumpulkan oleh Komisi.

‡ Ambang kesalahan jumlah kelebihan kematian dihitung dengan cara yang sama dengan ambang kesalahan jumlah total, termasuk kesalahan standar tahun-tahun yang mewakili jumlah kelebihan total.

Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste



- Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1972 - 2003: 161.098 (+/- 10.952)
- Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1975 - 1999: 135.017 (+/- 10.251)
- Kelebihan jumlah kematian di atas data perkiraan awal (*baseline*), 1975 - 1999: 86.539 (+/- 10.251)

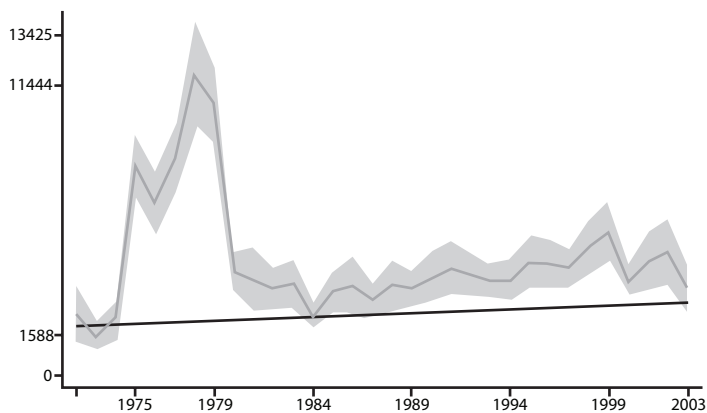
Sumber: Survei Tingkat Kematian Retrospektif yang dilaksanakan oleh CAVR

52. Metode alternatif untuk mendapatkan perkiraan jumlah total untuk kelebihan kematian adalah menghitung suatu MSE sistem-dua dengan menggunakan RMS dan GCD. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena dua alasan berikut. Pertama, jumlah kematian karena kelaparan dan sakit yang dilaporkan dalam RMS pada 1974 – 1999 (2.231) kecil kalau dibandingkan dengan jumlah total perkiraan untuk kematian karena kelaparan dan sakit berdasarkan RMS (143.700). Kedua, perkiraan sistem-dua dapat menyimpang akibat korelasi yang tidak terkontrol antara sistem-sistem tersebut.^{*} Misal saja, jika orang yang mati itu cenderung tidak dikubur di perkuburan umum dan juga cenderung tidak diingat lagi oleh para responden survei, maka sistem dua akan menghasilkan korelasi positif. Ingat bahwa korelasi ini banyak terjadi pada tahun-tahun langsung setelah invasi, ketika banyak orang hidup dalam kondisi yang serba sulit, pertama-tama karena mereka harus selalu berpindah-pindah dan kemudian juga karena ditahan di kamp-kamp pemukiman. Kedua kondisi ini lebih mengarah ke bencana kematian besar-besaran dari keseluruhan kelompok dan juga ke situasi di mana hanya sedikit orang bisa terkubur di perkuburan umum dengan penanda kubur yang permanen. Korelasi positif antara GCD dan RMS pada tahun-tahun yang mencolok itu kemungkinan besar dapat sangat membiaskan estimasi sistem-dua ke arah menurun.

^{*} Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data itu tidak mencukupi model sistem-tiga kematian karena kelaparan dan sakit. Ada 5.101 kematian karena kelaparan dan sakit yang dilaporkan dalam HRVD, kira-kira dua kali lebih banyak daripada dalam RMS; namun begitu, jumlah itu adalah sebagian kecil dari jumlah total yang dapat diduga untuk kematian karena kelaparan dan sakit. RMS lebih disukai untuk dipakai daripada HRVD karena RMS dikumpulkan menurut sampel probabilitas. HRVD adalah sampel kemudahan, sehingga memakai HRVD bisa menimbulkan asumsi bahwa semua kematian setiap tahunnya mempunyai probabilitas yang sama untuk didokumentasikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat lampiran metodologi mengenai bagaimana MSE dihitung.

53. Perkiraan MSE ini diperlihatkan pada Bagan Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste. Jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit yang diperkirakan dalam 1975 – 1999 adalah kira-kira 123.500 (+/- 5.200).^{*} Kelebihan kematian yang diperkirakan di atas jumlah dasar pada masa damai adalah 75.000 (+/-5.200). Perkiraan MSE ini lebih rendah dari perkiraan berdasarkan survei RMS, hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa ada korelasi positif antara RMS dan GCD. Nilai tengah (*median*) kematian karena kelaparan dan sakit pada tahun-tahun “normal” pendudukan, 1983 – 1998, seperti yang diperkirakan melalui MSE (3.727) adalah sama dengan nilai yang ditemukan survei (3.632). Maksudnya yaitu, perkiraan survei RMS dan perkiraan MSE untuk tahun-tahun “normal” pendudukan adalah sama, tetapi RMS menghasilkan perkiraan yang lebih tinggi untuk tahun-tahun yang luarbiasa. Kelihatannya pada tahun-tahun normal ada lebih sedikit kematian yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa bencana yang menghapuskan keseluruhan keluarga (yang menyebabkan survei mempunyai pelaporan yang lebih rendah), dan secara relatif juga lebih sedikit orang mati yang dikuburkan di luar perkuburan umum. Akibatnya, selama tahun-tahun normal, MSE dan survei RMS menghasilkan perkiraan yang sama. Selama tahun-tahun luarbiasa, kedua metode menaksir terlalu rendah (*underestimate*) jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit, tetapi penaksiran rendah MSE menjadi lebih serius karena hanya sebagian kecil dari seluruh orang mati selama tahun-tahun luarbiasa yang dikuburkan di perkuburan umum.

Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste



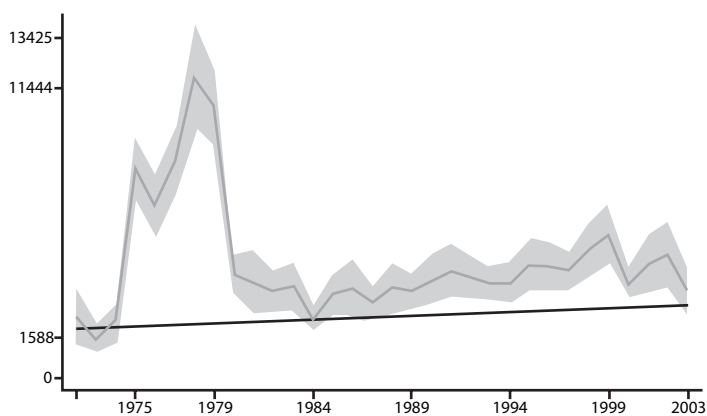
- Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1972 - 2003: 146.232 (+/- 5.753)
- Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1975 - 1999: 123.529 (+/- 5.184)
- Kelebihan jumlah kematian di atas data perkiraan awal (*baseline*), 1975 - 1999: 64.037 (+/- 5.184)

Sumber: Perkiraan sistem ganda RMS - GCD, oleh CAVR

^{*} Untuk MSE, hanya korban mati bernama yang dilaporkan dalam RMS yang dimasukkan. Bobot sampling RMS tidak dipakai. GCD tidak memasukkan cara kematian, oleh sebab itu data dari GCD dialokasikan seperti yang disebutkan dalam lampiran metodologi.

54. Pola yang diperlihatkan dalam Bagan {gdepr_2mse_rmsgcd.pdf} mirip dengan perkiraan RMS, tetapi jumlahnya lebih rendah: ingat bahwa nilai maksimum yang diperkirakan pada Bagan {gdepr_2mse_rmsgcd.pdf} adalah 11.444 sedangkan dalam perkiraan RMS nilai itu adalah 13.496. Ada satu perbedaan dalam pola-pola lintas waktu: Jumlah-jumlah total yang diperkirakan MSE untuk 1975 lebih rendah daripada perkiraan-perkiraan untuk 1978 dan 1979, sebaliknya di dalam survei RMS perkiraan-perkiraan untuk ketiga tahun tersebut hampir sama. Dalam perkiraan RMS, rentang kesalahan (*error bands*) untuk ketiga tahun tersebut adalah besar kalau dibandingkan dengan perbedaan di antara tahun-tahun itu, dan oleh sebab itu, tidaklah bisa ditolak hipotesis bahwa jumlah total sebenarnya pada tahun-tahun itu adalah sama.

Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste



- Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1972 - 2003: 146.232 (+/- 5.753)
- Perkiraan kematian total akibat kelaparan/penyakit, 1975 - 1999: 123.529 (+/- 5.184)
- Kelebihan jumlah kematian di atas data perkiraan awal (*baseline*), 1975 - 1999: 64.037 (+/- 5.184)

Sumber: Perkiraan sistem ganda RMS - GCD, oleh CAVR

55. Perkiraan MSE menunjukkan bahwa kematian pada 1975 lebih sedikit daripada yang bisa dinyatakan dalam perkiraan RMS. Di luar perbedaan ini, perkiraan-perkiraan MSE dan RMS mirip dalam hal besarnya dan pola. Perlu ditegaskan bahwa kedua perkiraan ini mempunyai metodologi yang sangat berlainan: Penghitungan ukuran besarnya dalam RMS banyak mengandalkan bobot dalam survei, sementara kebanyakan data dalam MSE berasal dari batu nisan yang memiliki tanggal dalam setiap tahunnya dan dari pencocokan antara korban mati yang diidentifikasi melalui RMS dengan nama, tanggal, dan lokasi kubur tersebut.

56. Bila kita menggabungkan hasil dari kedua perkiraan ini, maka, kalau dihitung secara hati-hati dan sangat konservatif, jumlah kematian yang disebabkan karena kelaparan dan penyakit mencapai antara 75.000 dan 86.500 kasus di atas jumlah

kematian yang biasa terjadi pada masa damai. Perkiraan ini hanya dihitung berdasarkan sensus 1970 dan 2004 dan data-data dari Komisi. Perkiraan ini bisa dikatakan sebagai perkiraan jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit *yang masih mungkin diingat pada 2004*. Hal ini merupakan pembatasan penting dalam penghitungan. Baik perkiraan RMS maupun perkiraan MSE sangat konservatif karena banyak kasus kematian *tidak* bisa diingat lagi pada 2004. Sebagian kasus kematian tidak meninggalkan sisa anggota keluarga lagi yang dapat melaporkan kasus kematian itu pada 2004, dan sebagian orang yang meninggal pada tahun-tahun sangat luarbiasa tersebut tidaklah dikuburkan di perkuburan umum. Maka tahun-tahun saat survei kelihatannya menghadapi masalah kasus-kasus hilangnya seluruh anggota keluarga juga merupakan tahun-tahun saat orang hampir tidak bisa dikuburkan di perkuburan umum. Korelasi positif antara data GCD dan RMS data menciptakan penaksiran lebih rendah (*underestimation*) dalam MSE.

57. Lampiran metodologi menyajikan sebuah model yang dapat menyesuaikan perkiraan RMS dan MSE untuk mengoreksi hilangnya pengetahuan mengenai kematian setelah beberapa waktu. Model ini memakai informasi sensus tambahan, termasuk angka kematian kasar (*crude death rates*) yang diperkirakan oleh pemerintah AS dan Indonesia. Apabila asumsi dalam pokok dasar data dan dalam model-model itu benar, maka jumlah total kematian karena kelaparan dan sakit bisa mencapai 103.000 di atas jumlah kasus yang biasa terjadi pada masa damai, dengan suatu kemungkinan (walaupun kecil) perkiraan yang paling tinggi, yaitu 183.300. Meskipun ada ketidakpastian dalam model ini, Komisi menyimpulkan bahwa selama periode 1975 – 1999, orang yang mati karena kelaparan dan sakit minimal ada 100.000 di atas jumlah kasus kematian yang biasa terjadi pada masa damai.

Pemindahan

58. Penemuan kunci dari analisis pemindahan diuraikan di bawah:

- Pemindahan terjadi secara luas: 55,5% rumahtangga yang disurvei melaporkan satu atau lebih peristiwa pemindahan, dengan jumlah total 2.011 peristiwa pemindahan yang dilaporkan antara 1974 dan 1999.*
- Apabila diproyeksikan pada penduduk seluruhnya, survei menghasilkan 108.200 rumahtangga yang dipindahkan,† yang mengalami 282.800 peristiwa pemindahan‡.
- Sebagian besar pemindahan terjadi secara lokal. Dari keseluruhan peristiwa pemindahan, 54,3% terjadi di satu kecamatan; 15,6% terjadi di kabupaten; 17,4% terjadi di wilayah; 9,3% terjadi di Timor-Leste; dan 2,4% terjadi di luar

* Menurut sensus 1990, ada kurang lebih 4,5 orang per rumahtangga pada tahun itu. Bagan memperlihatkan kenaikan sampai 4,75 orang per rumahtangga (924.642/194.943) pada sensus 2004. Selang kepercayaan adalah 51,8%-59,2% rumahtangga.

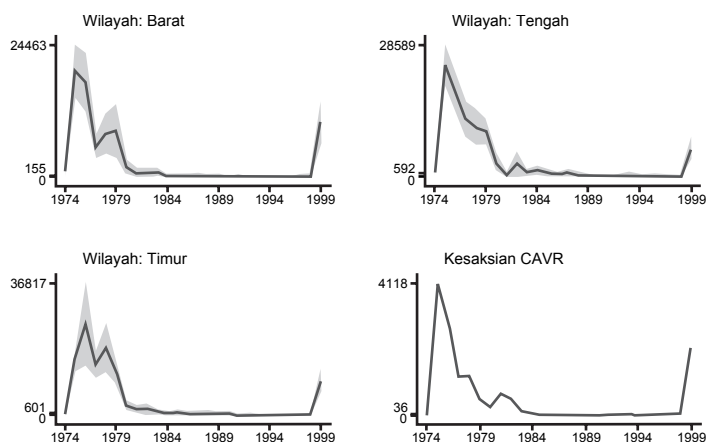
† Selang kepercayaan adalah 101.013-115.412 rumahtangga.

‡ Selang kepercayaan adalah 251.631 – 313.990 peristiwa.

Timor-Leste.^{*} Bagaimanapun, pada 1999, pemindahan yang memindahkan rumahtangga keluar Timor-Leste naik mencapai 9,3% (+/-6,1%) dari seluruh pemindahan pada tahun itu.

- Banyak pemindahan terjadi berturut-turut dalam waktu yang cepat: 22,2% dari peristiwa pemindahan berlangsung dalam waktu satu bulan atau kurang, dan 50,1% berlangsung dalam waktu satu tahun atau kurang. Akan tetapi, pemindahan lainnya berlangsung dalam waktu panjang, sehingga rata-rata periode pemindahan adalah 46,7 bulan.[†] Puluhan ribu rumahtangga mengatakan mereka dipindah-pindahkan dari masa pasca-invasi 1975q4 (kuartal ke-4 1975) terus-menerus sampai 1999q4 (kuartal ke-4 1999). [Lihat Bagan Jumlah total rumahtangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah pada paragraf 60 untuk analisis lebih lanjut.]
- Badan yang dilaporkan penduduk sebagai kelompok yang paling sering menyuruh mereka pindah adalah Militer Indonesia (46,4%), diikuti oleh Fretilin/ Falintil (15,0%) dan kelompok milisi (8,8%).[‡] Responden melaporkan bahwa “konflik” merupakan motivasi dari 52,3% keseluruhan pemindahan mereka, dengan tambahan 16,3%. “dipaksa oleh Militer Indonesia”.
- Sebagian besar pemindahan terjadi antara 1975 – 1980. Tahun maksimumnya adalah 1975 dan 1976, dengan 61.400 (+/- 13.300) dan 59.800 (+/- 7.200) peristiwa pemindahan secara beruntun. Jumlah peristiwa pemindahan pada 1999 jauh lebih sedikit yaitu kira-kira 28.100 (+/- 5.600) peristiwa.

Perkiraan peristiwa pemindahan di Timor-Leste (dengan rentang kesalahan)



Sumber: Survei Kematian Retrospektif (RMS), CAVR

Catatan: Terhitung satu pemindahan per rumahtangga per tahun

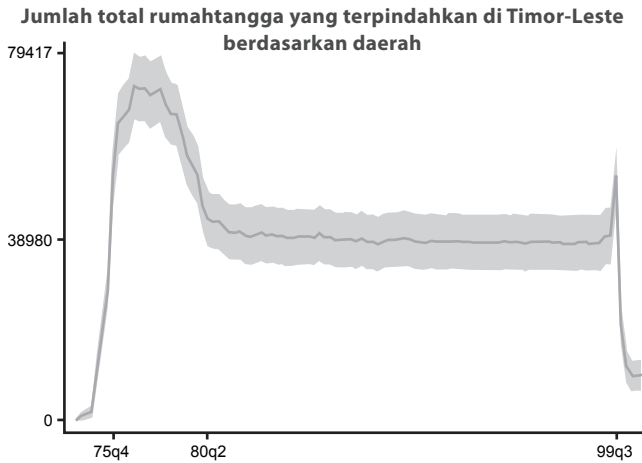
* Ambang kesalahannya adalah +/- 10,4% untuk pemindahan di dalam kecamatan, dan 4,6% atau kurang perkiraan lainnya. Penemuan ini mungkin dibatasi oleh pembatasan karena orang-orang yang berada di kamp pengungsian di Timor Barat tidak turut diwawancarai.

† Selang kepercayaan adalah 41-52 bulan.

‡ Ambang kesalahan adalah +/- 4,2%.

59. Bagan di atas (Perkiraan peristiwa pemindahan di Timor-Leste [dengan rentang kesalahan]) memperlihatkan jumlah peristiwa pemindahan menurut tahunnya pada tiga daerah di Timor-Leste, dan juga jumlah total peristiwa pemindahan yang dilaporkan kepada Komisi dalam kesaksian kualitatif. Sumbu vertikal memperlihatkan nilai maksimum (pada titik puncak rentang kesalahan) untuk tiap daerah. Bagan Jumlah total rumahtangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah memperlihatkan 1975 dan 1976 sebagai puncak tahun terjadinya pemindahan, dengan 1977 – 1979 dan 1999 pada tingkat yang lebih rendah dan kurang lebih sama. Komisi mencatat bahwa 1975 dan 1976 secara statistik tidak bisa saling dibedakan dalam perkiraan regionalnya. Dalam bahasa formalnya, tidak mungkin untuk sepenuhnya menolak hipotesis bahwa tahun-tahun ini mempunyai jumlah peristiwa pemindahan yang sepadan. Wilayah Barat dan Tengah memperlihatkan penurunan dari puncak-puncak pada 1975 – 1976 ke tingkat yang lebih rendah pada 1979; penurunannya adalah ke arah nol (*zero*). Sebaliknya, wilayah Timur memperlihatkan pada 1979 tingkat pemindahannya hampir sama dengan intensitas pemindahan pada waktu memasuki masa pascainvasi.

60. Cara lain untuk memandang kasus pemindahan adalah dengan menetapkan berapa banyak rumahtangga yang dipindahkan pada setiap periode. Bagan Perkiraan Peristiwa Pemindahan di Timor-Leste (dengan rentang kesalahan) memperlihatkan ada berapa rumahtangga yang dipaksa pindah setiap tahunnya. Bagan Jumlah total rumahtangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah memperlihatkan ada berapa rumahtangga yang dipaksa tinggal di suatu tempat yang tidak mereka anggap sebagai rumah mereka pada setiap tahunnya. Bagan Perkiraan peristiwa pemindahan di Timor-Leste (dengan rentang kesalahan) memperlihatkan ada berapa “peristiwa pemindahan” yang diderita setiap periodenya, sementara Bagan Jumlah total rumahtangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah memperlihatkan ada berapa rumahtangga dalam status “pemindahan” dalam setiap periode. Sumbu vertikal memperlihatkan nilai maksimum pada puncak pita kesalahan dan nilai median dari kuartal ketiga 1980 (1980q3) sampai ke kuartal kedua 1999 (1999q2).



Sumber: Survei Kematian Retrospektif (Modul Pemindahan), oleh CAVR

61. Penduduk dipindah-pindahkan pada akhir 1975 dan awal 1976, dan mereka tidak bisa pulang ke rumah mereka untuk waktu yang lama. Pemindahan lainnya terus berlangsung pada 1977, dan lebih banyak lagi pada 1978, dan orang-orang yang lebih dahulu diungsikan masih tetap tidak bisa pulang ke rumah mereka. Baru pada 1979 sajalah sejumlah besar rumahtangga menetap di tempat-tempat yang mereka anggap “rumah”. Dalam tiap tahun antara 1980 sampai 1999, kira-kira 39.000 rumahtangga tetap menganggap diri mereka dipindahkan. Sejumlah 15.000 rumahtangga lagi dipindahkan pada kuartal ketiga 1999. Akan tetapi, pada kuartal keempat, ada lebih dari 32.500 rumahtangga yang pulang ke rumah mereka, dan jumlah rumahtangga yang diperkirakan tetap dipindahkan merosot sampai ke kurang-lebih 20.400, kemudian turun lagi ke 11.700 pada kuartal pertama 2000, dan ke 9.600 pada kuartal kedua 2000.

Analisis statistik deskriptif mengenai pelanggaran fatal yang dilaporkan pada Komisi

62. Bagian ini menjelaskan pola pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dalam pernyataan naratif (HRVD). Ukuran dan pola yang dibebankan di sini tidak mewakili ukuran jumlah total dan keseluruhan pola pembunuhan dan penghilangan. Bagian ini lebih mengemukakan analisis mengenai pola dan kecenderungan pembunuhan dan penghilangan yang telah diketahui melalui pernyataan kualitatif Komisi.*

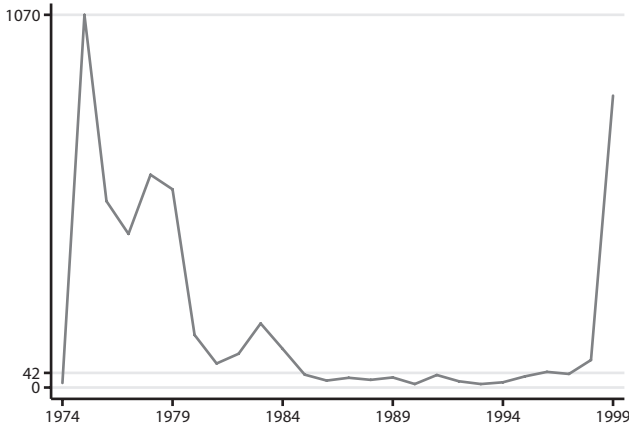
Pola lintas waktu pembunuhan dan penghilangan para non-petempur yang dilaporkan

63. Pola pembunuhan dan penghilangan banyak bervariasi dalam lintas waktu. Seperti yang dapat dilihat pada Bagan Jumlah Kejadian Pembunuhan Penduduk Sipil yang Dilaporkan, 1974 – 1999, 67,4% (3.451/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan terpusat pada periode 1975 – 1981. 16,4% (838/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan terjadi pada 1999 sebelum, selama, dan sesudah Jajak Pendapat yang dikelola oleh PBB. Jumlah tertinggi pembunuhan yang dilaporkan kepada Komisi adalah pada masa invasi militer Indonesia dan pada tahun-tahun awal pendudukan. Meski tahun yang menunjukkan jumlah pembunuhan tertinggi terhadap para non-petempur yang dilaporkan adalah 1975, sifat terbuka dari proses pengambilan pernyataan itu sedemikian rupa sehingga ada banyak sekali ketidaktepatan tanggal yang ditemukan dalam pernyataan yang melaporkan pembunuhan pada pertengahan dan akhir dasawarsa 1970.† Oleh sebab itu ada kemungkinan sebagian pembunuhan terhadap non-petempur yang dilaporkan terjadi pada 1975 bisa saja sebenarnya terjadi pada 1976 atau 1977.

* Lihat bagian di bawah untuk pembahasan terperinci mengenai sifat dan pembatasan data yang dikumpulkan melalui proses pengambilan pernyataan oleh Komisi.

† Lihat Lampiran Metode Statistik untuk keterangan yang lebih terperinci mengenai ketidaktepatan tanggal dalam proses pengambilan pernyataan.

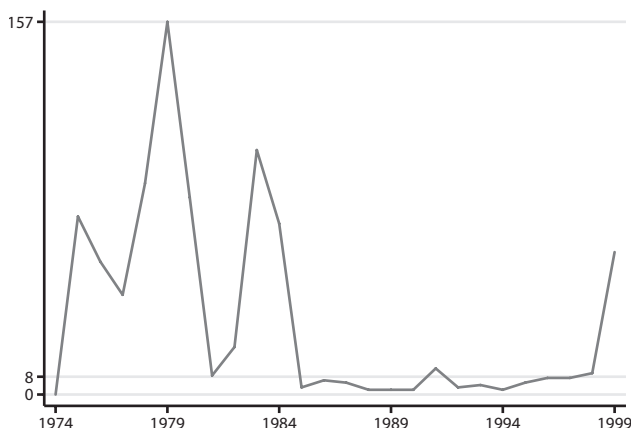
Jumlah kejadian pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

64. Jumlah orang hilang yang dilaporkan kepada Komisi jauh lebih rendah daripada pembunuhan terhadap para non-petempur yang dilaporkan: ada 5.120 pembunuhan para non-petempur yang dilaporkan kepada Komisi, tetapi hanya ada 835 penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi. Selanjutnya, pola penghilangan yang dilaporkan sangat berbeda dari pembunuhan terhadap para non-petempur, seperti yang dapat dilihat pada Bagan Jumlah Kejadian Penghilangan yang Dilaporkan, 1974 – 1999. Ternyata, sejumlah besar pembunuhan para non-petempur banyak terjadi pada masa-masa awal tahun invasi, sementara sejumlah besar penghilangan terutama terjadi menjelang akhir masa-masa awal invasi pada 1979 dan 1983 – 1984, tidak lama sebelum dimulainya periode ‘normalisasi dan konsolidasi’ pendudukan Indonesia: 40,0% (332/835) dari orang hilang yang dilaporkan kepada Komisi terjadi pada 1979, 1983, ataupun 1984. Pola mengenai penghilangan dan pembunuhan para non-petempur yang dilaporkan sesuai dengan hipotesis bahwa kedua gejala pelanggaran itu digerakkan oleh kebijakan atau perbuatan yang berbeda yang diambil oleh mereka yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Khususnya, penghilangan digunakan dengan cara yang lebih bersasaran sebagai alat militer Indonesia untuk menumpas Resistansi.

Jumlah kejadian penghilangan yang dilaporkan, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

65. 20,9% (1.070/5.120) pembunuhan yang didokumentasikan dari proses pengambilan pernyataan Komisi terjadi pada 1975. Seperti terlihat pada Tabel Penghitungan Kejadian Pembunuhan Penduduk Sipil, 1975, dari seluruh pembunuhan pada 1975 yang didokumentasikan, 26,5% (283/1.070) tidak mempunyai informasi mengenai bulan saat pembunuhan itu terjadi. Akan tetapi, 19,5% (348/1.070) dari pembunuhan ini terjadi pada waktu konflik internal antarpertai dan pada waktu serangan lintas-batas Indonesia yang pertama kali, sementara 32,7% (350/1.070) terjadi pada Desember pada waktu diadakannya invasi besar-besaran militer Indonesia di Timor-Leste.

Tabel 1: Penghitungan kejadian pembunuhan penduduk sipil, 1975

Tahun	Frekuensi	%
Januari	4	0.4
Februari	6	0.6
Maret	6	0.6
April	20	1.9
Mei	3	0.3
Juni	3	0.3
Juli	6	0.6
Agustus	194	18.1
September	154	14.4
Oktober	30	2.8
November	11	1
Desember	350	32.7
Tak dilaporkan	283	26.5
Total	1070	100

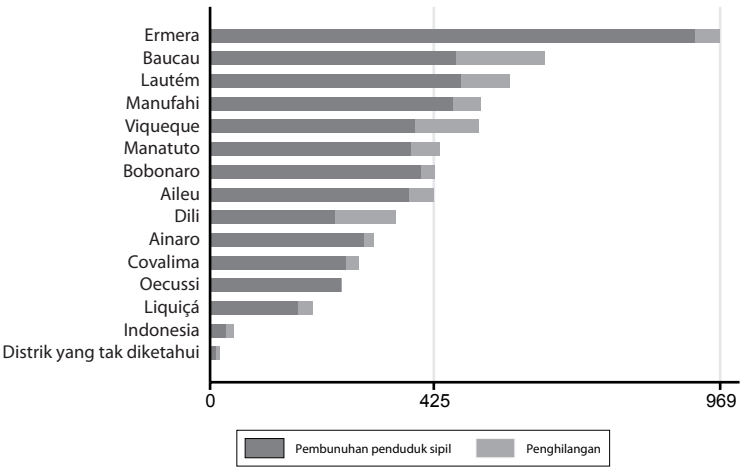
66. Sangatlah menarik bahwa hanya 3,8% (41/1.070) dari pembunuhan yang didokumentasikan pada 1975 terjadi pada Oktober dan November. Jadi, data dari proses pengambilan pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa pembunuhan dalam skala besar terjadi pada waktu konflik internal antarpantai pada Agustus dan September, kemudian ada masa yang relatif tenang dalam hal pembunuhan, hingga kemudian terjadi lagi pembunuhan berskala besar pada Desember pada masa invasi militer Indonesia ke Timor-Leste.

Pola lintas-ruang pembunuhan dan penghilangan dari para non-petempur yang dilaporkan

67. Data yang didasarkan pada sampel nonacak (seperti data ini) tidak bisa dipakai untuk mengkaji secara langsung perbedaan ukuran besarnya pelanggaran antara wilayah dan distrik. Data yang seperti itu hanya dapat mewakili cakupan total pelanggaran dari wilayah ke wilayah sejauh para deponen yang memberi pernyataannya mewakili penduduk lokal di mana mereka tinggal dan dipilih sesuai dengan proporsi kekerasan yang terjadi di masing-masing distrik.

68. Bagan Penghitungan Pelanggaran yang Dilaporkan, Berdasarkan Jenis dan Distrik memperlihatkan jumlah pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan menurut distrik di mana kekerasan itu terjadi, sebagaimana yang dilaporkan dalam proses pengambilan pernyataan Komisi. Ermera mempunyai lebih banyak pembunuhan yang dilaporkan daripada distrik lainnya, berkisar 18% (920/5120) dari keseluruhan pembunuhan yang dilaporkan. Secara relatif hanya sedikit pembunuhan para non-petempur di Indonesia, Dili, dan Liquiçá yang dilaporkan kepada Komisi.

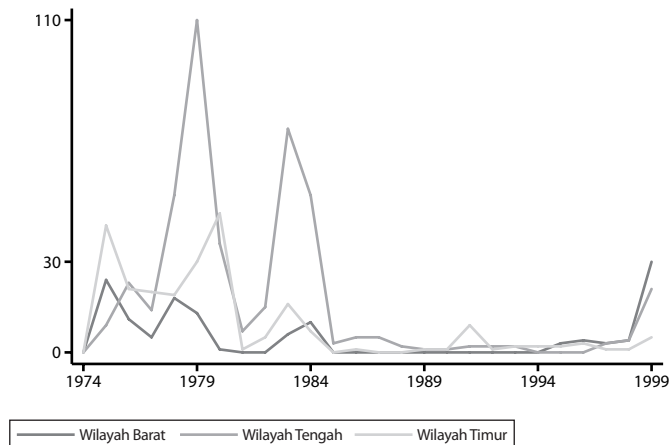
Penghitungan pelanggaran yang dilaporkan, berdasarkan jenis dan distrik



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

69. Bagan Jumlah Penghilangan Berdasarkan Wilayah Secara Lintas-Waktu, 1974 – 1999 memperlihatkan bahwa kasus penghilangan yang dilaporkan terutama terpusat di distrik-distrik Timur dan Tengah: Khususnya untuk penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi, 20,2% (169/835) terjadi di Baucau, 14,7% (123/835) di Viqueque, 13,9% (116/835) di Dili, dan 11,4% (95/835) di Lautém.

Jumlah penghilangan berdasarkan wilayah secara lintas-waktu, 1974-1999

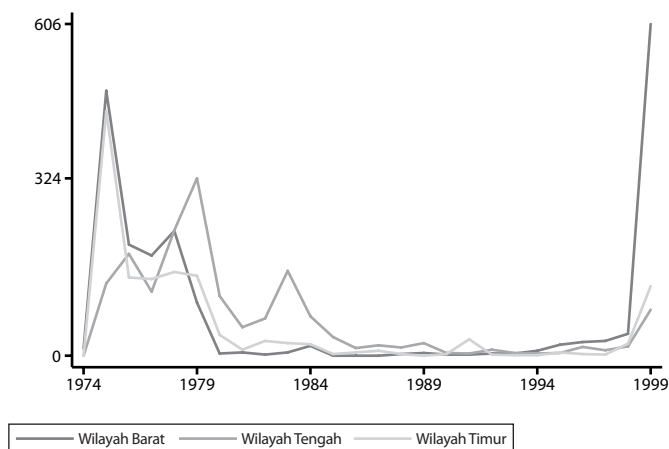


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pola lintas-waktu dan lintas-ruang pembunuhan dan penghilangan para non-petempur yang dilaporkan

70. Seperti yang diperlihatkan pada Bagan Jumlah Pembunuhan Penduduk Sipil Secara Lintas-Waktu, 1974 – 1999, pembunuhan yang dilaporkan mulai terjadi di Wilayah Barat dan Tengah pada waktu awal invasi pasukan Indonesia. Kemudian antara 1978 dan 1981, pembunuhan terhadap para non-petempur terjadi di Wilayah Timur dan Tengah, dan hanya ada sedikit pembunuhan terhadap para non-petempur yang dilaporkan yang terjadi di Wilayah Barat. Pada 1999, 72,3% dari pembunuhan terhadap para non-petempur yang dilaporkan terjadi di Wilayah Barat. Data pernyataan naratif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa antara 1975 dan 1984, pembunuhan besar-besaran para non-petempur mengikuti gerakan lintas waktu dan lintas ruang serbuan militer Indonesia.

Jumlah pembunuhan penduduk secara lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

71. Pola penghilangan lintas waktu dan lintas ruang yang dilaporkan terlihat jelas berbeda dengan pola pembunuhan non-petempur, seperti yang dapat dilihat pada Bagan Jumlah Penghilangan Berdasarkan Wilayah Secara Lintas-Waktu, 1974 – 1999. Meskipun beberapa kasus orang hilang dilaporkan sekitar waktu invasi Indonesia dan kemudian juga pada 1999, kasus penghilangan—lain halnya dengan kasus pembunuhan para non-petempur—tidak diasosiasikan dengan munculnya operasi militer besar-besaran. Lebih tepatnya lagi, dua periode penghilangan besar-besaran dilaporkan: periode pertama terjadi pada 1978 sampai 1980, setelah serangan utama militer terhadap gerakan Resistansi selesai, dan periode kedua dari 1983 sampai 1984 setelah adanya perpecahan dalam gencatan senjata antara pasukan Indonesia dan Falintil. Pada waktu periode pertama penghilangan besar-besaran, 60,2% (198/329) dari kasus orang hilang yang dilaporkan terpusat di Wilayah Timur, 25,9% (95/329) terjadi di Wilayah Tengah, dan 10,0% (33/329) di wilayah Barat dan Indonesia. Pada waktu periode kedua penghilangan besar-besaran yang terjadi antara 1983 dan 1984, 72,0% (126/175) terjadi di Wilayah Timur, 13,1% (23/175) di Wilayah Tengah, dan 13,1% (23/175) di Indonesia dan di Wilayah Barat. Data tentang kasus penghilangan ini sesuai dengan hipotesis bahwa kasus penghilangan terutama digunakan di distrik-distrik Timur sebagai alat operasi balasan terhadap orang-orang yang dicurigai menjadi anggota atau yang diasosiasikan dengan kelompok Gerakan Resistansi.

Pola pembunuhan dan penghilangan dari para non-petempur yang dilaporkan menurut pertanggungjawaban institusional yang terkait

72. Sejumlah lembaga yang berbeda-beda terlibat dalam tindakan pembunuhan dan penghilangan selama masa terjadinya konflik. Kelompok lembaga utama adalah militer Indonesia, Falintil, partai politik Timor-Leste (seperti Fretilin, UDT, dan Apodeti), anggota-anggota pasukan pertahanan Timor-Leste di bawah pemerintahan Indonesia (seperti Hansip, Wanra, dan Ratih), milisi-milisi dan pasukan pembantunya lainnya (di bawah pemerintahan Indonesia.) Bagian ini mengulas tingkat pertanggungjawaban terhadap pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan pada waktu proses pengambilan pernyataan Komisi.
73. Kebanyakan dari pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia dan pasukan pembantu mereka, seperti yang diperlihatkan tabel di bawah ini: 57,6% (2.947/5.120) dari pelaku yang terlibat pelanggaran fatal dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi, dan 32,3% (1.654/5.120) dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka (seperti milisi, pasukan pertahanan sipil, dan pejabat lokal yang bekerja di bawah administrasi Indonesia). Dalam 29,6% (1.514/5.120) dari pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan, pelaku yang bertanggung jawab dikaitkan dengan Gerakan Resistansi dan pasukan prokemerdekaan.

Tabel 2: Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan								
Jenis Pelanggaran	Militer Indonesia	Kolaborator Timor-Leste TNI	Kelompok Resistansi	Lain-lain	Penduduk Sipil	Kelompok Pro-Otonomi	Tak Diketahui	Total
Pembunuhan Penduduk Sipil	2947	1654	1514	1341	214	81	708	5109
Penghilangan	642	245	80	72	21	2	111	833
	3589	1899	1594	1413	235	83	819	5942

74. Tingkat pertanggungjawaban lembaga yang terkait terhadap pembunuhan dan penghilangan yang dicatat, berbeda-beda selama terjadinya konflik. Pada masa awal invasi Indonesia antara 1975 dan 1984, 62,3% (2.831/4.543) dari pembunuhan dan penghilangan yang dicatat dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi. Kemudian, selama periode ‘normalisasi dan konsolidasi’ pendudukan Indonesia, antara 1985 dan 1998, 64,6% (317/488) dari pembunuhan dan penghilangan yang dicatat dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi. Kemudian, pada 1999 menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori PBB, ada perubahan struktural yang tampak

jasas dalam pertanggungjawaban secara proporsional terhadap pelanggaran yang dicatat. Khususnya, 9,5% (85/898) dari pembunuhan dan penghilangan dikaitkan hanya dengan tindakan militer Indonesia dan polisi, 39,5% (355/898) dikaitkan dengan tindakan militer Indonesia dan polisi bersama-sama dengan milisi-milisi Timor-Timur, dan 42,9% (385/898) dikaitkan hanya dengan tindakan mandiri milisi Timor-Timur.

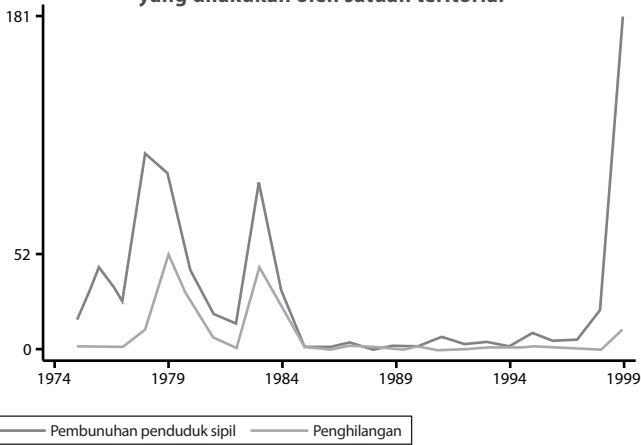
75. Sebaliknya, sementara pada 1975 ada 49,0% (561/1.145) pembunuhan dan penghilangan yang tercatat dikaitkan dengan Fretilin, pada 1976 hanya 16,6% (563/3.398) dari pembunuhan dan penghilangan dikaitkan dengan Fretilin.^{*} Selanjutnya, 3,7% (18/488) dari pembunuhan dan penghilangan antara 1985 dan 1998 dikaitkan dengan Fretilin dan kemudian pada 1999 hanya 0,6% (5/898) dari pembunuhan dan penghilangan dikaitkan dengan Fretilin. Data pernyataan naratif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa sebagian besar pembunuhan dan penghilangan yang dikaitkan dengan Fretilin dilaksanakan 1975 pada waktu konflik internal antarpantai politik.

76. Selama berbagai peristiwa yang terjadi pada masa konflik, para deponen dalam proses pengambilan pernyataan Komisi banyak menerakan pertanggungjawaban terhadap berbagai satuan khusus pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka pada waktu-waktu tertentu dalam masa konflik.

77. Seperti yang diperlihatkan oleh Bagan Pelanggaran Fatal Secara Lintas-Waktu, 1974 – 1999, yang Dilakukan oleh Satuan Teritorial dan Bagan Pelanggaran Fatal Secara Lintas-Waktu, 1974 – 1999, yang Dilakukan oleh Satuan Nonteritorial, pola pelanggaran yang dilaporkan dikaitkan dengan satuan teritorial (satuan yang berada di dalam struktur permanen militer lokal) dan satuan nonteritorial (satuan yang mendapat izin sementara untuk berperang dan melaksanakan tugas-tugas lainnya di Timor-Leste) dari militer Indonesia adalah hampir sama. Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan yang terkait baik dengan satuan teritorial maupun satuan nonteritorial sangat terpusat pada tahun-tahun 1975 – 1980, kemudian 1982 – 1984, dan akhirnya pada 1999. Data pernyataan naratif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa satuan teritorial dan satuan nonteritorial militer Indonesia melaksanakan pembunuhan dan penghilangan dalam skala besar pada awal tahun-tahun pendudukan, pada awal dimulainya tahap konsolidasi masa pendudukan dan kemudian juga sekitar waktu diadakan Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB pada 1999.

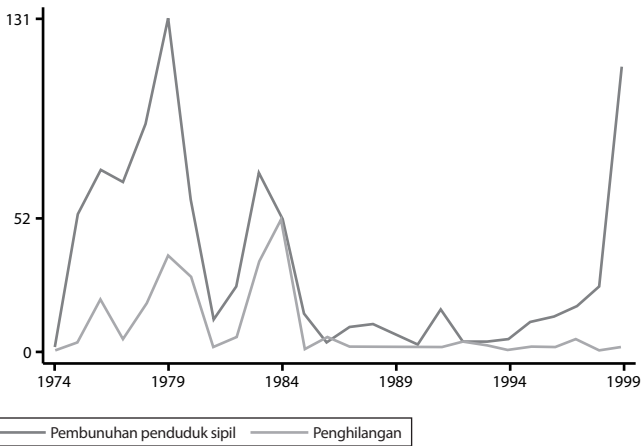
.....
^{*} Perhatikan bahwa 42,2% (237/561) dari pembunuhan dan penghilangan yang tercatat yang dikaitkan dengan Fretilin pada 1975 terjadi pada waktu konflik internal antarpantai pada Agustus dan September pada tahun tersebut dan bahwa 4,8% (27/561) dari pembunuhan dan penghilangan yang tercatat yang dikaitkan dengan Fretilin pada 1975 terjadi pada Desember, namun 43,3% (243/561) dari pembunuhan dan penghilangan pada 1975 yang dikaitkan dengan Fretilin tidak mempunyai informasi khusus mengenai bulan waktu pelanggaran itu terjadi.

**Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974-1999,
yang dilakukan oleh satuan teritorial**



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

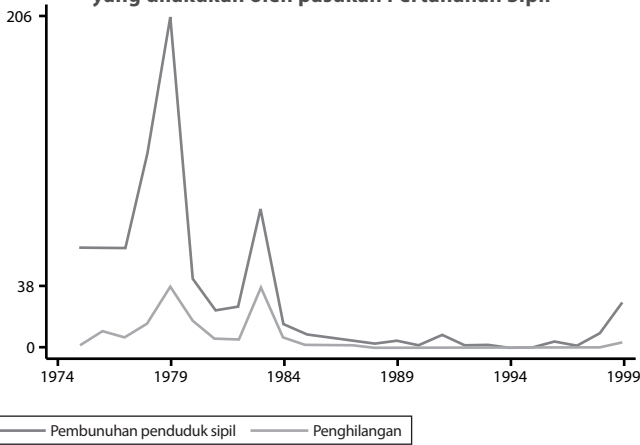
**Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974-1999,
yang dilakukan oleh satuan nonteritorial**



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

78. Kasus pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan yang dikaitkan dengan pasukan pertahanan sipil, terutama Hansip, terpusat pada waktu tahun-tahun awal masa pendudukan antara 1975 dan 1979 dan kemudian juga 1983.

**Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974-1999,
yang dilakukan oleh pasukan Pertahanan Sipil**



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

79. Sebaliknya, kasus pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan yang dikaitkan dengan Pasukan Khusus (Kopassandha/Kopassus) terpusat pada 1978 dan 1980, 1982 dan 1984, 1991, dan kemudian juga 1999. Oleh sebab itu data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa Kopassandha/Kopassus digunakan untuk operasi militer khusus pada tahun-tahun belakangan di periode awal invasi, dan kemudian digunakan untuk kampanye militer dalam tahun-tahun konsolidasi dan terakhir pada 1999.

80. Kadang-kadang pelanggaran fatal hanya dikaitkan dengan tindakan mandiri militer Indonesia dan polisi, di waktu lain dengan tindakan mandiri pasukan pembantu mereka, dan di lain waktu lagi dengan tindakan bersama militer Indonesia dan polisi dengan pasukan pembantu mereka. Pola pertanggungjawaban institusional bersama antara pasukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka dan pertanggungjawaban institusional mandiri berbeda-beda dalam lintas waktu, seperti yang bisa dilihat pada Tabel Persentase Pertanggungjawaban atas Pembunuhan yang Dilaporkan, Berdasarkan Periode, 1975 – 1999. Pada waktu tahun-tahun awal invasi dan kemudian berturut-turut pada tahun-tahun konsolidasi pendudukan, sekitar 45% dari pembunuhan yang dilaporkan hanya semata-mata dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi. Pada sekitar waktu diadakannya Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB, 8,5% (71/838) dari pembunuhan yang dilaporkan hanya semata-mata dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi. Semakin lama pendudukan Indonesia berlangsung, semakin tinggi proporsi pembunuhan yang dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi yang bertindak bersama-sama pasukan pembantu mereka. Oleh sebab itu, data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa selama masa awal tahun-tahun invasi dan tahun-tahun “normalisasi dan konsolidasi”, militer Indonesia

secara luas bertindak semata-mata sendiri dalam melaksanakan pembunuhan terhadap penduduk sipil, sedangkan, di 1999 militer Indonesia membantu dan bersekongkol dengan pasukan pembantu mereka (terutama milisi yang pro-otonomi) dalam melaksanakan pembunuhan masyarakat sipil.

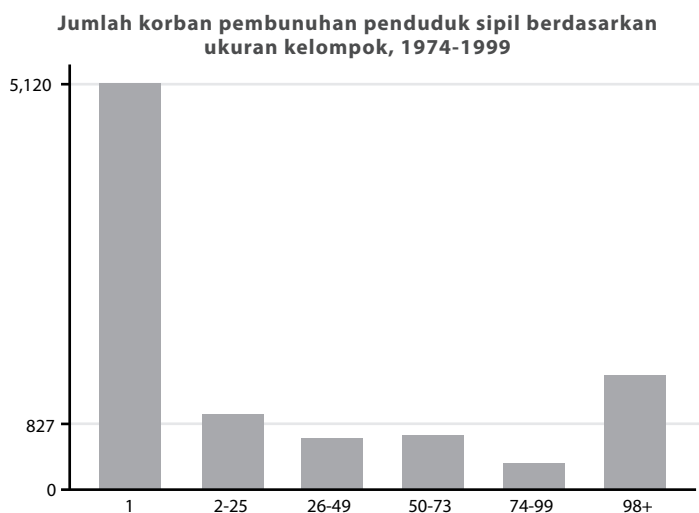
Tabel 3: Persentase pertanggungjawaban atas pembunuhan yang dilaporkan, berdasarkan periode, 1975 – 1999				
Lembaga	1975-1984	1985-1998	1999	Total (1975- 1999)
Militer dan Polisi Indonesia saja	46,3	43,3	8,5	39,9
Militer dan Polisi Indonesia beserta pasukan pembantu Timor-Leste	12,7	18,8	41,4	18
Pasukan Pembantu Timor-Leste saja	9,1	7,4	42,5	14,5
Lain-lain	31,8	30,5	7,6	27,7
Total (Hitungan Frekuensi Pembunuhan)	3838	420	838	5096

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang diberikan kepada CAVR

Pola kasus pembunuhan dan penghilangan non-petempur yang dilaporkan terhadap korban perorangan dan kelompok

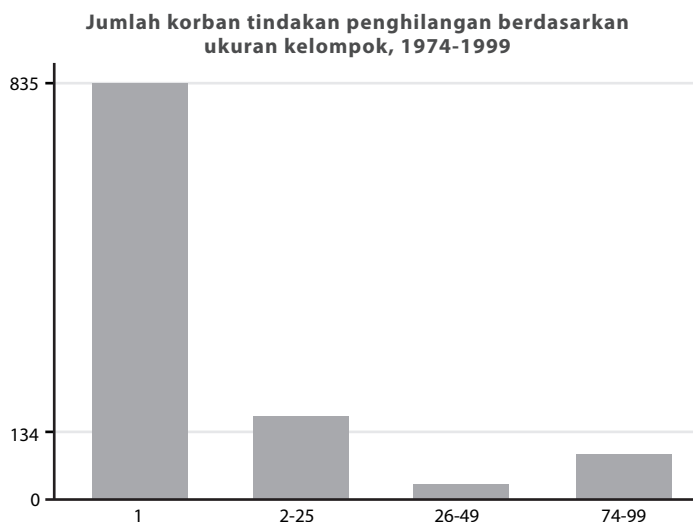
81. Beberapa kasus pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap perorangan, tapi ada juga yang dilakukan terhadap beberapa orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Bagan Jumlah Korban Pembunuhan Penduduk Sipil berdasarkan Ukuran Kelompok, 1974 – 1999 dan Bagan Jumlah Korban Tindakan Penghilangan berdasarkan Ukuran Kelompok, 1974 – 1999 memperlihatkan distribusi pelanggaran menurut ukuran kelompok korban kasus pembunuhan dan penghilangan.*

* Seperti dalam kasus pelanggaran yang dilaporkan terhadap korban perorangan, pelanggaran terhadap korban dalam kelompok bisa dilaporkan oleh lebih dari satu deponen. Data korban kelompok telah dibanding-bandingkan untuk mengecek pengidentifikasian laporan duplikat dari pelanggaran dan korban yang sama dalam pernyataan jamak. Metode yang digunakan untuk pengecekan dijelaskan pada Lampiran mengenai statistik.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Bagan ini menunjukkan hitungan korban individual dalam kelompok dengan ukuran tertentu



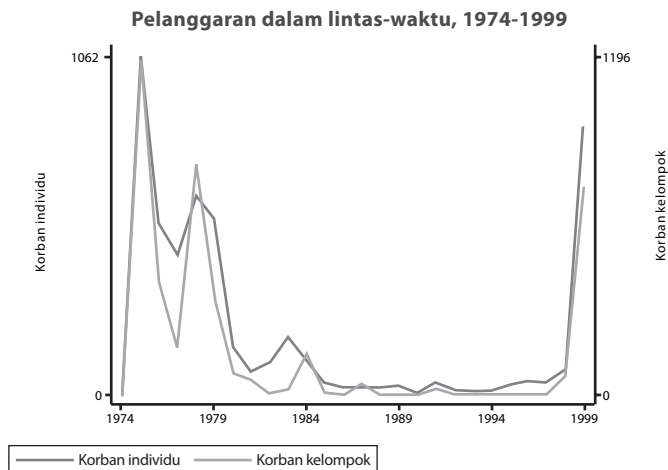
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Bagan ini menunjukkan hitungan korban individual dalam kelompok dengan ukuran tertentu

82. Baik pembunuhan maupun penghilangan memperlihatkan pola yang sama dalam hal proporsi pelanggaran yang dilakukan terhadap individu satu per satu atau individu berkelompok. Seperti yang terlihat pada Bagan Jumlah Korban

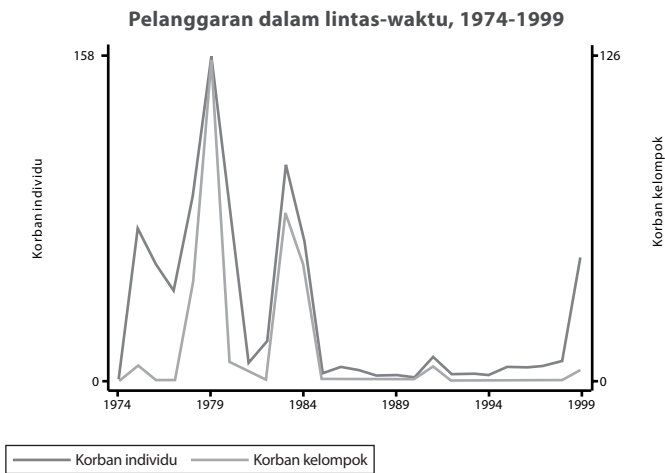
Pembunuhan Penduduk Sipil berdasarkan Ukuran Kelompok, 1974 – 1999 dan Bagan Jumlah Korban Tindakan Penghilangan berdasarkan Ukuran Kelompok, 1974 – 1999, 95,9% (5.120/5.339) dari pembunuhan yang dilaporkan dan 96,9% (835/862) dari penghilangan yang dilaporkan dilakukan terhadap individu satu-per-satu. Penemuan empiris ini muncul sesuai dengan hipotesis bahwa baik pembunuhan maupun penghilangan digunakan sebagai suatu bentuk penindasan yang lebih bersasaran.

83. Seperti yang diperlihatkan dua Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu di bawah ini, dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi, baik pembunuhan maupun penghilangan terhadap korban perorangan dan korban kelompok berkorelasi positif lintas waktu. Apabila jumlah pembunuhan yang dilaporkan terhadap individu naik, maka jumlah pembunuhan yang dilaporkan terhadap korban kelompok juga naik. Hal yang sama juga terjadi untuk kasus penghilangan yang dilaporkan.* Oleh sebab itu, jumlah pembunuhan besar-besaran terhadap korban kelompok yang dilaporkan terpusat pada awal tahun-tahun invasi antara 1975 dan 1979, dan juga sama halnya dengan jumlah pembunuhan besar-besaran terhadap perorangan yang dilaporkan. Penghilangan besar-besaran terhadap korban kelompok yang dilaporkan terpusat pada periode kampanye operasi balasan terhadap Gerakan Resistansi pada 1979 dan 1984, dan juga sama halnya dengan jumlah penghilangan besar-besaran terhadap perorangan yang dilaporkan.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

* Korelasi koefisien lintas waktu antara pembunuhan individual dan pembunuhan kelompok yang dilaporkan adalah 0,95, sementara korelasi koefisien lintas waktu antara penghilangan individual dan penghilangan kelompok yang dilaporkan adalah 0,84.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

84. Paling tidak ada dua kemungkinan penjelasan bagi korelasi positif antara (i) pembunuhan individual dan pembunuhan kelompok yang dilaporkan dan (ii) penghilangan individual dan penghilangan kelompok yang dilaporkan:

- Baik pembunuhan terhadap individu maupun kelompok digerakkan oleh praktik-praktik yang sama atau kebijaksanaan yang sama dari pihak yang bertanggung jawab atas tindakan kriminal ini; hal yang sama juga berlaku untuk kasus penghilangan, atau
- Beberapa deponen dalam proses pengambilan pernyataan Komisi mempunyai kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain untuk secara spesifik mengidentifikasi korban perorangan dari pembunuhan dan penghilangan yang terjadi pada waktu serangan militer besar-besaran pada akhir dasawarsa 1970 dan antara 1983 dan 1984. Akibatnya beberapa deponen mungkin menggambarkan pembunuhan dan penghilangan ini sebagai hal yang dialami oleh sekelompok korban anonim.

85. Lepas dari penjelasan mana yang benar, data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa penghilangan besar-besaran dan pembunuhan besar-besaran terpusat pada suatu waktu: pembunuhan besar-besaran terutama terpusat pada tahun-tahun awal invasi dan pendudukan (1975 – 1979), sementara penghilangan besar-besaran terpusat pada 1978 – 1979 pada masa akhir tahun-tahun invasi dan pada waktu operasi penumpasan balasan terhadap Gerakan Resistansi di distrik-distrik Timur dan, dalam cakupan yang lebih kecil, di mana-mana pada 1983 – 1984.

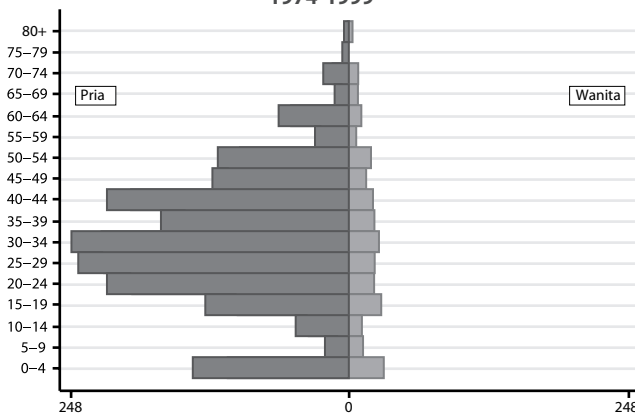
Pola dari pembunuhan dan penghilangan non-petempur yang dilaporkan menurut karakteristik demografis dan afiliasi politik korban

86. Penelitian Komisi mempertimbangkan apakah pembunuhan dan penghilangan dilaksanakan dengan suatu cara yang sistematis dan didasarkan pada korban dengan karakteristik demografis khusus (seperti usia dan jenis kelamin) atau afiliasi politik. Bagian ini akan membahas cakupan dan pola yang dilaporkan dari pembunuhan dan penghilangan menurut jenis kelamin dan usia korban dan apakah korban tersebut penduduk sipil, petempur Gerakan Resistansi yang bersenjata, atau aktivis politik.

87. Sebagian besar pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan pada waktu proses pengambilan pernyataan Komisi adalah korban laki-laki. 86,9% (4.451/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan adalah korban laki-laki dan 90,5% (756/836) dari penghilangan yang dilaporkan adalah juga laki-laki. Di samping itu, pemuda berusia antara 20 dan 34 merupakan kelompok usia korban pembunuhan dan penghilangan yang paling sering dilaporkan: 37,4% (663/2.090) dari korban pembunuhan yang usianya diketahui berasal dari kelompok usia ini.* 40,0% (138/345) dari korban penghilangan yang usianya dilaporkan berumur antara 20 dan 34.†

88. Seperti yang terlihat dalam dua Bagan Angka Tindak Pembunuhan Penduduk Sipil, Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin, 1974 – 1999 di bawah ini, lelaki muda berusia antara 20 dan 34 adalah korban pembunuhan dan penghilangan yang paling sering dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi.

Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



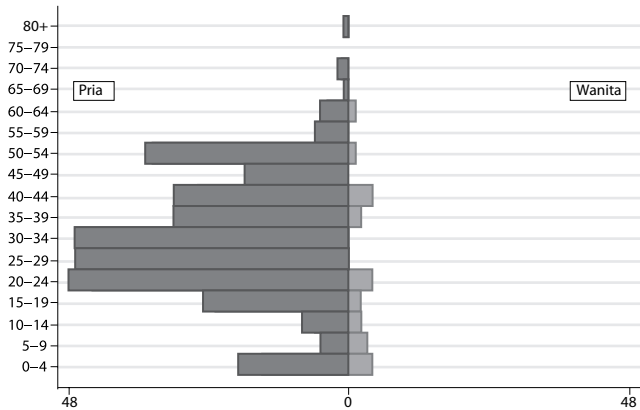
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: 59,6% data tidak merekam usia dan jenis kelamin

* Usia khusus untuk 59,6% (3.030/5.120) korban pembunuhan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah tidak diketahui atau tidak dilaporkan.

† Usia khusus dari 59,2% (490/835) korban penghilangan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah tidak diketahui atau tidak dilaporkan.

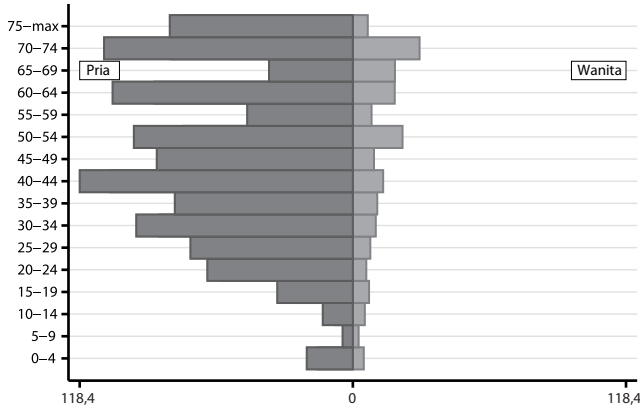
Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
Catatan: 59,2% data tidak merekam usia dan jenis kelamin

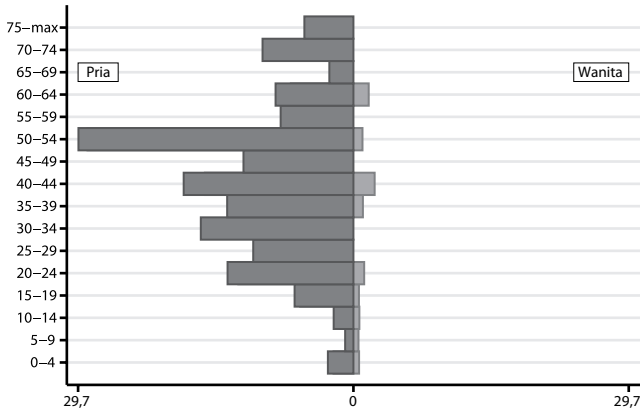
89. Kalau kita beralih dari hitungan sederhana pelanggaran pembunuhan dan penghilangan ke hitungan pelanggaran berbasis penduduk, ada beberapa perbedaan yang bisa diteliti. Relatif terhadap keseluruhan penduduk Timor-Leste, laki-laki paruhbaya dan laki-laki tua mengalami tingkat tertinggi (relatif pada persentasenya terhadap penduduk) pembunuhan yang dilaporkan, dan laki-laki dari kelompok usia 50-54 tahun mengalami tingkat tertinggi (relatif pada persentasenya terhadap penduduk) penghilangan yang dilaporkan. Pola ini diperlihatkan pada dua Bagan Tingkat Pelanggaran Pembunuhan Penduduk Sipil yang Spesifik Berdasarkan Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 – 1999 di bawah ini.

Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus penduduk 1990, statistik Indonesia
Catatan: 59,6% dari catatan pelanggaran tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

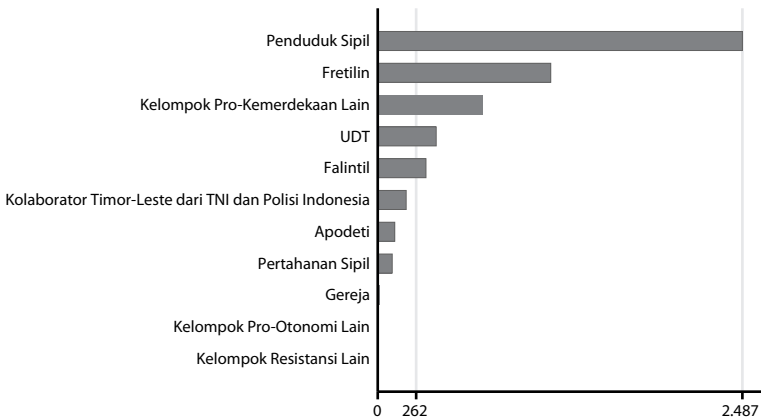
Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus penduduk 1990, statistik Indonesia
Catatan: 59,2% dari catatan pelanggaran tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

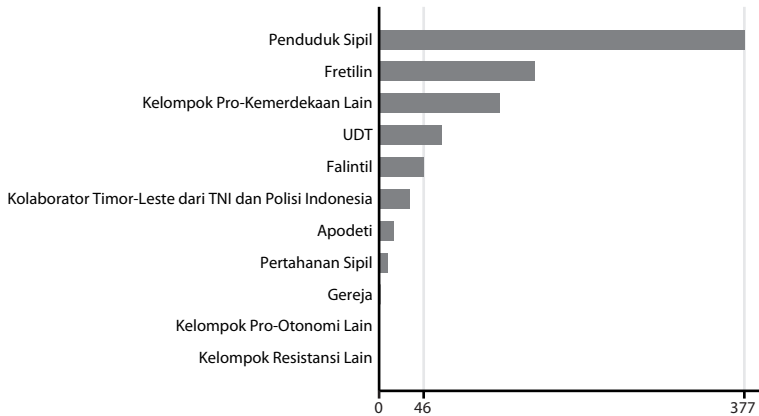
90. 48,7% (2.487/5.120) dari pembunuhan dan 45,3% (377/835) dari penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap penduduk sipil, termasuk baik mereka yang tidak mempunyai afiliasi politik, maupun mereka yang secara formal menjadi anggota kelompok prokemerdekaan atau partai politik, seperti yang bisa dilihat pada dua Bagan Tindak Pembunuhan Penduduk Sipil Yang Dilaporkan, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1974 – 1999 di bawah ini.

Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, berdasarkan afiliasi korban, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, berdasarkan afiliasi korban, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

91. 40,9% (2.092/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah terhadap korban-korban yang baik secara formal berafiliasi dengan Fretilin maupun dengan kelompok prokemerdekaan yang tidak secara langsung dapat dikaitkan sebagai petempur bersenjata. 6,4% (329/5.120) dari pembunuhan yang dilaporkan adalah terhadap korban-korban yang dilaporkan berafiliasi dengan Falintil.

92. 33,5% (280/835) dari penghilangan yang dilaporkan pada proses pengambilan pernyataan Komisi adalah terhadap korban-korban yang baik secara formal berafiliasi dengan Fretilin maupun dengan kelompok prokemerdekaan yang tidak secara langsung dapat dikaitkan sebagai petempur bersenjata. 7,6% (64/835) dari penghilangan yang dilaporkan adalah terhadap korban-korban yang dilaporkan berafiliasi dengan Falintil.

93. Data pernyataan Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa sebagian besar pembunuhan dan penghilangan dilakukan terhadap para anggota dan mereka yang dicurigai berasosiasi dengan Gerakan Resistansi (sekali pun orang-orang yang dicurigai berasosiasi dengan Gerakan Resistansi itu mungkin saja secara formal tidak ada hubungan dengan partai politik atau kelompok bersenjata).

Hubungan antara kematian terkait konflik dengan lamanya penahanan

94. Pola penahanan sewenang-wenang dan pembunuhan terhadap penduduk sipil yang dilaporkan kepada Komisi berkorelasi positif lintas waktu.* Tepatnya,

* Koefisien korelasi untuk kedua seri ini adalah 0,83.

baik pembunuhan terhadap non-petempur yang dilaporkan maupun penahanan sewenang-wenang banyak sekali terpusat pada waktu tahun-tahun awal invasi dan pendudukan Indonesia, seperti yang diperlihatkan dalam Bagan Jumlah Tindak Pembunuhan Penduduk Sipil Yang Dilaporkan, 1974 – 1999 dan Bagan Jumlah Tindak Penahanan Yang Dilaporkan, 1974 – 1999.

Jumlah tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah tindak penahanan yang dilaporkan, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

95. Selanjutnya, dari penduduk sipil yang dilaporkan mati karena sebab-sebab yang berkaitan dengan konflik (yaitu, baik kasus kematian penduduk sipil karena pembunuhan, kelaparan dan penyakit atau kasus penghilangan), 98,6% (10.659/10.809) dilaporkan paling tidak pernah sekali ditahan sewenang-wenang pada periode mandat Komisi. Seperti yang diperlihatkan dalam Tabel Pelanggaran Yang Dilaporkan dan Penahanan, Berdasarkan Distrik, 1974 – 1999, 3,5% (378/10.809) dari korban-korban ini mati pada waktu mereka masih berada dalam tahanan. Untuk 12,2% (1.314/10.809) dari orang mati berkaitan dengan konflik dan yang juga ditahan sewenang-wenang pada waktu periode mandat Komisi, tanggal penahanan mereka tidak diketahui. Oleh sebab itu, Komisi tidak dapat membedakan apakah kematian yang berkaitan dengan konflik ini terjadi pada saat si korban masih ditahan atau tidak pada saat itu. Meskipun begitu, dari korban-korban yang dilaporkan ditahan sewenang-wenang pada masa konflik, 15,7% (1.692/10.809) dari mereka mati karena peristiwa konflik tersebut.

Tabel 4: Pelanggaran yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 – 1999									
	Korban yang ditahan saat pelanggaran terjadi	% yang ditahan saat pelanggaran terjadi	Korban yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui	% yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui	Korban yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi	% yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi	Korban yang tak pernah ditahan	% yang tak pernah ditahan	Total
Lautém	455	19,7	1.307	56,6	479	20,8	67	2,9	2.308
Viqueque	401	13,0	1.371	44,4	1.245	40,4	68	2,2	3.085
Baucau	785	31,8	891	36,1	639	25,9	155	6,3	2.470
Manatuto	271	16,0	921	54,5	465	27,5	34	2,0	1.691
Manufahi	771	23,8	1.305	40,3	924	28,5	237	7,3	3.237
Aileu	477	26,6	867	48,3	412	23,0	38	2,1	1.794
Ermera	986	24,8	1.128	28,4	1.641	41,3	216	5,4	3.971
Liquiçá	695	42,8	448	27,6	405	25,0	75	4,6	1.623
Dili	1504	40,3	1.267	34,0	646	17,3	314	8,4	3.731
Ainaro	457	21,6	1.005	47,5	582	27,5	72	3,4	2.116

Covalima	886	41,5	401	18,8	729	34,1	119	5,6	2.135
Oecussi	366	12,6	249	8,6	2.201	76,0	81	2,8	2.897
Bobonaro	992	32,7	793	26,1	1.133	37,3	116	3,8	3.034
Indonesia	48	9,0	76	14,3	390	73,2	19	3,6	533
	9.094	100,0	12.029	100,0	11.891	100,0	1.611	100,0	34.625

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang diberikan kepada CAVR

96. Dari pelanggaran fatal yang dilaporkan kepada Komisi yang terjadi sementara korban masih berada di tahanan, 96,6% (365/378) dari mereka adalah pembunuhan dan penghilangan penduduk sipil dan 3,4% (13/378) adalah kematian karena lapar dan penyakit. Sebaliknya, pembagian menurut sebab kematian untuk orang yang mati berkaitan dengan konflik yang terjadi di luar tahanan kelihatan sangat berbeda: 49,0% (4.390/8.967) dari korban yang dicatat Komisi mati karena pembunuhan atau penghilangan, sedangkan sisanya yang 51,0% (4.577/8.967) mati karena kelaparan dan penyakit. Oleh sebab itu, data kuantitatif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa orang-orang relatif berisiko lebih tinggi untuk dibunuh atau dihilangkan saat berada di penjara dibandingkan bila mereka tidak dalam tahanan.

Tabel 5: Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 – 1999

	Korban yang ditahan saat pelanggaran terjadi	% yang ditahan saat pelanggaran terjadi	Korban yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui	% yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui	Korban yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi	% yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi	Korban yang tak pernah ditahan	% yang tak pernah ditahan	Total
Pembunuhan penduduk sipil	295	5,8	807	15,8	3.887	76,1	118	2,3	5.107
Kematian akibat deprivasi	13	0,3	273	5,6	4.577	94,0	6	0,1	4.869
Penghilangan	70	8,4	234	28,1	503	60,4	26	3,1	833
	378	100,0	1314	100,0	8.967	100,0	150	100,0	10.809

Sumber: Basis Data Laporan Amnesty International tentang Timor-Leste

97. Pola kematian yang berkaitan dengan konflik dan hubungannya dengan periode penahanan bervariasi pada tahap-tahap masa konflik. Seperti yang terlihat dalam Tabel Pelanggaran Fatal Yang Dilaporkan dan Penahanan, Berdasarkan Tahapan, 1974 – 1999, kematian di dalam tahanan yang dilaporkan sangat banyak terpusat pada tahap-tahap pertama dan akhir masa konflik. Kematian berkaitan dengan konflik yang terjadi di luar tahanan (untuk korban-korban yang pernah ditawan sewenang-wenang pada periode mandat Komisi) sangat banyak terjadi pada tahap pertama konflik: 85,3% (7.651/8.967) dari kematian berkaitan dengan konflik ini terjadi pada tahap pertama konflik, sedangkan 8,5% (762/8.967) terjadi pada 1999.

Tabel 6: Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan tahapan, 1974 – 1999

	Korban yang ditahan saat pelanggaran terjadi	% yang ditahan saat pelanggaran terjadi	Korban yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui	% yang ditahan tapi dengan tanggal yang tak diketahui	Korban yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi	% yang ditahan bukan saat pelanggaran terjadi	Korban yang tak pernah ditahan	% yang tak pernah ditahan	Total
Tahap 1 (1974-1983)	216	2,4	1.172	12,8	7.651	83,8	88	1,0	9.127
Tahap 2 (1984-1998)	48	6,5	114	15,3	554	74,6	27	3,6	743
Tahap 3 (1999)	114	12,1	28	3,0	762	81,2	35	3,7	939
	378	100,0	1.314	100,0	8.967	100,0	150	100,0	10.809

Sumber: Basis Data Laporan Amnesty International tentang Timor-Leste

Pelanggaran-pelanggaran nonfatal

Pengantar

98. Dalam bagian ini kami akan menyajikan analisis pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi. Analisis ini tidak mengandung perkiraan mengenai keseluruhan cakupan, pola, dan kecenderungan pelanggaran nonfatal, karena analisis ini didasarkan pada sampel kemudahan (sampel nonacak) dari pernyataan naratif yang dikumpulkan oleh Komisi. Namun demikian, analisis ini menyajikan pola-pola statistik pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada

Komisi dan memberikan hipotesis yang mendapat dukungan dari data tersebut. Di samping itu, kami membandingkan pola statistik dan kecenderungan yang diteliti dalam data Komisi mengenai pelanggaran nonfatal dengan data yang dikumpulkan bersamaan waktunya oleh Amnesty International dan juga dengan data yang dikumpulkan oleh NGO Timor-Leste, yaitu Fokupers, segera setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

Tinjauan dari temuan statistik mengenai pelanggaran nonfatal

99. Bagian ini meringkas temuan-temuan utama analisis statistik deskriptif Komisi mengenai hampir 8.000 pernyataan naratif yang dikumpulkan dari ke-13 distrik di Timor-Leste.

- Pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi sangat banyak terpusat pada periode awal invasi dan pendudukan oleh pasukan militer Indonesia, dan sekitar waktu Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB: 56,3% (33.224/60.047) dari pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dicatat terjadi antara 1975 dan 1984, sedangkan 21,0% (12.634/60.047) terjadi pada 1999.
- Di hampir semua distrik, kecuali Oecussi, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan merupakan pelanggaran yang paling sering dilaporkan, berkisar antara 69,4% sampai 82,7% dari pelanggaran yang dilaporkan di distrik. Di Oecussi, pelanggaran terhadap integritas fisik (seperti penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan) berjumlah 43,0% dari seluruh pelanggaran di distrik tersebut. Dibandingkan dengan distrik-distrik lain, di Oecussi, pelanggaran harta milik dan ekonomi dilaporkan dalam proporsi yang lebih tinggi, yakni 30,8% (1.271/4.133) dari keseluruhan pelanggaran di distrik tersebut.
- Pola pelanggaran nonfatal pada saat tahap pertama dan tahap terakhir konflik berbeda dari wilayah ke wilayah. Sementara kekerasan pada masa awal invasi Indonesia 1975 paling gencar terjadi di Wilayah Barat dan Tengah, setelah 1976 fokus pelanggaran nonfatal beralih ke Wilayah Timur.
- Pembagian menurut umur-jenis kelamin yang didokumentasi untuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan ini sungguh serupa, dan masing-masing menunjukkan bahwa kelompok korban yang paling banyak tercatat untuk jenis-jenis pelanggaran ini adalah laki-laki muda dalam usia dinas militer (usia antara 20 dan 49). Sangat sedikit tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang tercatat dialami oleh korban perempuan. Sebaliknya, banyak sekali korban perempuan yang mengalami pelanggaran seksual: 90,1% (769/853) dari pelanggaran seksual yang tercatat Komisi dialami oleh korban perempuan.
- Data Komisi tentang pelanggaran nonfatal secara umum menunjukkan peningkatan dalam perbandingan orang dewasa terhadap anak-anak selama masa tersebut, yaitu, semakin mendekati pengujung masa konflik, semakin naik jumlah korban dewasa jika dibandingkan dengan korban anak-anak.

- Laporan yang bersamaan waktunya dari Amnesty International memperlihatkan tiga gelombang yang berbeda dalam hal penahanan perorangan yang identitasnya diketahui, yaitu pada 1985, 1989 – 1993, dan 1994 – 1999, masing-masing 402, 891, dan 811 orang. Sementara itu, laporan retrospektif yang diberikan kepada pernyataan naratif Komisi menyebutkan jumlah terbanyak penahanan sewenang-wenang terjadi pada 1999 dan sekitar 1975 – 1984.
- Analisis komparatif Komisi antara data statistiknya sendiri dengan laporan yang bersamaan waktunya dari Amnesty International memperlihatkan bahwa meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia, seperti Amnesty International, secara seksama mencatat situasi hak asasi manusia di Timor-Leste sepanjang dasawarsa 1980 dan 1990-an, pelaporan yang dilakukan jauh lebih rendah daripada skala keseluruhan kekerasan nonfatal pada waktu itu, khususnya pada waktu tahun-tahun awal masa invasi dan pendudukan.
- Bukti statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa kegiatan penahanan militer Indonesia berubah dari fokus pada korban baik perorangan maupun kelompok pada tahun-tahun awal 1977 – 1984 ke strategi lebih bersasaran yang berfokus pada tahanan perorangan saja mulai 1985 sampai 1999. Bukti statistik Komisi juga memperlihatkan korelasi positif antara tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap korban kelompok maupun korban perorangan sepanjang waktu.
- Pola penahanan dan penyiksaan yang dilaporkan sepanjang waktu sangat berkorelasi positif. Sepanjang waktu, kekerasan menjadi semakin terkoordinasi dan ukuran tindak penyiksaan yang dilaporkan sepanjang waktu juga semakin meningkat (antara akhir dasawarsa 1970 dan pertengahan dasawarsa 1980) dibandingkan dengan jumlah tindak penahan yang dilaporkan. Bukti statistik Komisi juga memperlihatkan bahwa sepanjang waktu (dan khususnya setelah 1984) praktik penahanan sewenang-wenang menjadi lebih bersasaran dan semakin umum digunakan bersamaan dengan tindak penyiksaan.
- Penyalahgunaan yang paling sering terjadi dalam masa-masa penahanan yang diketahui adalah penyiksaan (38,4%, 4.267/9.094), penganiayaan (33,2%, 27.998/9.094), dan pengancaman (21,3%, 634/9.094). Selanjutnya, penyiksaan dan penganiayaan lebih jarang dilaporkan di antara para korban yang tidak pernah mengalami penahanan: dari keseluruhan penyiksaan yang didokumentasi oleh Komisi, 16,4% (1.820/11.123) diderita oleh para korban yang tidak pernah mengalami penahanan. Bukti statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa korban yang ditahan lebih tinggi kerentanannya untuk mengalami penyiksaan dan penganiayaan daripada para korban yang tidak pernah mengalami penahanan pada periode acuan Komisi.
- Distrik-distrik yang melaporkan proporsi penyiksaan dan penganiayaan yang relatif lebih tinggi juga cenderung melaporkan lebih banyak pelanggaran selama penahanan.

- Anak-anak dan orang-orang yang lebih tua ditahan jauh lebih jarang, dan jika ditahan, mereka mengalami tingkat penganiayaan yang jauh lebih rendah.
- Data yang dikumpulkan secara sendiri-sendiri oleh Komisi dan Amnesty International memastikan bahwa sejumlah besar orang pernah ditahan di Pulau Ataúro pada periode antara 1980 dan 1984, di samping adanya penahanan besar-besaran yang berlangsung terus di bagian lain di Timor-Leste.
- 88,7% (68.943/77.748) dari pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi adalah pelanggaran terhadap penduduk sipil. Akan tetapi, ketika gerakan prokemerdekaan makin terorganisasi dan terbuka menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB pada 1999, jumlah penduduk sipil dengan afiliasi prokemerdekaan yang menderita pelanggaran nonfatal meningkat.
- Sebagian besar pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi: 62,2% (37.343/60.047) dari pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang tercatat dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi, 38,7% (23.253/60.047) dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka dari pasukan pendudukan Indonesia, dan 11,9% (7.157/60.047) dikaitkan dengan Gerakan Resistansi.*
- Analisis kuantitatif Komisi mengenai penahanan sewenang-wenang sesuai dengan hipotesis bahwa koordinasi dan kerjasama antara pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka terutama menjadi kuat setelah militer Indonesia menguasai sebagian besar Timor-Leste dan memulai pengonsolidasian wilayah pendudukan mereka, dan kemudian juga pada 1999 pada saat menjelang dan setelah masa Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.
- Data statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa pada 1999 militer Indonesia dan polisi membantu dan bersekongkol dengan pasukan pembantu mereka (khususnya milisi-milisi yang pro-otonomi) dalam penggunaan penahanan sewenang-wenang secara luas pada masa menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

Keterangan mendalam analisis statistik pelanggaran nonfatal

Distribusi keseluruhan pelanggaran nonfatal yang dilaporkan

100. Besarnya skala keseluruhan dari proses pengambilan pernyataan yang dijalankan oleh Komisi belum pernah dialami sebelumnya, bila dibandingkan

.....
* Perhatikan bahwa untuk beberapa pelanggaran yang dilaporkan, pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan itu dapat dikaitkan pada lebih daripada satu lembaga. Oleh karena itu, angka persentase untuk pelaku yang bertanggung jawab tidak mencapai 100%.

dengan semua proyek-proyek dokumentasi HAM terdahulu yang pernah dilakukan di Timor-Leste.

101. Seperti tampak pada Bagan Pelanggaran Nonfatal Berdasarkan Sumber Data, 1974 – 1999 jenis-jenis pelanggaran nonfatal yang didokumentasi oleh Komisi, Amnesty International, dan Fokupers cukup berbeda. Ini mencerminkan perbedaan sifat dari ketiga proyek tersebut dan perbedaan jaringan sosial yang dapat diakses dengan strategi pengumpulan data ketiga institusi tersebut. Dari semua pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi, 42,3% (25.347/59.972) adalah penahanan, 18,5% (11.123/59.972) adalah penyiksaan, dan 14,1% (8.436/59.972) adalah penganiayaan. Sebaliknya, proporsi penahanan (23,4% [184/788]) dan penyiksaan (7,5% [59/788]) yang jauh lebih rendah dilaporkan kepada Fokupers dibanding dengan yang dilaporkan kepada CAVR, meskipun proporsi pemindahan dan penganiayaan kurang lebih sama antara yang dilaporkan kepada Fokupers dengan yang dilaporkan kepada CAVR.

102. Fokupers adalah lembaga hak asasi perempuan yang juga menyediakan layanan pendampingan dan rehabilitasi kepada perempuan. Fokupers mencatat proporsi pemerkosaan yang lebih besar dibanding CAVR dan Amnesty International: 7,7% (86/1.115) dari semua pelanggaran nonfatal yang mereka dokumentasikan adalah pemerkosaan. Sebaliknya, dari pelanggaran yang tercatat dalam laporan-laporan Amnesty International yang tersedia, 59,7% (3.272/5.479) adalah penahanan, 18% (986/5.479) adalah pengadilan yang tidak adil, dan 11,5% (631/5479) adalah tindak penyiksaan .

Tabel 7: Pelanggaran nonfatal berdasarkan sumber data, 1974 – 1999							
Jenis Pelanggaran	Basis Data Pernyataan CAVR	Basis Data Fokupers	Basis Data Amnesty	% CAVR	% Fokupers	% Amnesty	Total
Percobaan Pembunuhan Penduduk Sipil	1.966	49	215	3,3	6,2	3,5	2.230
Penahanan	25.383	184	3.672	42,3	23,3	60,1	29.239
Penyiksaan	11.135	59	666	18,5	7,5	10,9	11.860
Pemerkosaan	393	84	12	0,7	10,6	0,2	489
Perbudakan Seksual	98	25	1	0,2	3,2	0,0	124
Kekerasan Seksual	221	31	43	0,4	3,9	0,7	295
Penganiayaan	8.443	98	0	14,1	12,4	0,0	8.541

Pernikahan Paksa	131	4	0	0,2	0,5	0,0	135
Penghambatan Hak Reproduksi	10	1	0	0,0	0,1	0,0	11
Pengadilan Tak Adil	213	0	1.155	0,4	0,0	18,9	1.368
Penghancuran Rumah	2.231	51	25	3,7	6,5	0,4	2.307
Pemusnahan Ternak	409	6	0	0,7	0,8	0,0	415
Pemerasan	2.095	44	19	3,5	5,6	0,3	2.158
Ancaman	2.987	136	64	5,0	17,2	1,1	3.187
Perekrutan Paksa	2.157	10	7	3,6	1,3	0,1	2.174
Kerja Paksa	2.175	9	0	3,6	1,1	0,0	2.184
Lain-lain	0	0	227	0,0	0,0	3,7	227
Total	60.047	791	6.106	100,0	100,0	100,0	66.944

Sumber: Basis Data CAVR dan Pernyataan serta Laporan Fokupers dan Amnesty International

103. Distribusi relatif korban per pelanggaran untuk jenis-jenis pelanggaran yang berbeda, kurang lebih serupa antara proyek-proyek CAVR, Fokupers, dan Amnesty International, seperti ditunjukkan dalam tabel-tabel di bawah ini. CAVR cenderung mendokumentasikan agak lebih banyak pelanggaran per korban dibanding proyek-proyek Fokupers dan Amnesty Internasional. Rata-rata, 2,36 pelanggaran per korban dilaporkan kepada CAVR, dibandingkan dengan 2,01 dan 1,53 yang dilaporkan ke Fokupers dan Amnesty. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan karakter dari proyek-proyek yang berbeda tersebut. CAVR mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran untuk seluruh periode mandat, termasuk tahun-tahun awal invasi, sementara kerja Amnesty terkonsentrasi sebagian besar pada tahun-tahun konsolidasi pendudukan dan dikumpulkan selama konflik ketika komunikasi antara Timor dan dunia luar sangat terbatas. Proyek Fokupers terfokus hampir secara khusus pada tahap ketiga dari konflik, yakni seputar masa Jajak Pendapat yang diawasi PBB. Fokupers secara khusus mengandalkan para deponen perempuan dan terfokus pada dokumentasi pelanggaran seksual.

Tabel 8: Distribusi relatif korban per pelanggaran, data CAVR					
Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Persentase Pelanggaran	Jumlah Korban	Persentase korban	Pelanggaran per korban
Penahanan	25.347	42,3	17.169	67,4	1,48
Penyiksaan	11.123	18,5	8.508	33,4	1,31
Penganiayaan	8.436	14,1	6.872	27,0	1,23
Pelanggaran Properti/ ekonomi	4.735	7,9	3.851	15,1	1,23
Lain-lain	4.339	7,2	4.030	15,8	1,08
Ancaman	2.982	5,0	2.653	10,4	1,12
Perekrutan Paksa	2.157	3,6	1.988	7,8	1,09
Pelanggaran Berbasis Seksual	853	1,4	657	2,6	1,30
	59.972		25.460		2,36

Catatan: proporsi korban berjumlah lebih daripada 100% karena satu korban mungkin mengalami lebih daripada satu jenis pelanggaran
 Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang diberikan kepada CAVR

Tabel 9: Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Fokupers					
Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Persentase Pelanggaran	Jumlah Korban	Persentase korban	Pelanggaran per korban
Penahanan	184	23,4	168	42,7	1,10
Pelanggaran Berbasis Seksual	145	18,4	104	26,5	1,39
Ancaman	136	17,3	119	30,3	1,14
Pelanggaran properti/ ekonomi	99	12,6	86	21,9	1,15
Penganiayaan	98	12,4	92	23,4	1,07
Penyiksaan	59	7,5	59	15,0	1,00
Lain-lain	57	7,2	54	13,7	1,06
Perekrutan Paksa	10	1,3	10	2,5	1,00
0	788		393		2,01

Catatan: proporsi korban berjumlah lebih daripada 100% karena satu korban mungkin mengalami lebih daripada satu jenis pelanggaran
 Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang diberikan kepada Fokupers

Tabel 10: Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Amnesty International					
Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Persentase Pelanggaran	Jumlah Korban	Persentase korban	Pelanggaran per korban
Penahanan	3.272	59,7	3.073	86,0	1,06
Lain-lain	1.412	25,8	1.383	38,7	1,02
Penyiksaan	631	11,5	600	16,8	1,05
Ancaman	61	1,1	59	1,7	1,03
Pelanggaran Berbasis Seksual	55	1,0	43	1,2	1,28
Pelanggaran properti/ ekonomi	44	0,8	43	1,2	1,02
Perekrutan Paksa	4	0,1	4	0,1	1,00
0	5.479		3.572		1,53

Catatan: proporsi korban berjumlah lebih daripada 100% karena satu korban mungkin mengalami lebih daripada satu jenis pelanggaran

Sumber: Basis Data Laporan Amnesty International tentang Timor-Leste

Tiga tahap kekerasan skala besar di Timor-Leste

104. Komisi mendefinisikan tiga tahap konflik antara April 1974 – September 1999. Tahap pertama mencakup invasi dan pendudukan awal Indonesia atas Timor-Leste, dari 1975 sampai 1984. Tahap kedua adalah konsolidasi dan normalisasi pendudukan, dari 1985 sampai 1998. Tahap ketiga adalah tiga triwulan pertama 1999, yaitu masa seputar proses Jajak Pendapat yang disponsori PBB.

105. Seperti yang tampak pada Bagan Jumlah Pelanggaran Nonfatal yang Dilaporkan, 1974 – 1999, terdapat tingkat pelanggaran nonfatal yang tinggi selama masa invasi dan pendudukan awal. Selama tahap kedua, secara umum terjadi pelanggaran nonfatal dalam tingkat yang relatif lebih rendah dan terjadi konsentrasi penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan seputar masa pembantaian Santa Cruz 1991. Tahap kedua, yaitu normalisasi, mencakup gelombang penahanan dan penyiksaan fisik yang baru atas anggota dan kolaborator gerakan Resistansi. Tahap terakhir dari konflik, yang mencakup masa menjelang Jajak Pendapat dan juga masa setelah Jajak Pendapat dan dikerahkannya pasukan multinasional Interfet (International Force in East Timor), menghasilkan dua gelombang pembunuhan, pemindahan, dan penjarahan yang berbeda. Tahap terakhir ini ditandai dengan pelanggaran

skala besar yang terkonsentrasi pada tenggat waktu yang singkat yang dilakukan oleh “milisi pro-otonomi” yang didukung, dilatih, dipersenjatai, dan diarahkan oleh militer Indonesia.

Jumlah pelanggaran nonfatal yang dilaporkan, 1974-1999

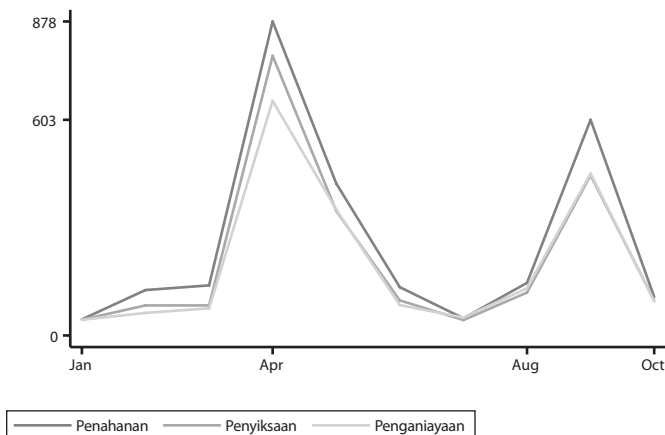


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

106. Pola pelanggaran nonfatal ini menyerupai pola pelanggaran fatal seperti dibahas di atas. Yaitu, pelanggaran secara besar-besaran selama tahun-tahun awal invasi dan pendudukan, kemudian diikuti dengan tingkat kekerasan yang relatif rendah selama tahun-tahun konsolidasi dan normalisasi, dan diakhiri dengan peningkatan kekerasan pada 1999.

107. Selama 1999, pelanggaran yang dilaporkan sangat terkonsentrasi pada April dan September. Seperti tampak pada Bagan Jumlah Penahanan, Penyiksaan, dan Penganiayaan yang Dilaporkan, 1999, pola penahanan, penganiayaan, dan penyiksaan yang dilaporkan berkorelasi positif dalam lintas waktu, yaitu ketika salah satu pelanggaran meningkat, yang lain juga cenderung meningkat dan sebaliknya. Ketiga jenis pelanggaran tersebut dilaporkan memuncak pada April dengan puncak yang lebih kecil pada September, meskipun keduanya serupa dalam hal skala. Pada 1999, kekerasan yang dilaporkan terkonsentrasi pada dua lonjakan utama, sebelum dan sesudah proses Jajak Pendapat yang disponsori PBB. Pola ini konsisten dengan hipotesis yang mengatakan bahwa intimidasi fisik digunakan secara terkoordinasi untuk menakut-nakuti penduduk Timor-Leste menjelang kedatangan misi UNAMET PBB yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan referendum, dan kemudian sebagai pembalasan segera setelah dilakukannya pemungutan suara.

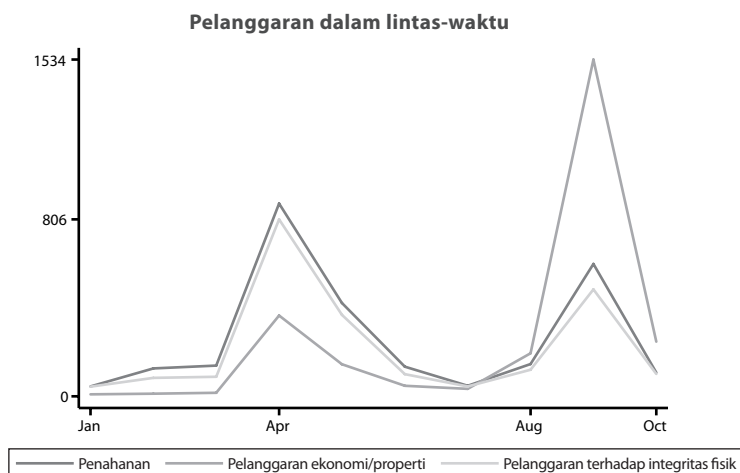
Jumlah penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan, 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: 4,4% penahanan yang dilaporkan; 3,4% penyiksaan yang dilaporkan; dan 4,3% penganiayaan yang dilaporkan terjadi pada 1999 tidak mencatat bulan kejadian

108. Praktik milisi dukungan Indonesia dan militer Indonesia mengalami pergeseran signifikan setelah Jajak Pendapat dibanding sebelumnya (lihat juga Bab 7.9: Hak ekonomi dan sosial). Seperti ditunjukkan pada Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, jenis penindasan yang paling sering digunakan sebelum pemungutan suara adalah pelanggaran integritas fisik (seperti penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan). Segera setelah referendum, penjarahan dan bentuk-bentuk pelanggaran harta benda dan ekonomi paling sering digunakan. Setelah Jajak Pendapat, pelanggaran integritas fisik terjadi pada tingkat yang sedikit lebih rendah dibanding pada periode sebelumnya, tetapi masih jauh di bawah pelanggaran harta benda. Pola ini tampaknya konsisten dengan hipotesis yang mengatakan bahwa militer Indonesia dan milisi beralih dari menggunakan pelanggaran-pelanggaran integritas fisik untuk menekan penduduk memilih otonomi sebelum Jajak Pendapat, menjadi aksi-aksi balas dendam sesudah Jajak Pendapat yang mencakup penjarahan besar-besaran dan penghancuran harta benda bersama dengan aksi-aksi balas dendam berupa kekerasan fisik. Yang terakhir ini mungkin dapat dikaitkan dengan upaya menekan penduduk agar mau pindah ke Timor Barat, Indonesia.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

109. Data empiris Komisi tentang pola-pola pelanggaran nonfatal lintas waktu pada 1999 sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa kekerasan pada 1999 tersebut terkoordinasi.

Tingkatan pertanggungjawaban institusional yang dilaporkan untuk pelanggaran nonfatal

Distribusi keseluruhan dari pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran nonfatal yang dilaporkan

110. Sejumlah lembaga terlibat dalam tindak kekerasan selama masa konflik. Kelompok institusional yang utama adalah militer Indonesia, Falintil, partai-partai politik Timor-Leste (seperti Fretilin, UDT, dan Apodeti), anggota sipil pasukan pertahanan Timor-Timur di bawah kendali pemerintah Indonesia (seperti Hansip, Wanra, dan Ratih), serta milisi-milisi dan pasukan pembantu mereka lainnya. Bagian ini akan membahas tingkat pertanggungjawaban dari kelompok-kelompok institusional pelaku utama pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang paling pokok.

111. Mayoritas dari pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia dan para kolaborator Timor mereka, seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini: 41,2% (37.298/90.635) pelaku yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran nonfatal dikaitkan dengan militer Indonesia, dan 25,6% (23.230/90.635) dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka (seperti milisi-milisi, pasukan pertahanan sipil, dan pejabat lokal yang bekerja di bawah administrasi Indonesia). Untuk 7,9% (7.146/90.635) dari pelanggaran yang dilaporkan, pelaku pertanggungjawabannya dikaitkan dengan gerakan Resistansi dan pasukan prokemerdekaan.

Tabel 11: Pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi

Jenis Pelanggaran	Militer Indonesia	Kolaborator orang Timor dari TNI	Kelompok Resistansi	Lain-lain	Penduduk Sipil	Kelompok Pro-Otonomi	Tak Diketahui	Total
Penahanan	17.749	8.675	3.303	3.792	771	222	3.268	25.347
Penyiksaan	7.130	3.903	1.172	1.228	293	61	2.463	11.123
Penganiayaan	4.628	3.354	1.075	1.252	214	96	2.216	8.436
Pelanggaran properti/ekonomi	1.802	3.058	416	346	129	65	2.319	4.735
Lain-lain	2.367	1.634	789	735	73	34	1.020	4.339
Ancaman	1.458	1.590	236	251	55	28	1.143	2.982
Perekrutan Paksa	1.556	740	122	131	47	12	456	2.157
Pelanggaran Berbasis Seksual	608	276	33	26	11	1	203	853
	37.298	23.230	7.146	7.761	1.593	519	13.088	59.972

Pertanggungjawaban atas pelanggaran bisa saja dibagi di antara pelaku, sehingga kolom-kolom tersebut tak dapat dijumlahkan satu sama lain secara langsung.

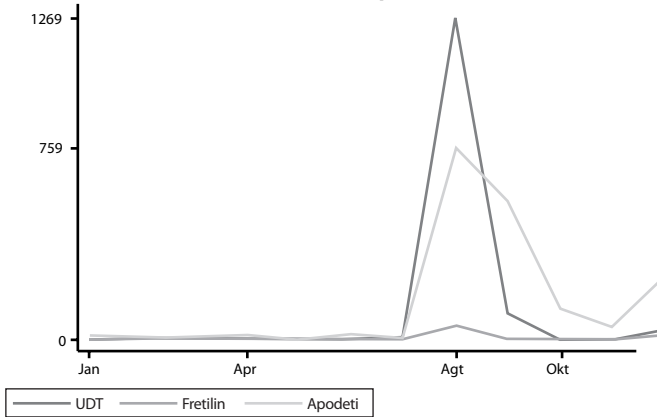
Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

Pola-pola lintas waktu pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran nonfatal

112. Tingkat pertanggungjawaban institusional untuk pelanggaran nonfatal yang tercatat berbeda-beda selama masa konflik. Pada 1975, 51,0% (6.229/12.206) dari pelaku yang terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang tercatat oleh Komisi dikaitkan dengan militer Indonesia, sedangkan yang 29,9% (3.653/12.206) dikaitkan dengan partai-partai politik Timor-Leste.

113. Dari pelanggaran nonfatal yang tercatat yang terjadi pada 1975, 31,2% (3.169/10.162) dikaitkan dengan Fretilin, 19,4% (1.972/10.162) dikaitkan dengan UDT, dan 2,6% (261/10.162) dengan Apodeti. Seperti yang diperlihatkan pada Bagan Jumlah Pelanggaran Nonfatal yang Dikaitkan dengan Fretilin, UDT, dan Apodeti, 1975, sebagian sangat besar pelanggaran nonfatal yang didokumentasikan pada 1975 (yang diketahui bulan pasti saat pelanggaran itu dilakukan) yang dikaitkan kepada partai-partai politik Timor-Leste terjadi pada Agustus dan September.

**Jumlah pelanggaran nonfatal yang dikaitkan dengan
Fretilin, UDT, dan Apodeti, 1975**



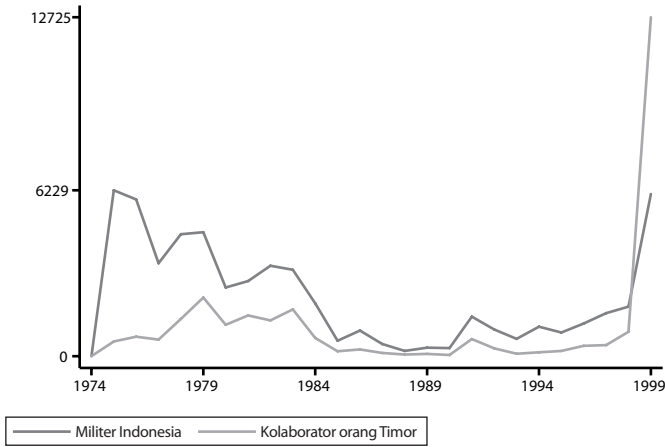
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: 22,0%; 41,0%; dan 53,1% pelanggaran nonfatal yang berturut-turut dikaitkan dengan UDT, Fretilin, dan Apodeti tidak merekam informasi tentang bulan kejadian

114. Seperti yang diperlihatkan pada Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, pada periode saat pendudukan militer Indonesia berkembang dari 1977 ke 1984, pola pelanggaran nonfatal yang dikaitkan dengan militer Indonesia dan pasukan pembantu mereka berkorelasi secara positif.* Selanjutnya, pelaku pertanggungjawaban antara 1977 dan 1984 secara relatif jauh lebih tinggi dikaitkan dengan satuan pertahanan sipil dan pasukan pembantu ABRI lainnya dibandingkan pada waktu tahun-tahun awal invasi (1975 – 1976) atau pada tahun-tahun konsolidasi antara 1985 dan 1998. Data statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa militer Indonesia banyak mengandalkan pasukan pembantu mereka antara 1977 dan 1984 untuk mengendalikan aktivitas Gerakan Resistansi dan penormalisasian pendudukan melalui cara pelanggaran terhadap integritas fisik. Dari seluruh pelanggaran nonfatal yang dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka antara 1977 dan 1984, 54,0% (4.660/8.633) merupakan tindak penahanan, 16,6% (1.435/8.663) merupakan tindak penyiksaan, dan 10,9% (938/8.633) merupakan tindak penganiayaan.

* Koefisien korelasi untuk pelanggaran nonfatal yang dilaporkan yang dikaitkan kepada militer Indonesia dan polisi dan mereka yang terkait dengan pasukan pembantu mereka adalah 0,88.

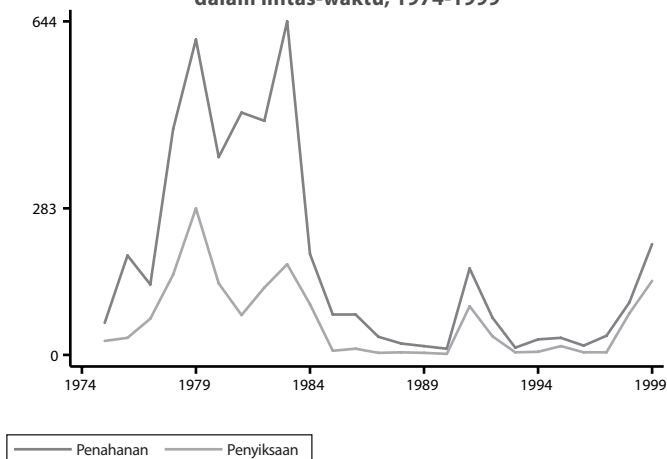
Pelanggaran dalam lintas-waktu



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

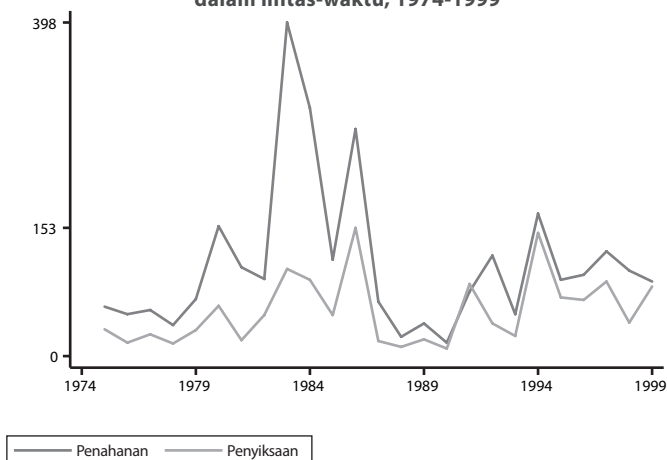
115. Deponen-deponen dari proses pengambilan pernyataan Komisi mengaitkan pertanggungjawaban besar kepada satuan-satuan tertentu pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan kolaborator Timor mereka dalam waktu-waktu tertentu selama masa konflik. Seperti yang diperlihatkan Bagan Pelanggaran Nonfatal yang Dilakukan oleh Satuan Pertahanan Sipil dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999 dan Bagan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Kopassus dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, setelah terjadinya konflik antarpantai dan masa awal invasi pada 1975, ada kenaikan dalam pertanggungjawaban dalam penahanan dan penyiksaan oleh satuan pertahanan sipil antara 1978 dan 1983, sedangkan setelah itu Kopassandha/ Kopassus (Pasukan Khusus Indonesia) melaksanakan beberapa ratus penahanan dan tindak penyiksaan yang dilaporkan pada 1984 dan 1986. Pada akhir 1990-an, seperti yang terlihat pada Bagan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Polisi dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, pertanggungjawaban untuk penahanan dan penyiksaan dikaitkan kepada polisi. Jumlah besarnya penahanan dan penyiksaan yang dikaitkan dengan pasukan pertahanan sipil pada 1983 adalah 1,6 kali lebih besar daripada penahanan dan tindak penyiksaan yang dikaitkan dengan Kopassandha pada tahun yang sama dan 2,0 kali lebih besar daripada yang dikaitkan dengan polisi pada 1999.

Pelanggaran nonfatal yang dilakukan oleh satuan Pertahanan Sipil dalam lintas-waktu, 1974-1999



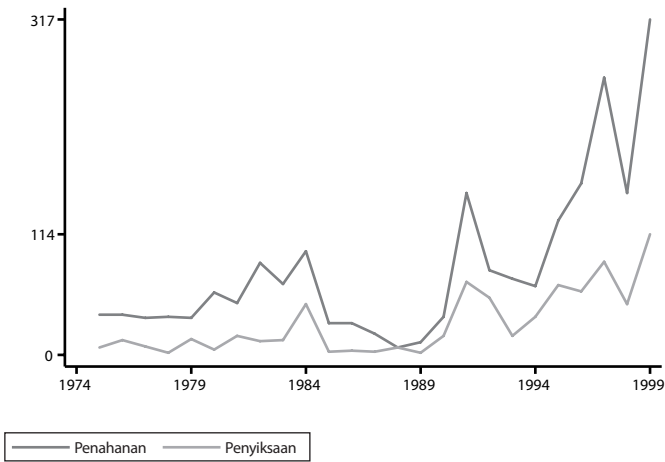
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pelanggaran yang dilakukan oleh Kopassus dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

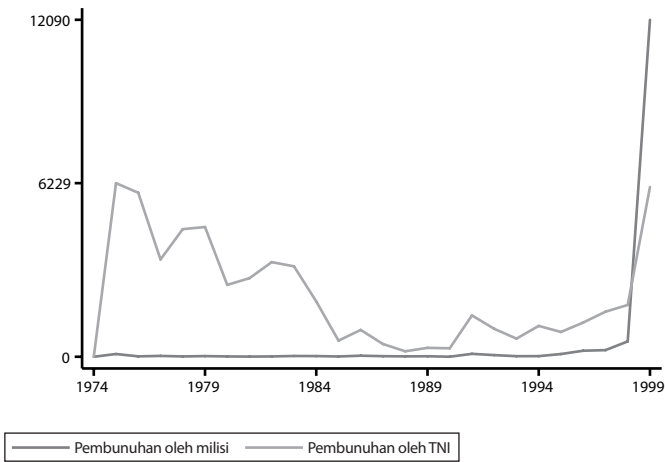
Pelanggaran nonfatal yang dilakukan oleh Polisi dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

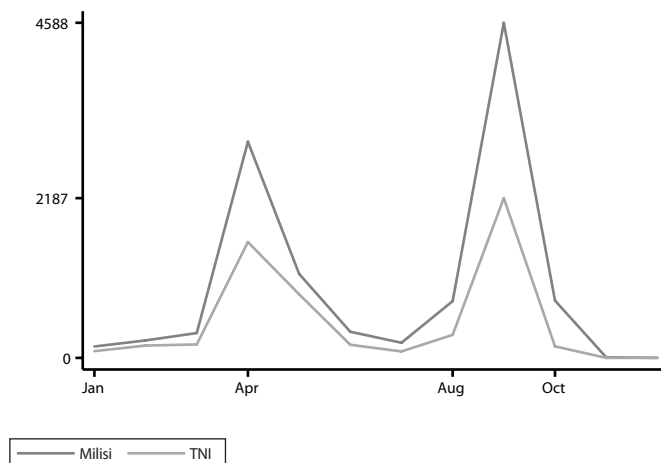
116. Sebaliknya pada 1999, banyak sekali pertanggungjawaban untuk pelanggaran nonfatal dikaitkan dengan milisi dan militer Indonesia—jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh milisi dua kali lebih banyak daripada pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilakukan oleh militer Indonesia, seperti yang terlihat pada Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999 dan Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, 1999.

Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1999

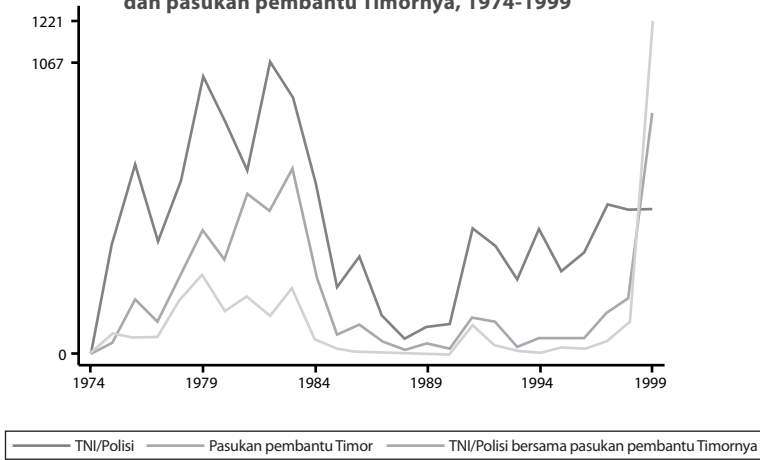


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

117. Kadang-kadang, pelanggaran nonfatal hanya dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi saja, lain kali hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka saja, dan kali lainnya lagi dikaitkan dengan militer Indonesia dan polisi yang bekerja sama dengan pasukan pembantu mereka. Pola pertanggungjawaban bersama atau secara individu antara pasukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka dibedakan menurut jenis pelanggaran dan lintas waktu.

118. Dari tindak penahanan sewenang-wenang yang didokumentasi oleh Komisi, 82,3% (20.867/25.347) dikaitkan dengan pasukan keamanan Indonesia, pasukan pembantu mereka, atau dengan keduanya. Seperti yang terlihat dalam Bagan Tindak Penahanan yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 – 1999, tindak penahanan sewenang-wenang yang dilaporkan yang dikaitkan hanya dengan militer Indonesia dan polisi, dengan pasukan pembantu mereka, atau dengan tindak bersama dari kedua pasukan itu berkorelasi positif sepanjang waktu. Khususnya, masa-masa saat banyak tindak penahanan tercatat dikaitkan dengan tindak bersama kedua pasukan itu (selain dengan tindak mandiri masing-masing pasukan) adalah termasuk juga masa awal invasi dan pendudukan (terutama antara 1978 dan 1983) dan sekitar waktu diadakannya Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB. Oleh karena itu analisis kuantitatif Komisi mengenai penahanan sewenang-wenang sesuai dengan hipotesis bahwa koordinasi dan kerjasama antara pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka terutama menjadi kuat setelah militer Indonesia menguasai sebagian besar Timor-Leste dan memulai pengonsolidasian wilayah pendudukan mereka, dan kemudian juga pada 1999 pada saat menjelang dan setelah masa Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

Tindak penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

119. Antara 1975 dan 1998, tindak penahanan sewenang-wenang yang hanya dikaitkan dengan militer Indonesia saja jauh lebih banyak terjadi dibandingkan dengan tindak penahanan sewenang-wenang yang hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu saja atau gabungan antara pasukan pendudukan Indonesia dengan pasukan pembantu mereka. Tetapi, pada 1999 hampir semua tindak penahanan dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka. Dari tindak penahanan sewenang-wenang 1999 yang dicatat oleh Komisi, 75,7% (2.104/2.779) dikaitkan dengan baik hanya tindakan mandiri pasukan pembantu mereka saja atau tindakan pasukan itu bersama dengan militer Indonesia dan polisi, sementara 19,2% (534/2.779) dari tindak penahanan yang dicatat yang terjadi pada 1999 hanya dikaitkan dengan militer Indonesia. Hampir semua tindakan ini dilaporkan terjadi pada April, Mei, dan September 1999, seperti yang terlihat pada Bagan Tindak Penahanan yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 – 1999. Pola statistik yang dihasilkan memperlihatkan adanya perencanaan dan koordinasi operasional antara kedua pasukan dalam cara pelaksanaan tindakan sewenang-wenang itu. Pada bulan-bulan tersebut pemerintah Indonesia meyakinkan PBB bahwa pasukan militernya sedang mencoba untuk mengendalikan kekerasan di Timor-Leste. Meskipun begitu, data statistik Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa pada 1999 militer Indonesia dan polisi, ali-alih menahan pasukan pembantunya (khususnya milisi-milisi yang pro-otonomi), malah membantu dan bersekongkol dengan pasukan pembantu mereka dalam melaksanakan tindak penahanan sewenang-wenang yang meluas pada masa menjelang dan setelah Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

120. Pola pertanggungjawaban yang diterakan baik secara mandiri maupun secara bersamaan terhadap pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu mereka mempunyai persamaan penting dengan pola penahanan sewenang-wenang,

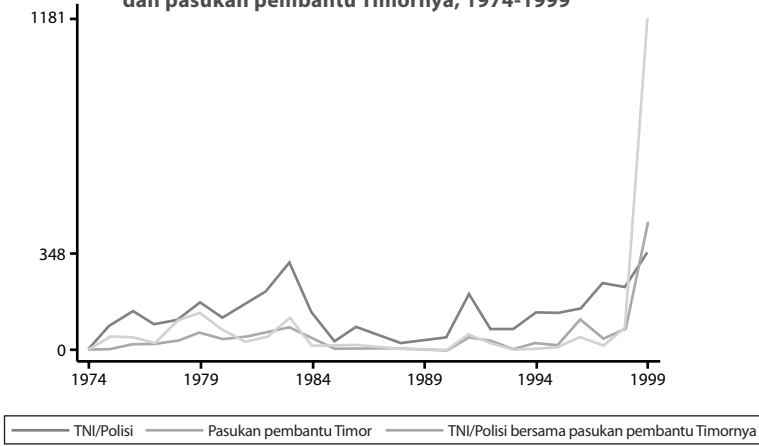
meskipun tindak penganiayaan dan penyiksaan digunakan dengan lebih bersasaran.* Jumlah yang mirip yaitu 82,5% (16.135/19.559) dari penganiayaan dan penyiksaan yang tercatat dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka. Pada 1999, sama dengan tindak penahanan sewenang-wenang, 75,8% (3.278/4.324) dari tindak penganiayaan dan penyiksaan yang dilaporkan juga dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka (baik bertindak sendiri atau bertindak bersama dengan militer Indonesia dan polisi). Meskipun begitu, pada 1999 dilaporkan tindak penganiayaan dan penyiksaan terjadi dalam jumlah yang lebih besar daripada kasus-kasus penahanan sewenang-wenang yang tercatat antara 1974 dan 1998, seperti yang bisa kita lihat apabila kita membandingkan Bagan Tindak Penyiksaan yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 – 1999 dan Tindak Penganiayaan yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 – 1999 dengan Bagan Tindak Penahanan yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 – 1999.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

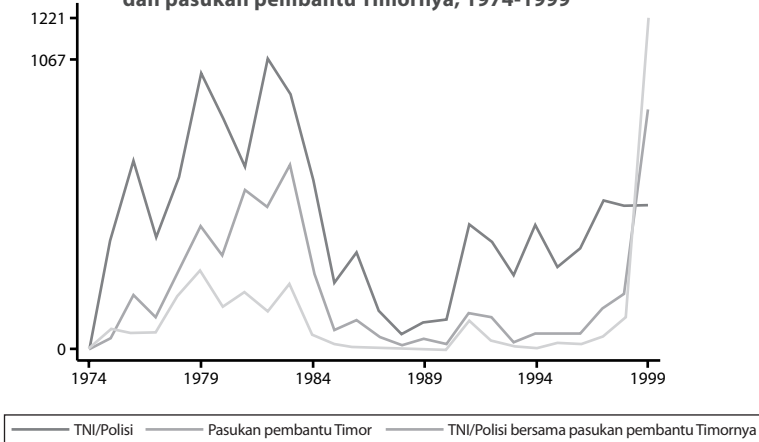
* Untuk penjelasan yang lebih terperinci mengenai sifat lebih bersasarannya tindak penyiksaan dan penganiayaan dibandingkan dengan tindak penahanan, lihat bagian mengenai tiga tahapan kekerasan besar-besaran di Timor-Leste di atas.

Tindak penganiayaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

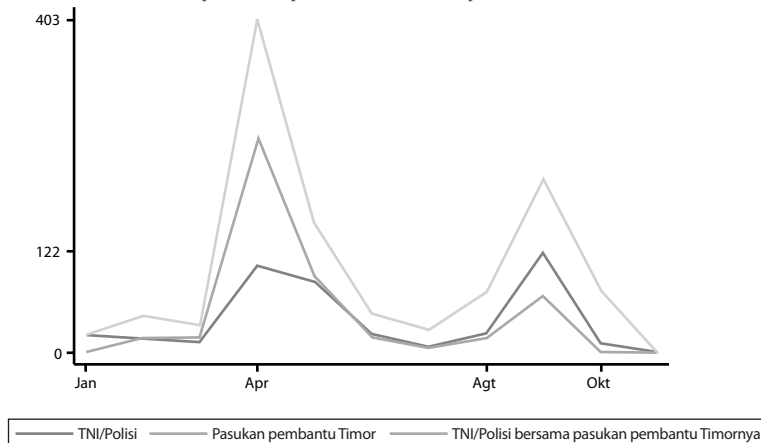
Tindak penganiayaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

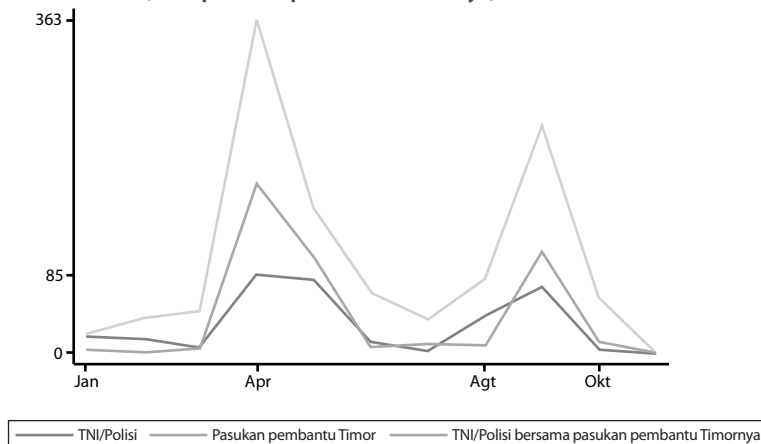
121. Pada 1999 pola dan skala tindak peniksaan dan penganiayaan yang tercatat yang dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka, baik bertindak sendiri atau bertindak bersama, hampir sama dengan tindak penahanan sewenang-wenang yang tercatat pada 1999, seperti yang bisa terlihat dalam Bagan Tindak Peniksaan yang Tercatat yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1999 dan Tindak Penganiayaan yang Tercatat yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1999.

**Tindak penyiiksaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI,
Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999**



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

**Tindak penganiayaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI,
Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999**



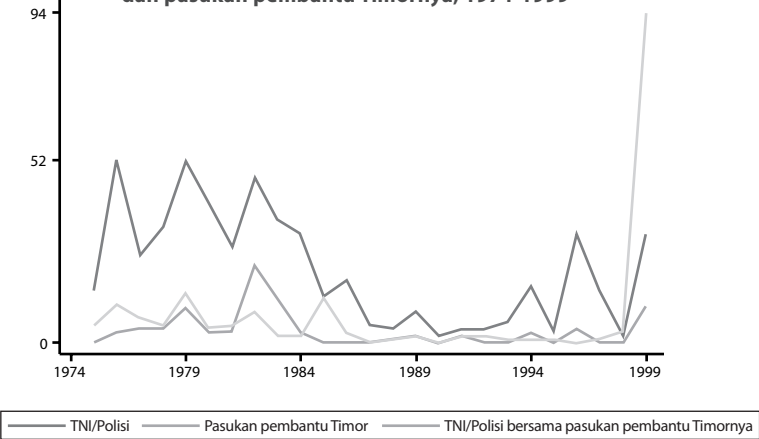
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

122. Oleh karena itu, seperti dalam kasus penahanan sewenang-wenang, data statistik Komisi mengenai tindak penganiayaan dan penyiiksaan sesuai dengan hipotesis bahwa koordinasi dan kerjasama antara pasukan Indonesia dan pasukan pembantu mereka terutama menjadi kuat setelah militer Indonesia menguasai sebagian besar Timor-Leste dan memulai pengonsolidasian wilayah pendudukan mereka, dan kemudian juga pada 1999 pada saat menjelang dan setelah masa Jajak Pendapat yang disponsori oleh PBB.

123. Sifat dan pola keterkaitan pelaku pertanggungjawaban untuk pelanggaran tercatat yang bersifat seksual dan yang menyangkut harta milik/ekonomi sangat berbeda dengan tindakan-tindakan yang tercatat untuk tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan.

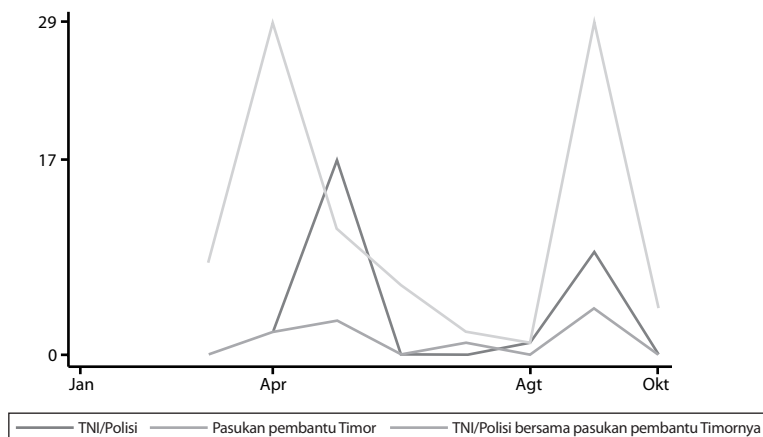
124. Proporsi yang tinggi dari pelanggaran seksual dikaitkan hanya dengan militer Indonesia saja, sedangkan proporsi yang jauh lebih rendah dari pelanggaran seksual dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia yang bertindak bersama dengan pasukan pembantu mereka. Tepatnya, 61,0% (520/853) dari pelanggaran seksual dikaitkan hanya dengan militer Indonesia dan polisi, 22,0% (188/853) dikaitkan dengan hanya pasukan pembantu mereka, dan 10,3% (88/853) dikaitkan dengan tindakan bersama pasukan-pasukan tersebut. Seperti halnya dengan pelanggaran nonfatal lainnya, jumlah pelanggaran seksual yang dikaitkan hanya dengan militer Indonesia antara 1975 dan 1998 adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan pelanggaran yang sama yang dikaitkan dengan hanya pasukan pembantu mereka atau dengan tindakan bersama pasukan-pasukan tersebut. Sebaliknya untuk 1999, mayoritas pelanggaran seksual (66,2% [94/142]) yang dilaporkan kepada Komisi hanya dikaitkan dengan pasukan pembantu mereka saja. Pola-pola lintas waktu ini diperlihatkan pada Bagan Tindak Pelanggaran Berbasis Seks yang Tercatat yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 – 1999 dan Tindak Pelanggaran Berbasis Seks yang Tercatat yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1999.

Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

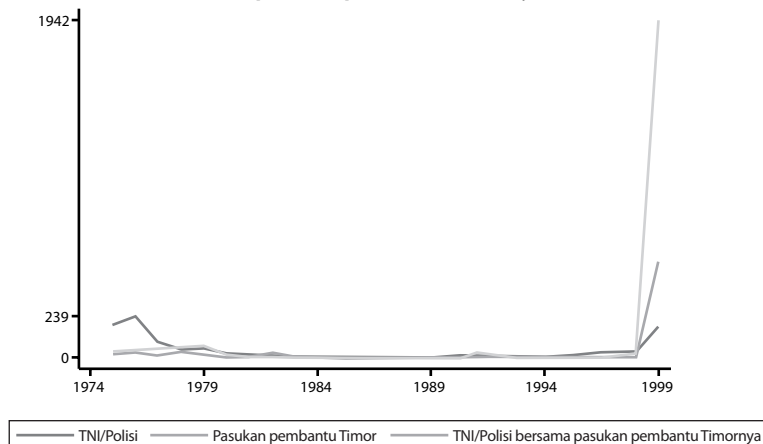
Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

125.65,1% (2.673/4.105) dari pelanggaran-pelanggaran yang tercatat dalam hal hak milik/ekonomi yang terjadi pada 1999 dikaitkan dengan pasukan pendudukan Indonesia dan/atau pasukan pembantu mereka, baik bertindak sendiri maupun bertindak bersama. Seperti yang bisa dilihat pada Bagan Tindak Pelanggaran Ekonomi/Properti yang Tercatat yang Dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan Pasukan Pembantu Timornya, 1974 – 1999, 70,2% (1.942/2.766) dari pelanggaran-pelanggaran yang tercatat dalam hal hak milik/ekonomi yang terjadi pada 1999 dikaitkan hanya dengan pasukan pembantu mereka, 20,0% (553/2.766) dikaitkan dengan tindakan bersama pasukan-pasukan tersebut, dan 6,4% (178/2.766) dikaitkan dengan hanya militer Indonesia dan polisi. Analisis kuantitatif Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa hampir semua penghancuran harta milik dan ekonomi dilaksanakan pada 1999 dan biasanya sebagian besar hanya dilakukan oleh para milisi dengan kolaborasi dari militer Indonesia dan polisi.

Tindak pelanggaran ekonomi/properti yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Variasi dalam pelanggaran nonfatal yang dilaporkan lintas wilayah

126. Data naratif Komisi tidak bisa digunakan untuk mengkaji secara langsung perbedaan skala pelanggaran antarwilayah dan distrik. Data berdasarkan sampel nonacak hanya akan dapat mewakili keseluruhan skala kekerasan lintas wilayah sejauh para deponen yang memberi pernyataannya dapat mewakili populasi lokal mereka dan dipilih sesuai dengan proporsi kekerasan yang terjadi di masing-masing distrik. Seperti yang dipaparkan di atas, informasi naratif yang dikumpulkan oleh Komisi, Fokupers, dan Amnesty International semuanya mengandung sejumlah bias. Akibatnya, pola pelanggaran nonfatal di seluruh wilayah disampaikan dalam Bagian ini untuk memberi gambaran tentang proses-proses sosial pengumpulan data oleh Komisi, Fokupers, dan Amnesty International, dan untuk mengkaji apakah pola-pola yang dilaporkan di seluruh wilayah konsisten dengan analisis dan argumentasi kualitatif yang relevan.

127. Tabel Pelanggaran Berdasarkan Distrik memperlihatkan jumlah setiap pelanggaran per distrik yang dilaporkan dalam proses pengambilan pernyataan Komisi. Angka pelanggaran yang dilaporkan untuk Dili jauh lebih tinggi dibandingkan distrik lain manapun, yakni 14,0% (8.389/59.972) dari semua pelanggaran di seluruh negeri. Distrik-distrik lain dengan angka pelanggaran yang relatif tinggi adalah Ermera, Manufahi, Viqueque, dan Lautém. Di hampir semua distrik, kecuali Oecussi, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan adalah pelanggaran yang paling sering dilaporkan, berkisar antara 69,4% dan 82,7% dari seluruh pelanggaran yang dilaporkan di distrik-distrik. Di Oecussi, pelanggaran integritas fisik berjumlah 43,0% dari seluruh pelanggaran di distrik tersebut. Dibandingkan dengan distrik-distrik lain, di

Oecussi pelanggaran harta benda dan ekonomi dilaporkan dalam proporsi yang lebih tinggi, yakni 30,8% (1.271/4.133) dari keseluruhan pelanggaran di distrik tersebut.^{*} Pelanggaran harta benda dan ekonomi di distrik-distrik yang lain dilaporkan lebih jarang—yakni rata-rata 7,4% (3.464/56.574) dari pelanggaran yang dilaporkan.

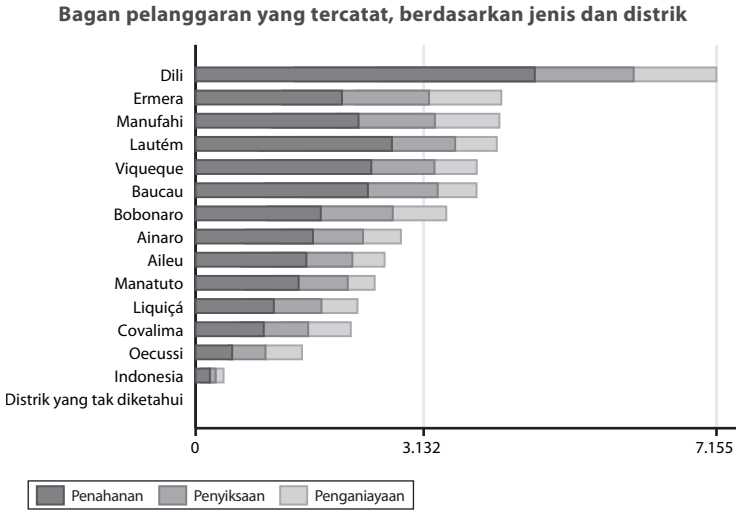
Tabel 12: Pelanggaran berdasarkan distrik (1)								
Pelanggaran	Lautém	Viqueque	Baucau	Manatuto	Manufahi	Aileu	Ermera	Total
Penahanan	2.696	2.412	2.366	1.414	2.237	1.520	2.010	14.655
Pelanggaran terhadap Integritas Fisik	909	905	976	695	1.094	658	1.281	6.518
Pelanggaran Ekonomi/ Properti	80	610	289	103	189	123	578	1.972
	1.319	1.570	1.205	893	1.954	1.013	2.112	10.066
	5.004	5.497	4.836	3.105	5.474	3.314	5.981	33.211

Pelanggaran berdasarkan distrik (2)								
Pelanggaran	Liquiçá	Dili	Ainaro	Covalima	Oecussi	Bobonaro	Indonesia	Total
Penahanan	1.074	4.658	1.611	935	501	1.718	195	10.692
Pelanggaran terhadap Integritas Fisik	662	1.367	743	641	460	1.035	90	4.998
Pelanggaran Ekonomi/ Properti	103	229	232	227	1.271	505	196	2.763
	858	2.135	1.141	1.267	1.166	1.494	247	8.308
	2.697	8.389	3.727	3.070	3.398	4.752	728	26.761

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

^{*} 96,8% (1.230/1.271) dari pelanggaran harta benda di Oecussi dilaporkan terjadi pada 1999. Lebih lanjut, 94,0% (3.194/3.398) dari pelanggaran yang dilaporkan di Oecussi terjadi pada 1999. Karena itu tampak bahwa berbeda dengan distrik-distrik lain, pelanggaran di Oecussi hampir seluruhnya terjadi pada 1999.

128. Walaupun pelanggaran atas integritas fisik yang dilaporkan kepada Komisi merupakan 61,5% (36.911/60.047) dari seluruh pelanggaran nonfatal yang tercatat, penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan tidak terdokumentasi dengan proporsi yang sama di setiap distrik, seperti yang tampak pada Bagan Pelanggaran yang Tercatat, Berdasarkan Jenis dan Distrik. Dili, khususnya, memiliki proporsi penahanan lebih tinggi dibanding jumlah tindak penganiayaan dan penyiksaan yang didokumentasi. Sementara di Bobonaro, Ainaro, Aileu, Manatuto, Liquiçá, dan Covalima tercatat proporsi penahanan yang lebih rendah dibanding proporsi penganiayaan dan penyiksaan. Data Komisi adalah sesuai dengan hipotesis bahwa kebijakan dan praktik penahanan dan penganiayaan fisik berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Analisis empiris Komisi secara khusus menemukan bahwa walaupun penahanan lebih sering terjadi di Dili, penganiayaan dan penyiksaan digunakan lebih jarang di sana dibanding di wilayah lain.

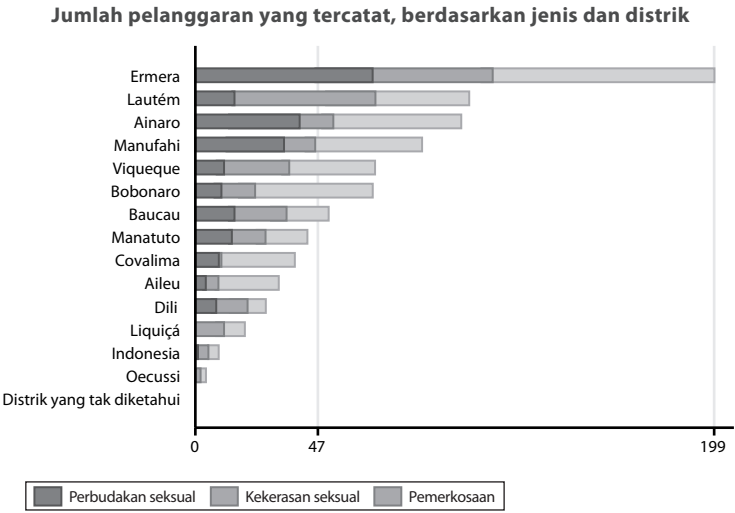


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

129. Pelanggaran berbasis seksual yang dicatat oleh Komisi mencapai 1,4% (853/59.972) dari seluruh pelanggaran yang dilaporkan. Namun, di Ermera, Ainaro, dan Lautém, Komisi menemukan proporsi pelanggaran seksual yang relatif lebih tinggi—masing-masing 3,3% (199/5.981), 2,7% (102/3.727), dan 2,1% (105/5.004) dari keseluruhan pelanggaran yang dilaporkan. Pelanggaran seksual dilaporkan lebih sedikit terjadi di Dili dan Oecussi—masing-masing 0,3% (27/8.389) dan 0,1% (4/3.398) dari seluruh pelanggaran.

130. Jenis-jenis pelanggaran berbasis seksual beragam dari satu distrik ke yang lainnya, seperti yang ditunjukkan dalam Bagan Jumlah Pelanggaran yang Tercatat, Berdasarkan Jenis dan Distrik, di bawah ini. Dari semua pelanggaran seksual di seluruh Timor yang dicatat oleh Komisi, pemerkosaan mencapai

46,1% (393/853), kekerasan seksual yang lain 27,1% (231/853), dan perbudakan seksual 26,8% (229/853). Pemerkosaan mencakup proporsi yang lebih besar dari pelanggaran seksual di Aileu dan Bobonaro dibandingkan dengan rata-rata nasional: masing-masing 71,9% (23/32) dan 66,2% (45/68). Sementara itu di Manufahi dan Ainaro perbudakan seksual adalah bagian terbesar dari pelanggaran berbasis seksual dibandingkan dengan rata-rata nasional: masing-masing 39,1% (34/87) dan 39,2% (40/102). Sama halnya, kekerasan seksual yang lain mencapai 57,9% (11/19) dan 51,4% (54/105) dari semua pelanggaran seksual yang tercatat di Liquiçá dan Lautém.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

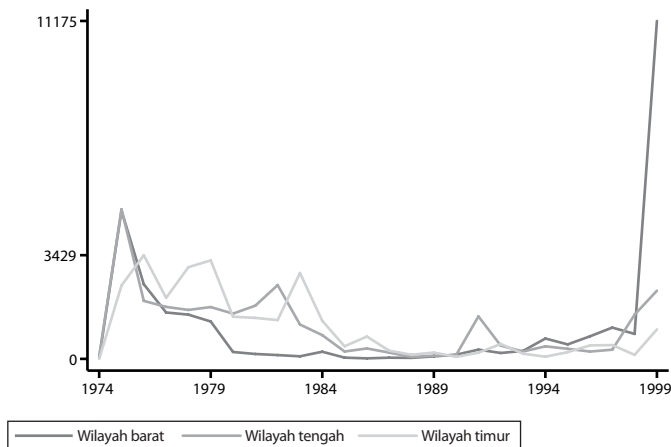
Pelanggaran nonfatal lintas ruang dan waktu

131. Secara garis besar kekerasan di Timor-Leste terjadi dalam fase-fase tersendiri, seperti yang dibahas di atas. Namun, pola-pola pelanggaran nonfatal selama fase pertama dan terakhir konflik berbeda-beda dari daerah ke daerah seperti yang tampak pada Bagan Jumlah Pelanggaran Nonfatal Berdasarkan Wilayah dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999. Secara khusus, kekerasan yang berkaitan dengan invasi awal Indonesia dan konflik partai pada 1975 lebih hebat di Wilayah-wilayah Barat dan Tengah dibandingkan daerah Wilayah Timur. Namun, dengan berlanjutnya pendudukan, pelanggaran nonfatal yang dilaporkan di Wilayah Barat menurun dari tingkat awalnya yang tinggi pada 1975 ke tingkat yang relatif rendah pada 1980, sedangkan di Wilayah Tengah kekerasan juga menurun setelah periode invasi awal menjadi kira-kira setengah dari yang terjadi pada 1975. Di Wilayah Timur tingkat kekerasan yang tercatat pada 1975 hanyalah sekitar setengah dari angka absolut yang dilaporkan di

Wilayah Barat dan Tengah. Akan tetapi, di seluruh penjuru Timor-Leste, selama akhir 1970-an dan awal 1980-an kekerasan berlanjut pada tingkat yang sama seperti yang terjadi pada 1976 tanpa penurunan berarti hingga 1984. Sementara kekerasan pada masa awal invasi Indonesia 1975 paling gencar terjadi di Wilayah Barat dan Tengah, setelah 1976 fokus kekerasan nonfatal beralih ke Wilayah Timur.

132. Tanpa memperhitungkan kejadian Santa Cruz dan masa setelahnya pada 1991 di Dili, kekerasan yang dilaporkan terjadi selama “tahun-tahun konsolidasi” dari 1984 hingga 1998 berlangsung dalam bentuk kekerasan tingkat rendah yang sporadis di ketiga wilayah tersebut. Selama fase akhir konflik pada 1999, 75,1% (9.494/12.634) dari pelanggaran nonfatal dilaporkan terjadi di Wilayah Barat. Data yang dimiliki Komisi sesuai dengan klaim yang menyatakan bahwa penduduk yang berada dekat dengan perbatasan Timor Barat dan Oecussi pada 1999 menjadi sasaran kekerasan dalam tingkat yang lebih tinggi ketika milisi pro-otonomi dan militer Indonesia menarik diri ke Timor Barat.

Jumlah pelanggaran nonfatal berdasarkan wilayah dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Demografi usia - jenis kelamin korban untuk pelanggaran nonfatal yang dilaporkan

Pelaporan tingkat informasi usia dan jenis kelamin bagi korban

133. Komisi mempelajari beberapa hipotesis yang dapat menentukan apakah korban dijadikan sasaran atas dasar umur dan jenis kelamin. Bagian ini menerangkan pola demografis umur-jenis kelamin yang terlihat jelas berbeda-beda untuk korban pelanggaran nonfatal yang dilaporkan. Analisis ini hanya mencakup korban-korban yang umur dan jenis kelaminnya pada saat pelanggaran diketahui.

134. Dari 60.047 pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi, 34.047 (63,4%) pelanggaran memuat informasi umur yang pasti dari korban pelanggaran nonfatal yang teridentifikasi. Sayangnya tidak ada cara untuk memastikan penyebaran usia yang tidak dilaporkan untuk data ini. Karena itu tidaklah mungkin mengukur seberapa baik representasi penyebaran usia korban yang diketahui usianya untuk penyebaran usia keseluruhan korban yang dilaporkan.

135. Komisi menganggap bahwa seorang anak adalah siapa pun yang berumur di bawah 18 tahun. Definisi ini mengikuti definisi yang dinyatakan dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak.⁶ Mayoritas pelanggaran nonfatal, 89,8% (30.574/34.047), yang dicatat oleh Komisi di mana usia korbannya diketahui terjadi pada korban dewasa. 10,2% (3.473/34.047) pelanggaran yang dicatat oleh Komisi diderita korban anak.

136. Dari 60.047 pelanggaran nonfatal yang dicatat oleh Komisi, 99,4% (59.715/60.047) dilakukan terhadap korban yang jenis kelaminnya diketahui. Dari pelanggaran-pelanggaran ini 14,0% (8.355/59.715) dilakukan terhadap perempuan dan 86,0% (51.360/59.715) dilakukan terhadap laki-laki. 25,476 korban (termasuk mereka yang tidak diketahui jenis kelaminnya) mengalami pelanggaran-pelanggaran berikut ini: dari seluruh korban tersebut 15,7% (4.002/25.476) adalah perempuan dan 83,6% (21.308/25.476) adalah laki-laki.

137. Komisi mencatat 3.473 pelanggaran terhadap anak-anak, 3.451 di antaranya menyebutkan informasi tentang jenis kelamin anak-anak tersebut. Dari pelanggaran-pelanggaran ini, 27,5% (950/3.451) dilakukan terhadap anak perempuan dan 72,5% (2.501/3.451) dilakukan terhadap anak laki-laki. Terdapat 22 anak yang jenis kelaminnya tidak diketahui atau tidak dilaporkan oleh saksi. Dari 30.446 pelanggaran terhadap orang dewasa yang didokumentasi di mana jenis kelamin korban diketahui, 12,7% (3.870/30.446) adalah perempuan dan 87,3% adalah laki-laki. Dengan demikian, proporsi pelanggaran terhadap anak-anak perempuan yang didokumentasi lebih besar daripada proporsi pelanggaran terhadap perempuan dewasa yang didokumentasi. Oleh karena itu, baik korban dewasa maupun anak-anak cenderung adalah laki-laki. Dibanding dengan laki-laki, korban perempuan cenderung berusia lebih muda.

Analisis korban berdasarkan jenis kelamin

138. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan secara substansial berbeda. Tabel di bawah ini dengan jelas menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling mengalami pelanggaran seksual: Komisi mencatat bahwa untuk setiap pelanggaran berbasis seksual terhadap laki-laki terjadi sepuluh pelanggaran terhadap perempuan. Sedangkan untuk setiap siksaan dan perekrutan paksa terhadap korban perempuan, Komisi mencatat sekitar 12 atau 13 tindak kekerasan dan perekrutan paksa dilakukan terhadap laki-laki. Jenis-jenis pelanggaran yang lain, contohnya ancaman, pelanggaran hak milik dan ekonomi, penganiayaan dan penahanan, dicatat dalam proporsi rata-rata sekitar 5.8 korban laki-laki untuk setiap korban perempuan.

Tabel 13: Pola korban menurut jenis kelamin						
Jenis Pelanggaran	Pelanggaran terhadap Laki-laki	Pelanggaran terhadap Perempuan	Pelanggaran terhadap korban dengan jenis kelamin yang tak tercatat	% Korban perempuan	Proporsi korban lelaki terhadap perempuan	Total
Pelanggaran properti/ekonomi	3.792	908	35	19,2	4,2	4.735
Pelanggaran integritas fisik	10.205	1.247	64	10,8	8,2	11.516
	15.602	2.678	94	14,6	5,8	18.374
Penahanan	21.687	3.521	139	13,9	6,2	25.347
	51.286					59.972

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

139. Dalam tabel di bawah ini, dianalisis pola korban menurut jenis kelamin lintas waktu. Ada variasi yang signifikan antara rasio korban laki-laki terhadap korban perempuan selama tahun-tahun konflik: rasio laki-laki terhadap perempuan bervariasi antara yang terendah 2,7 pada 1981 hingga yang tertinggi 43,1 pada 1991. Rasio laki-laki atas perempuan yang lebih tinggi daripada rasio rata-rata dicatat pada 1975, 1987, dan 1999. Temuan-temuan ini sesuai dengan hipotesa bahwa banyak perempuan dibawa ke Ataúro 1981, dan juga bahwa tindakan represif dari kekuatan militer Indonesia setelah kejadian Santa Cruz kebanyakan diarahkan kepada laki-laki.

Tabel 14: Pola korban menurut jenis kelamin dalam lintas waktu						
Tahun	Pelanggaran terhadap Laki-laki	Pelanggaran terhadap Perempuan	Pelanggaran terhadap Korban dengan Jenis Kelamin yang Tak Tercatat	% Korban Perempuan	Proporsi Korban Lelaki terhadap Perempuan	Total
1974	94	0	0	0.0		94
1975	5.526	489	29	8,1	11,3	6.044
1976	2.986	554	13	15,6	5,4	3.553
1977	2.287	352	30	13,2	6,5	2.669
1978	2.516	523	23	17,1	4,8	3.062
1979	3.471	633	23	15,3	5,5	4.127

1980	2.071	389	20	15,7	5,3	2.480
1981	1.768	664	7	27,2	2,7	2.439
1982	2.440	708	4	22,5	3,4	3.152
1983	2.949	679	41	18,5	4,3	3.669
1984	1.788	239	2	11,8	7,5	2.029
1985	532	128	0	19,4	4,2	660
1986	856	204	2	19,2	4,2	1.062
1987	430	41	0	8,7	10,5	471
1988	189	16	0	7,8	11,8	205
1989	311	20	11	5,8	15,6	342
1990	302	7	8	2,2	43,1	317
1991	1.658	185	6	10,0	9,0	1.849
1992	1.009	54	20	5,0	18,7	1.083
1993	551	84	2	13,2	6,6	637
1994	974	158	14	13,8	6,2	1.146
1995	927	38	6	3,9	24,4	971
1996	1.170	154	6	11,6	7,6	1.330
1997	1.580	123	1	7,2	12,8	1.704
1998	2.075	164	4	7,3	12,7	2.243
1999	10.826	1.748	60	13,8	6,2	12.634
	51.286					59.972

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

140. Meskipun perincian untuk tiap distrik menunjukkan lebih sedikit variasi rasio laki-laki atas perempuan lintas ruang daripada menurut lintas waktu, rasio yang lebih tinggi dari rata-rata tercatat di Liquiçá (11,4), Oecussi (9,4), Aileu (8,3), dan Dili (8,2), sedangkan Lautém (3,7), Ainaro (4,5), dan Ermera (4,5) mencatat rasio laki-laki terhadap perempuan yang lebih rendah dari rata-rata. Temuan-temuan ini tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 15: Pola korban menurut jenis kelamin di tiap distrik						
Distrik	Pelanggaran terhadap Laki-laki	Pelanggaran terhadap Perempuan	Pelanggaran terhadap Korban dengan Jenis Kelamin yang Tak Tercatat	% Korban Perempuan	Proporsi Korban Lelaki terhadap Korban Perempuan	Total
Lautém	3.915	1.069	20	21,4	3,7	5.004
Viqueque	4.766	685	46	12,5	7,0	5.497
Baucau	4.049	745	42	15,4	5,4	4.836
Manatuto	2.566	511	28	16,5	5,0	3.105
Manufahi	4.829	621	24	11,3	7,8	5.474
Aileu	2.934	352	28	10,6	8,3	3.314
Ermera	4.872	1.086	23	18,2	4,5	5.981
Liquiçá	2.475	217	5	8,0	11,4	2.697
Dili	7.441	906	42	10,8	8,2	8.389
Ainaro	3.034	681	12	18,3	4,5	3.727
Covalima	2.624	426	20	13,9	6,2	3.070
Oecussi	3.057	325	16	9,6	9,4	3.398
Bobonaro	4.097	631	24	13,3	6,5	4.752
Indonesia	627	99	2	13,6	6,3	728
	51.286					59.972

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

Analisis korban berdasarkan umur

141. Bagian ini membahas usia korban berdasarkan jenis pelanggaran, waktu, dan tempat terjadinya pelanggaran.

142. Angka pelanggaran spesifik terhadap korban dewasa dan anak-anak tampak pada tabel di bawah ini. Dalam hampir semua jenis pelanggaran yang dicatat Komisi, untuk setiap pelanggaran terhadap anak, terjadi sekitar 7-10 pelanggaran terhadap orang dewasa. Namun, proporsi pelanggaran seksual terhadap korban dewasa dibandingkan korban anak-anak secara substansial lebih rendah daripada jenis-jenis pelanggaran yang lain: untuk setiap pelanggaran seksual terhadap anak yang dicatat Komisi, terjadi 3,4 pelanggaran terhadap orang dewasa. Karena itu, rasio dewasa terhadap anak untuk pelanggaran seksual adalah sekitar 2,5 kali lebih rendah daripada pelanggaran nonfatal yang lain.

Tabel 16: Pola korban menurut usia						
Jenis Pelanggaran	Pelanggaran terhadap Orang Dewasa	Pelanggaran terhadap Anak-anak	Pelanggaran terhadap Korban dengan Umur yang Tak Tercatat	% Korban Anak-anak	Proporsi Korban Dewasa terhadap Anak-anak	Total
Pelanggaran Properti/ Ekonomi	2.882	323	1.530	6,8	8,9	4.735
Pelanggaran terhadap Integritas Fisik	6.255	639	4.622	5,5	9,8	11.516
	9.543	1.088	7.743	5,9	8,8	18.374
Penahanan	11.849	1.427	12.071	5,6	8,3	25.347
			25.966			59.972

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

143. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pelanggaran terhadap orang dewasa dan anak-anak berdasarkan tahun. Data Komisi tentang pelanggaran nonfatal secara umum menunjukkan peningkatan dalam rasio orang dewasa terhadap anak-anak selama masa tersebut, yakni bahwa jumlah korban dewasa dibanding korban anak-anak lebih besar di pengujung konflik. Namun, karena secara substansial cukup banyak korban dari masa awal konflik tidak tercatat umurnya, sulit membuat perbandingan antara rasio korban dewasa atas anak pada periode awal dan rasio pada akhir konflik tersebut.

Tabel 17: Pola korban menurut usia per tahun, 1974 - 1999						
Tahun	Pelanggaran terhadap Orang Dewasa	Pelanggaran terhadap Anak-anak	Pelanggaran terhadap Korban dengan Umur yang Tak Tercatat	% Korban Anak-anak	Proporsi Korban Dewasa terhadap Anak-anak	Total
1974	5	0	89	0,0		94
1975	2.616	402	3.026	6,7	6,5	6.044
1976	1.582	293	1.678	8,2	5,4	3.553
1977	1.087	185	1.397	6,9	5,9	2.669
1978	1.302	226	1.534	7,4	5,8	3.062
1979	2.015	260	1.852	6,3	7,8	4.127

1980	1.155	173	1.152	7,0	6,7	2.480
1981	1.174	293	972	12,0	4,0	2.439
1982	1.381	199	1.572	6,3	6,9	3.152
1983	1.653	200	1.816	5,5	8,3	3.669
1984	1.017	78	934	3,8	13,0	2.029
1985	307	40	313	6,1	7,7	660
1986	527	93	442	8,8	5,7	1.062
1987	194	27	250	5,7	7,2	471
1988	121	6	78	2,9	20,2	205
1989	234	17	91	5,0	13,8	342
1990	196	45	76	14,2	4,4	317
1991	1.099	62	688	3,4	17,7	1.849
1992	509	28	546	2,6	18,2	1.083
1993	308	47	282	7,4	6,6	637
1994	568	53	525	4,6	10,7	1.146
1995	457	43	471	4,4	10,6	971
1996	680	39	611	2,9	17,4	1.330
1997	1.073	88	543	5,2	12,2	1.704
1998	1.070	55	1.118	2,5	19,5	2.243
1999	8.199	525	3.910	4,2	15,6	12.634
			25.966			59.972

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

144. Komisi mencatat rata-rata 8,8 korban dewasa untuk setiap satu korban anak. Namun demikian, ada variasi dalam rasio korban dewasa terhadap anak antardistrik, seperti yang tampak pada tabel di bawah ini. Di Bobonaro jumlah korban anak yang tercatat relatif tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh rasio dewasa-anak 4,8, sementara di Covalima, Indonesia, dan Oecussi dicatat rasio korban dewasa-anak jelas lebih besar dari rata-rata.*

* Rata-rata, perbandingan korban orang dewasa terhadap anak-anak tercatat oleh Komisi adalah 17.3 di Covalima, 15.3 di Indonesia, dan 14.1 di Oecussi.

Tabel 18: Pola korban menurut usia per distrik						
Distrik	Pelanggaran terhadap Orang Dewasa	Pelanggaran terhadap Anak-anak	Pelanggaran terhadap Korban dengan Umur yang Tak Tercatat	% Korban Anak-anak	Proporsi Korban Dewasa terhadap Anak-anak	Total
Lautém	2.498	347	2.159	6,9	7,2	5.004
Viqueque	2.119	226	3.152	4,1	9,4	5.497
Baucau	2.597	314	1.925	6,5	8,3	4.836
Manatuto	1.347	191	1.567	6,2	7,1	3.105
Manufahi	2.505	246	2.723	4,5	10,2	5.474
Aileu	1.488	166	1.660	5,0	9,0	3.314
Ermera	3.107	315	2.559	5,3	9,9	5.981
Liquiçá	1.810	166	721	6,2	10,9	2.697
Dili	4.089	448	3.852	5,3	9,1	8.389
Ainaro	1.811	232	1.684	6,2	7,8	3.727
Covalima	1.942	112	1.016	3,6	17,3	3.070
Oecussi	2.278	161	959	4,7	14,1	3.398
Bobonaro	2.510	525	1.717	11,0	4,8	4.752
Indonesia	428	28	272	3,8	15,3	728
			25.966			59.972

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

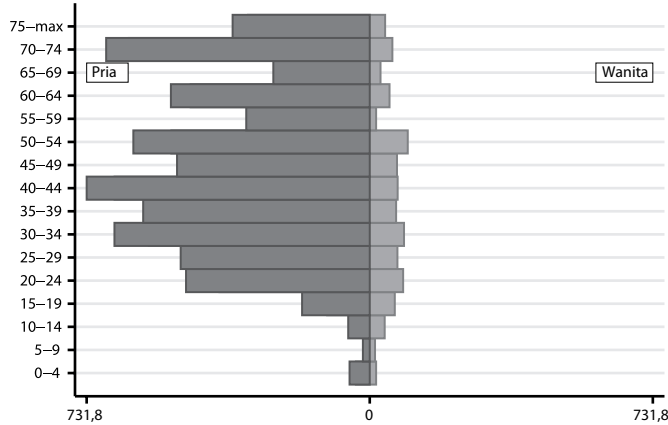
Analisis korban berdasarkan umur dan jenis kelamin

145. Bagian ini menggambarkan distribusi korban berdasarkan baik umur maupun jenis kelamin. Analisis ini ditunjukkan dalam jumlah dan perbandingan berdasarkan populasi dari tiap jenis pelanggaran. Perbandingan berdasarkan penduduk dihitung menggunakan hasil Sensus Penduduk Indonesia 1990.⁷

146. Bagan Tingkat Penahanan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 – 1999;Tingkat Penyiksaan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 – 1999; dan Tingkat Penganiayaan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 – 1999 menunjukkan jumlah pelanggaran berdasarkan umur dan jenis kelamin untuk penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan. Jumlah distribusi umur-jenis kelamin yang didokumentasi untuk ketiga jenis pelanggaran ini sungguh

serupa, dan masing-masing menunjukkan bahwa kelompok korban yang paling banyak tercatat untuk jenis-jenis pelanggaran ini adalah laki-laki muda dalam usia dinas militer. Sangat sedikit tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang tercatat dialami oleh korban perempuan.

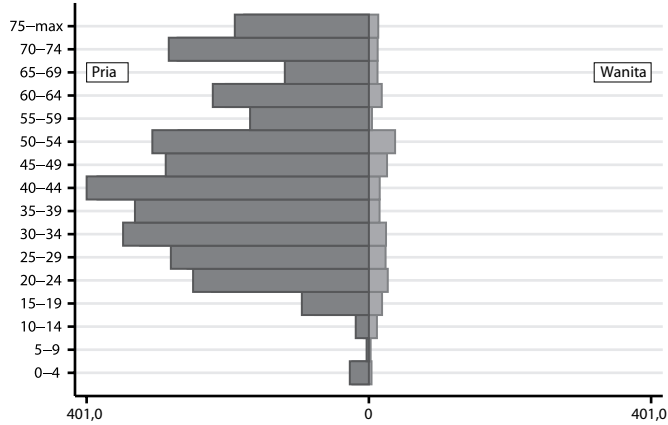
Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 47,8% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

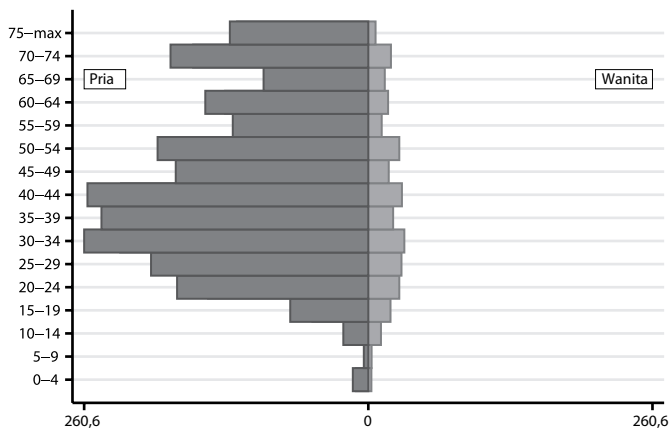
Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 40,6% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999

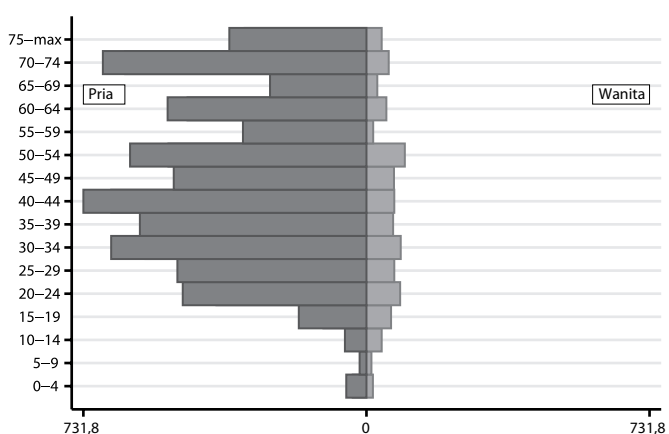


Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 42,0% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

147. Ketika beralih dari hitungan pelanggaran sederhana ke hitungan pelanggaran berbasis penduduk, terlihat bahwa relatif terhadap keseluruhan penduduk Timor, laki-laki paruhbaya mengalami tingkat tertinggi bentuk-bentuk kekerasan ini. Lebih jauh lagi, lelaki tua di atas 70 tahun mengalami bentuk-bentuk kekerasan ini pada tingkat yang serupa dengan yang dialami lelaki paruhbaya. Pola-pola ini tampak pada Bagan Tingkat Penahanan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 -1999; Tingkat Penyiksaan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 -1999; dan Tingkat Penganiayaan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 -1999.

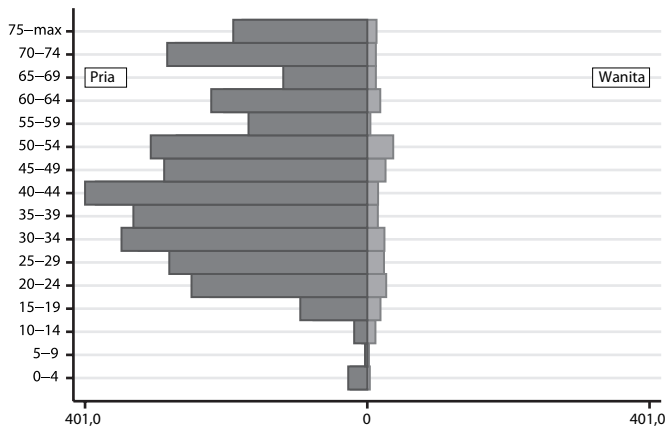
Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 47,8% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

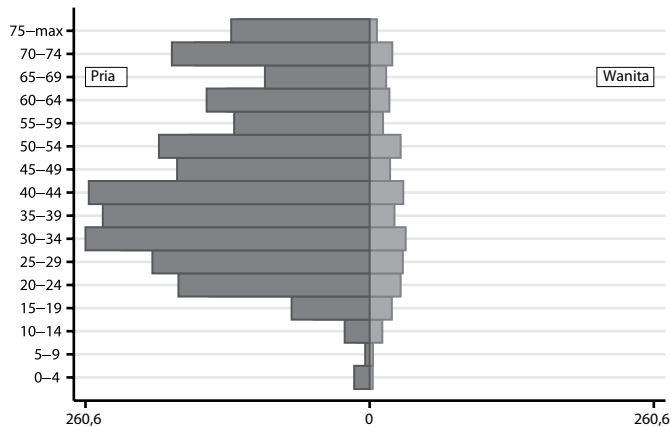
Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 40,6% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



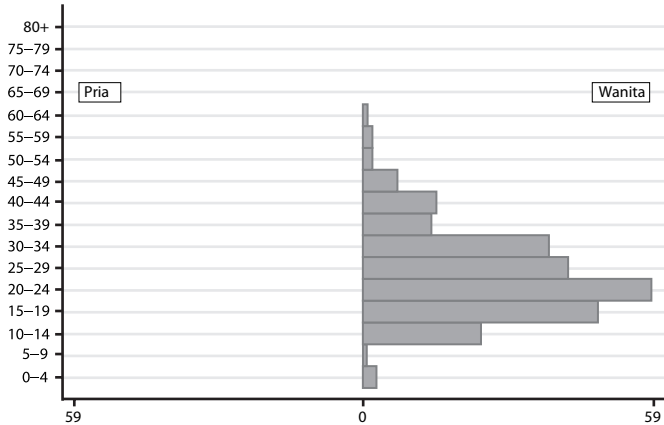
Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia

Catatan: 42,0% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

148. Penyebaran umur-jenis kelamin para korban pelanggaran seksual yang dicatat oleh Komisi secara substansial berbeda dari penyebaran umur-jenis kelamin pelanggaran integritas fisik. Hal ini tampak pada Bagan Jumlah Tindak Pemerkosaan yang Tercatat, Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin, 1974 -1999; dan Tingkat Pemerkosaan Spesifik Usia-Jenis Kelamin (per 10.000 orang), 1974 -1999. Lebih lanjut, ada perbedaan-perbedaan nyata dalam penyebaran umur-jenis

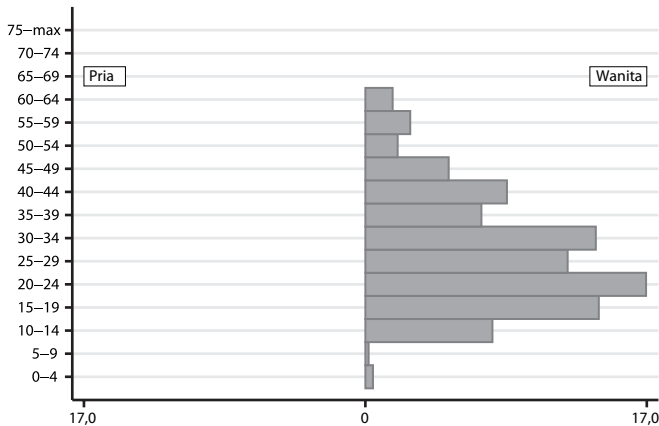
kelamin untuk berbagai bentuk pelanggaran seksual. Komisi mendokumentasikan pemerkosaan perempuan dalam semua kategori umur di bawah 65 tahun. Namun, frekuensi tertinggi pemerkosaan yang tercatat dan tingkat tertinggi pemerkosaan berdasarkan populasi adalah pada perempuan muda dalam usia reproduksi. Perempuan berusia 15 – 24 tahun tampaknya telah menjadi subpopulasi yang berisiko tertinggi mengalami pemerkosaan.

Jumlah tindak pemerkosaan yang tercatat berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
Catatan: 34,9% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

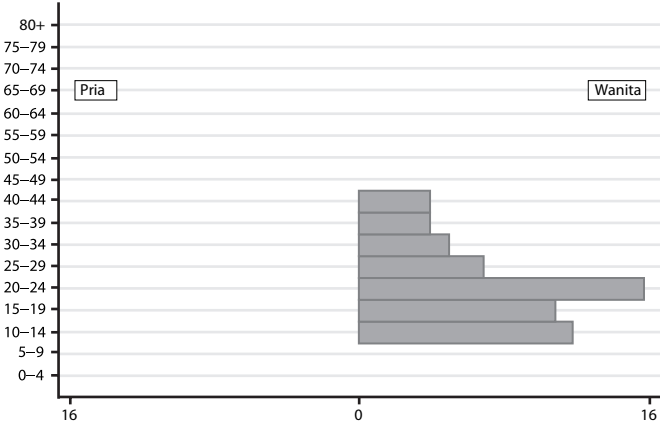
Tingkat pemerkosaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia
Catatan: 34,9% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

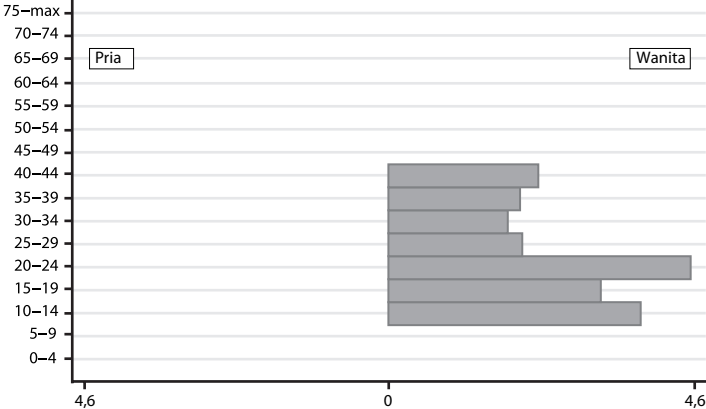
149. Di samping itu, para perempuan berusia antara 10 dan 44 dicatat sebagai korban perbudakan seksual. Dari korban-korban ini perempuan antara usia 20 dan 24 tahun adalah yang jumlahnya paling banyak dan tingkatnya paling tinggi dalam hal perbudakan seksual. Seperti halnya pemerkosaan, tidak ada kasus perbudakan seksual terhadap laki-laki yang didokumentasi oleh Komisi.

**Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang),
1974-1999**



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
Catatan: 39,8% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

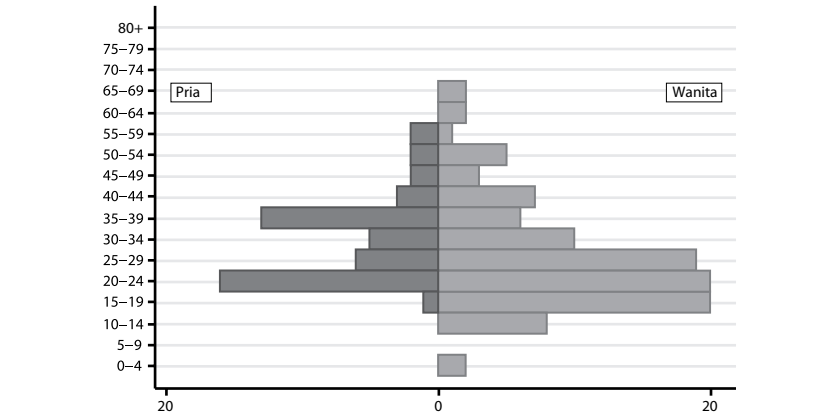
**Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang),
1974-1999**



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia
Catatan: 39,8% data pelanggaran tak merekam usia atau jenis kelamin korban

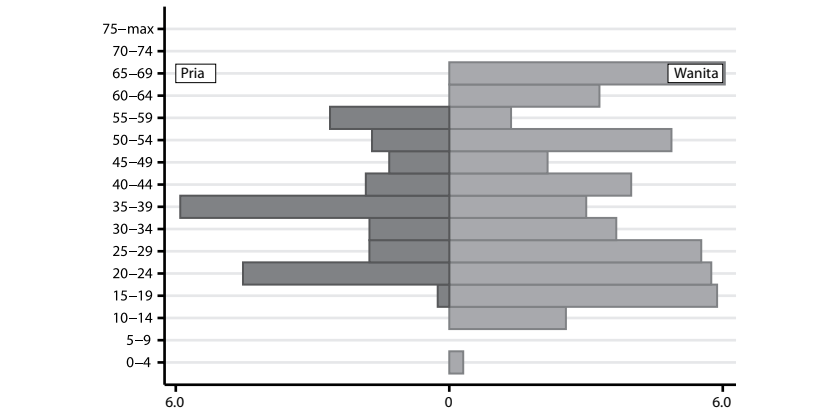
150. Namun demikian Komisi mencatat kasus-kasus kekerasan seksual lain baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Bentuk kekerasan ini paling umum terjadi pada laki-laki dalam kelompok umur 20 – 24 dan 35 – 39 dan pada perempuan antara umur 15 dan 29 tahun.

Jumlah kekerasan seksual yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR
Catatan: 29,9% data pelanggaran tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

Tingkat kekerasan seksual spesifik usia dan jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974-1999



Sumber: (i) Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR; (ii) Sensus Penduduk 1990, Biro Pusat Statistik Indonesia
Catatan: 29,9% data pelanggaran tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

151. Oleh karena itu, analisis kuantitatif Komisi menunjukkan bahwa mayoritas yang sangat besar dari korban pelanggaran seksual adalah perempuan muda usia. Lebih lanjut lagi, pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilaporkan hanya dialami oleh perempuan.

Perbandingan antara pemantauan Hak Asasi Manusia retrospektif dan pemantauan dalam masa yang sama

152. Bagian ini membandingkan cakupan dan pola pelanggaran nonfatal yang dilaporkan oleh Komisi dengan tingkat dan pola pelanggaran nonfatal yang dilaporkan oleh Amnesty International. Bagian ini menggambarkan betapa terisolasinya Timor-Leste saat itu dari komunitas internasional dan kurangnya informasi serta terbatasnya pengetahuan mengenai pelanggaran di Timor selama periode awal serta yang paling keras dari seluruh konflik.

153. Seperti yang dibahas di atas, akses ke wilayah Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia sangat terbatas, khususnya bagi kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International (AI). Sebagai akibatnya, cakupan geografis laporan-laporan Amnesty International pada masa itu cukup banyak berbeda dengan apa yang dilaporkan kepada Komisi dan Fokupers dalam proses pengambilan pernyataan retrospektif (di kemudian hari) untuk masa yang sama.

154. 35,6% (1.953/5.479) dari pelanggaran nonfatal yang dicatat oleh Amnesty International tidak mengandung informasi tentang tempat terjadinya masing-masing pelanggaran, seperti yang tampak pada Tabel Distribusi Data di bawah ini. Hal ini tampaknya sesuai dengan arus informasi yang terbatas yang keluar dari Timor-Leste selama masa pendudukan (khususnya dari desa-desa dan kecamatan-kecamatan terpencil di pegunungan). Lebih lanjut, sifat pelaporan kepada komunitas internasional pada masa itu lebih berfokus pada laporan tentang situasi hak asasi manusia di Timor-Leste bukan pada penggambaran kondisi yang berbeda dari berbagai wilayah di Timor-Leste. Namun, 32,3% (1.770/5.479) dari keseluruhan pelanggaran nonfatal yang dilaporkan oleh Amnesty International terjadi di Dili—suatu proporsi yang lebih tinggi daripada yang dilaporkan proyek retrospektif CAVR dan Fokupers, yang menyatakan bahwa pelanggaran di Dili mencapai 14,0% (8.389/59.972) dan 4,6% (36/788) .

Tabel 19: Tabel distribusi data berdasarkan data CAVR, Fokupers, Amnesty International						
Distrik	Basis Data Pernyataan CAVR	Basis Data Amnesty	Basis Data Fokupers	% CAVR	% Amnesty	% Fokupers
Lautém	5.004	6	111	8,3	2,0	0,8
Viqueque	5.497	6	114	9,2	2,1	0,8
Baucau	4.836	1	210	8,1	3,8	0,1
Manatuto	3.105	27	22	5,2	0,4	3,4

Manufahi	5.474	63	60	9,1	1,1	8,0
Aileu	3.314	18	57	5,5	1,0	2,3
Ermera	5.981	113	25	10,0	0,5	14,3
Liquiçá	2.697	88	246	4,5	4,5	11,2
Dili	8.389	36	1.770	14,0	32,3	4,6
Ainaro	3.727	84	54	6,2	1,0	10,7
Covalima	3.070	90	65	5,1	1,2	11,4
Oecussi	3.398	10	19	5,7	0,3	1,3
Bobonaro	4.752	190	184	7,9	3,4	24,1
Indonesia	728	52	589	1,2	10,8	6,6
Distrik yang Tak Diketahui	0	4	1.953	0,0	35,6	0,5
	59.972	788	5.479	100,0	100,0	100,0

Sumber: Basis Data Pernyataan serta Laporan CAVR, Fokupers, dan Amnesty Internasional

155. Seperti yang diisyaratkan dalam Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu di bawah ini, laporan-laporan Amnesty International yang dibuat dekat dengan masa kejadian menunjukkan tiga gelombang penahanan yang jelas atas individu yang diketahui identitasnya—yakni yang terjadi pada 1985 (terhadap 402 orang), 1989 – 1993 (891 orang), dan 1994 – 1999 (811 orang). Sedangkan laporan retrospektif yang diberikan kepada Komisi menyebutkan jumlah terbanyak penahanan sewenang-wenang terjadi pada 1999 dan sekitar 1975 – 1984. Lebih lanjut lagi, laporan-laporan ini menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 2.779 penahanan terjadi pada 1999 dan sedikitnya 16.509 penahanan terjadi antara 1975 dan 1984. Perbandingan-perbandingan ini adalah bukti tentang sulitnya mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste selama masa pendudukan Indonesia. Secara khusus, Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok-kelompok internasional hak asasi manusia, seperti Amnesty International, secara seksama mencatat situasi hak asasi manusia di Timor-Leste sepanjang dasawarsa 1980 dan 1990, pelaporan yang dilakukan jauh lebih rendah daripada skala keseluruhan kekerasan nonfatal yang sebenarnya pada waktu itu. Bagan ini juga menunjukkan perbedaan yang mencolok antara pemahaman yang dapat diperoleh dari laporan retrospektif dibanding dengan laporan dibuat pada masa kejadiannya mengenai tahun-tahun awal invasi: Dari seluruh pelanggaran yang didokumentasi oleh Amnesty International, 10,9% (734/6,717) terjadi pada tahun-tahun awal invasi antara 1975 dan 1984. Sedangkan dari pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi, 64,0% (47,390/74,024) terjadi antara 1975 dan 1984.

Mengingat bahwa pelaporan kepada Komisi juga telah mengalami ‘kehilangan ingatan’ (karena sebagian orang yang dapat melaporkan pelanggaran di tahun-tahun awal invasi telah meninggal selama 1980-an dan ‘90-an), maka di dalam data narasi pernyataan yang ada pada Komisi pun telah mengalami bias waktu sehingga mengurangi laporan pelanggaran yang terjadi di tahun-tahun awal mandat Komisi. Komisi menyimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi antara 1975 sampai 1984 sangat kurang dilaporkan pada masa kejadiannya ketika dibanding dengan pola dan besarnya pelanggaran secara umum. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses ke Timor-Leste.



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

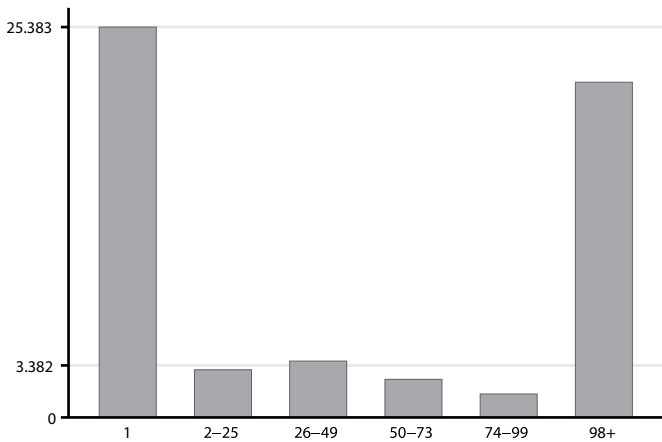
Sifat pelanggaran terhadap individu dan kelompok

156. Sebagian pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan terhadap seorang individu, sementara sebagian pelanggaran lainnya dilaporkan dilakukan terhadap lebih daripada satu orang pada waktu yang sama. Bagan Jumlah Korban Tindakan Penahanan Berdasarkan Ukuran Kelompok Korban, 1974 – 1999; Bagan Jumlah Korban Tindakan Penyiksaan Berdasarkan Ukuran Kelompok Korban, 1974 – 1999; dan Bagan Jumlah Korban Tindakan Penganiayaan Berdasarkan Ukuran Kelompok Korban, 1974 – 1999 memperlihatkan distribusi pelanggaran sesuai besar kelompok korban, untuk penyiksaan, penahanan, dan penganiayaan.*

* Seperti halnya kasus pelanggaran terhadap korban perseorangan, pelanggaran terhadap korban dalam kelompok bisa dilaporkan oleh lebih dari satu orang deponen. Komisi mencocokkan catatan korban berkelompok untuk mengidentifikasi laporan yang dilaporkan lebih dari satu kali untuk pelanggaran yang sama dan korban disebutkan oleh beberapa pernyataan yang berbeda-beda. Metode yang digunakan untuk pencocokan ini diuraikan dalam Lampiran Statistik.

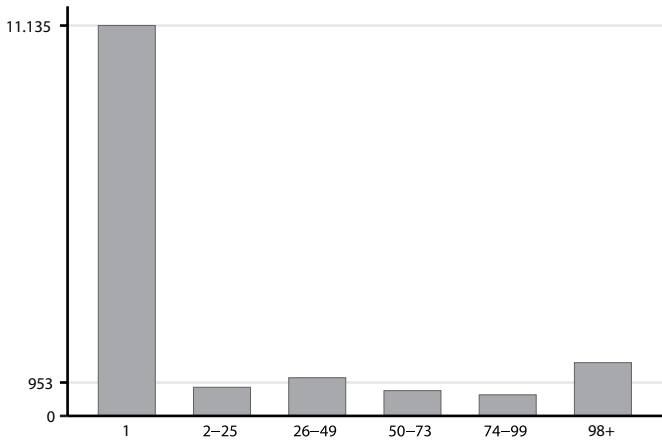
157. Sifat dari pelanggaran yang dilakukan terhadap satu orang cenderung berbeda dengan sifat pelanggaran terhadap kelompok. Seperti tampak pada Bagan Jumlah Korban Tindakan Penahanan Berdasarkan Ukuran Kelompok Korban, 1974 – 1999 dan Bagan Jumlah Korban Tindakan Penganiayaan Berdasarkan Ukuran Kelompok Korban, 1974 – 1999, penahanan sewenang-wenang dan penganiayaan lebih umum dilaporkan terjadi terhadap individu atau kelompok yang terdiri dari 50 orang atau lebih, sedangkan lebih sedikit orang pernah ditahan atau mengalami penganiayaan dalam kelompok yang terdiri dari 2 – 49 orang. Hampir semua tindakan penyiksaan dilaporkan dilakukan terhadap korban individu satu per satu. Temuan empiris ini sesuai dengan hipotesis bahwa penyiksaan adalah bentuk penindasan yang digunakan dengan lebih bersasaran (lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan).

Jumlah korban tindakan penahanan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974-1999

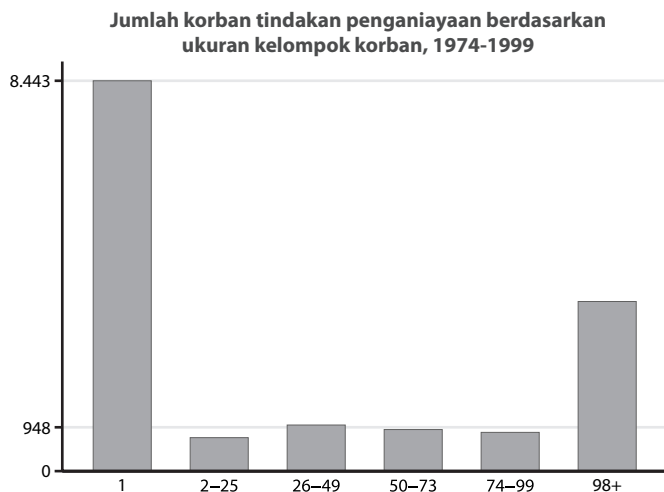


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah korban tindakan penyiksaan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

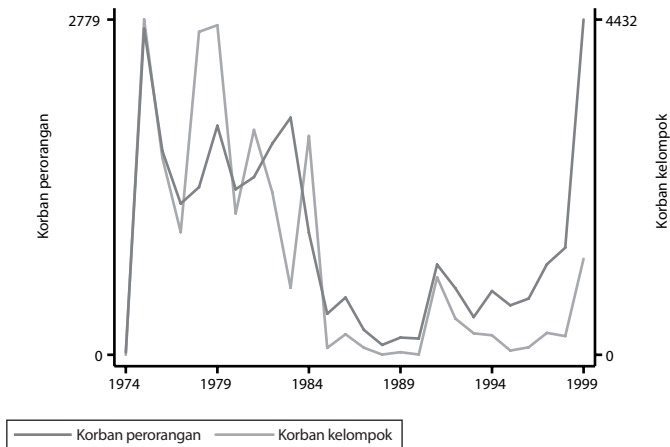
158. Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999 memperlihatkan bahwa dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi, penahanan korban individu dan korban kelompok berkorelasi positif. Ketika penahanan yang dilaporkan terhadap korban individu meningkat, begitu pula penahanan yang dilaporkan terhadap korban kelompok.^{*} Lebih lanjut, ada perbedaan substansial antara tingkat penahanan individu dan penahanan kelompok yang dilaporkan. Antara 1974 dan 1984 penahanan yang dilaporkan terhadap korban kelompok hampir selalu lebih tinggi daripada penahanan atas korban individu.[†] Ada dua kemungkinan penjelasan untuk pola ini, yakni:

- Polanya bisa mencerminkan karakteristik yang makin bersasaran dari praktik-praktik penahanan yang dilakukan militer Indonesia selama masa pendudukan dan peningkatan kemampuan mereka pada dasawarsa 1980 dan 1990 dalam menargetkan individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerakan Resistansi, atau
- Para deponen CAVR mungkin mengalami lebih banyak kesulitan untuk secara spesifik mengidentifikasi tahanan individual yang ditawan pada masa awal pendudukan dibandingkan pada masa akhir. Akibatnya, pelaporan para deponen mengenai periode awal lebih banyak menyebutkan penahanan terhadap kelompok-kelompok tanpa nama.

* Koefisien korelasinya adalah 0,74.

† Satu-satunya tahun dalam periode itu saat penahanan terhadap korban kelompok lebih rendah daripada penahanan yang dilaporkan terhadap korban individu adalah 1983.

Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974-1999



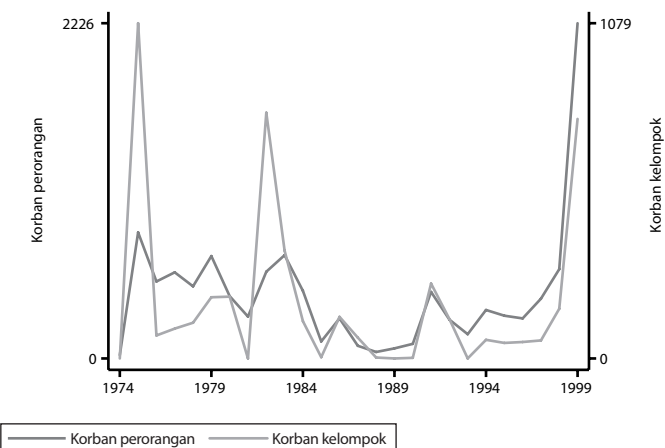
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

159. Namun, agaknya pola penahanan yang dilaporkan tidak dibentuk oleh daya ingat para deponen, karena tidak satu pun jenis pelanggaran lain (yaitu penyiksaan, penganiayaan, ancaman, dan pelanggaran harta benda) memperlihatkan bukti dari bias ingatan seperti ini—seperti diperlihatkan oleh Bagan Jumlah Tindakan Penyiksaan yang Tercatat, dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, Pelanggaran dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, Jumlah Tindakan Pengancaman yang Tercatat, dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, dan Jumlah Tindakan Kekerasan Berbasis Seksual yang Tercatat, dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999. Karena itu bukti statistik tentang penahanan yang didokumentasikan oleh Komisi sesuai dengan hipotesis bahwa praktik-praktik penahanan militer Indonesia berubah dari fokus pada korban individu dan kelompok pada tahun-tahun dari 1977 sampai 1984 menuju ke strategi lebih bersasaran yang berfokus pada tahanan individu mulai 1985 sampai 1999.

160. Bukti statistik Komisi juga memperlihatkan korelasi positif antara tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap korban kelompok dan korban individu sepanjang waktu.* Lebih jauh, seperti diperlihatkan dalam Bagan Jumlah Tindakan Penyiksaan yang Tercatat, dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, puncak-puncak tindakan penyiksaan yang dilaporkan terhadap korban kelompok terjadi pada 1975, 1982, dan 1999. Oleh karena itu, data Komisi menengarai bahwa jumlah terbesar kekerasan terhadap kelompok terjadi dengan cara yang sangat terkonsentrasi pada saat-saat tertentu.

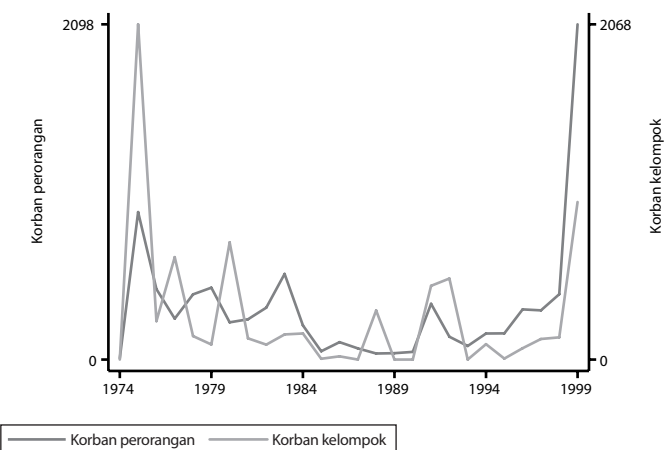
* Koefisien korelasinya adalah 0,69.

Jumlah tindakan penyiksaan yang tercatat dalam lintas-waktu, 1974-1999



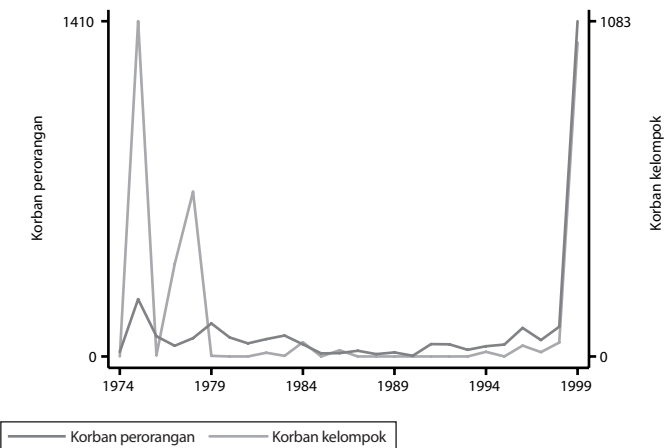
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974-1999



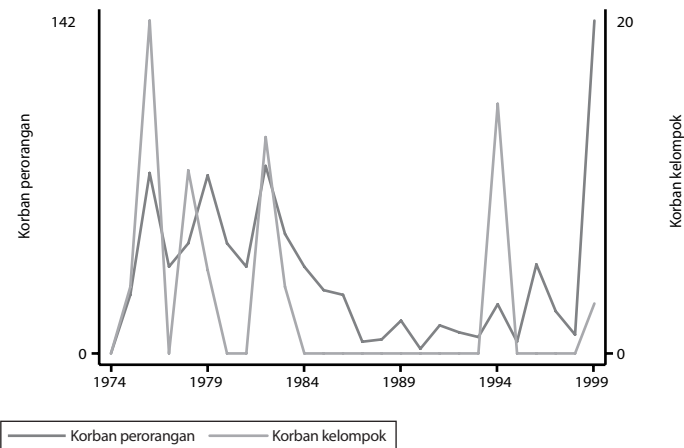
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah tindakan pengancaman yang tercatat dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Jumlah tindakan kekerasan berbasis seksual yang tercatat dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

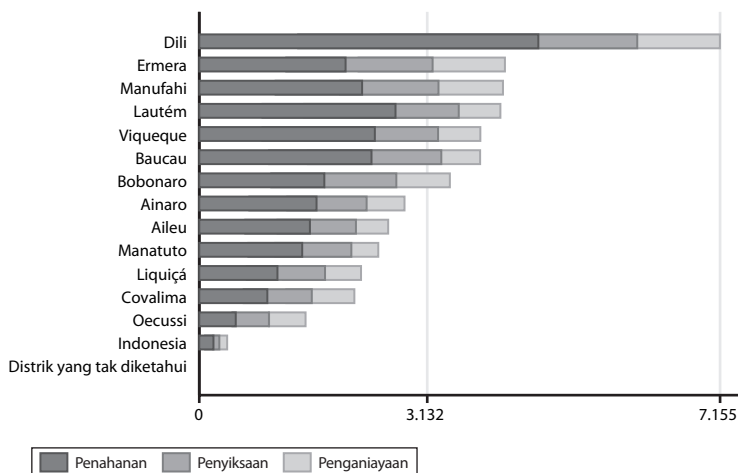
Penggunaan penahanan dan sifat pelanggaran yang dilakukan selama masa penahanan

161. Sepanjang masa pendudukan Indonesia atas Timor-Leste penahanan sewenang-wenang dan pemindahan paksa dilakukan di seluruh wilayah ini. Karena fenomena pemindahan telah dibahas secara mendalam pada paragraf-paragraf sebelum ini, bagian ini memusatkan pembahasan pada sifat dan penggunaan penahanan dalam periode mandat Komisi.

Hubungan antara penahanan dan bentuk-bentuk penganiayaan fisik

162. Secara umum tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan tampak berkorelasi positif. Penahanan sering terjadi dalam kejadian yang sama dengan penganiayaan fisik di seluruh wilayah. Ini tergambarkan dalam Bagan Jumlah Pelanggaran yang Tercatat, Berdasarkan Jenis dan Distrik. Jumlah keseluruhan tindak penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan terjadi di Dili lebih tinggi daripada di distrik lain manapun karena pusat-pusat penahanan utama di Ataúro dan di Comarca (Penjara) Balide keduanya terletak di dalam wilayah Dili.

Bagan pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik



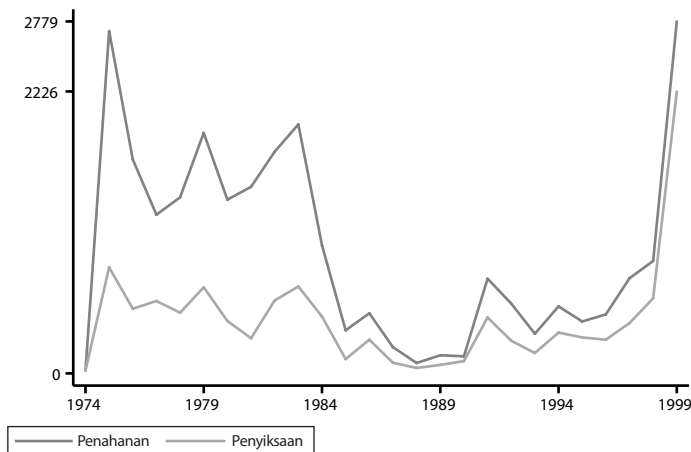
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

163. Selanjutnya, penahanan dan penyiksaan yang dilaporkan sepanjang waktu sangat berkorelasi positif. Bagan Pelanggaran dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999 juga memperlihatkan bahwa kekerasan menjadi semakin terkoordinasi dan tindak penyiksaan

* Koefisien korelasi antara penyiksaan dan penahanan yang dilaporkan per tahun antara 1974 dan 1999 adalah 0,81.

yang dilaporkan skalanya meningkat sepanjang waktu (antara akhir dasawarsa 1970 dan pertengahan dasawarsa 1980) dibandingkan dengan jumlah penahanan yang dilaporkan. Pola ini dapat mencerminkan meningkatnya kemampuan pelaku untuk mengarahkan sasaran pada korban tertentu ketika pendudukan Indonesia beranjak dari tahap awal pada akhir dasawarsa 1970 dan awal 1980 menuju tahap konsolidasi mulai 1985. Pada tahun-tahun awal invasi ada sekitar tiga kasus penahanan untuk setiap kasus penyiksaan yang dilaporkan. Setelah 1985, kedua pelanggaran tersebut tampak lebih erat terkait satu sama lain, dengan jumlah penahanan yang dilaporkan kurang lebih sama dengan tindak penyiksaan yang dilaporkan setiap tahunnya. Pola statistik yang terjadi memperlihatkan bahwa sepanjang waktu (dan khususnya setelah 1984) praktik penahanan sewenang-wenang menjadi lebih bersasaran dan semakin umum digunakan bersama dengan tindak penyiksaan.

Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pola-pola pelanggaran yang dilakukan selama masa penahanan

164. Dari semua pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi selama proses pengambilan pernyataan naratif, penahanan adalah yang paling sering disebutkan—yakni 42.3% (25,383/60,047) dari seluruh pelanggaran nonfatal yang tercatat. Namun, penahanan sering kali dikombinasikan dengan bentuk-bentuk penganiayaan yang lain: dari jenis-jenis penganiayaan fisik utama yang dilaporkan kepada Komisi, sedikitnya 28.3% (7,174/25,383) dilakukan ketika korban berada dalam penahanan. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa selama penahanan para korban sering kali rentan terhadap bentuk-bentuk penganiayaan fisik yang lain. Bagian ini menelusuri pola-pola dari jenis penganiayaan fisik nonfatal yang dilakukan selama masa penahanan dan yang dilakukan selama korban tidak ditahan.

165. Informasi yang dimiliki Komisi mengenai penahanan sering kali mengandung informasi lokasi dan/atau waktu yang kurang jelas. Secara khusus, 33,9% (20.334/60.047) dari pelanggaran nonfatal tidak memiliki informasi bulan dan tanggal terjadinya pelanggaran, sementara 52,9% (31.739/60.047) tidak memiliki informasi hari (tanggal) terjadinya pelanggaran. 2,3% (1.379/60.047) dari pelanggaran nonfatal tidak memiliki informasi subdistrik tempat terjadinya pelanggaran, sementara 31,2% (18.722/60.047) dari pelanggaran nonfatal tidak memiliki informasi *suco* tempat terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, analisis berikut ini mengenai penganiayaan fisik dan kaitannya dengan status korban sebagai tahanan dibatasi oleh kurangnya informasi mengenai tanggal dan lokasi dalam data yang dilaporkan.

166. Beberapa bentuk penganiayaan fisik dilaporkan lebih sering terjadi dalam penahanan daripada yang lainnya. Tabel Pelanggaran yang Tercatat dan Konteks Penahanannya, Berdasarkan Jenis Pelanggaran, 1974 – 1999 secara khusus menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilaporkan paling sering terjadi dalam masa-masa penahanan yang diketahui adalah penyiksaan (38,4%, 4.267/9.094), penganiayaan (33,2%, 27.998/9.094), dan pengancaman (21,3%, 634/9.094). Selanjutnya, penyiksaan dan penganiayaan lebih jarang dilaporkan di antara para korban yang tidak pernah mengalami penahanan: dari keseluruhan penyiksaan yang didokumentasi oleh Komisi, 16,4% (1.820/11.123) diderita oleh para korban yang tidak pernah mengalami penahanan. Dari tindak penganiayaan yang didokumentasi Komisi, 26,4% (2.227/8.436) dialami oleh korban-korban yang tidak pernah mengalami penahanan. Ini mengisyaratkan meningkatnya kerentanan para korban yang ada dalam penahanan terhadap penyiksaan dan penganiayaan.

167. Data statistik sendiri tidak dapat menjelaskan apakah kaitan antara penahanan dan penganiayaan fisik ini adalah bagian dari kebijakan resmi oleh para pelaku untuk menggabungkan penganiayaan fisik dengan penahanan sewenang-wenang, atau apakah korelasi ini mencerminkan perilaku oportunistis militer, polisi, dan pejabat lainnya. Akan tetapi, penelitian kualitatif dan historis Komisi cukup informatif dalam hal ini. Penelitian kualitatif Komisi telah mengidentifikasi bukti mengenai kebijakan dan praktik yang mendorong penggunaan penahanan dan cara-cara interogasi khusus (lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan).

Tabel 20: Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 - 1999									
	Korban ditahan saat terjadinya pelanggaran	% korban ditahan saat terjadinya pelanggaran	Korban ditahan tapi pada tanggal yang tak diketahui	% penahanan dengan tanggal tak diketahui	Korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran	% korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran	Korban tak pernah ditahan	% yang tak pernah ditahan	Total
Penyiksaan	4.267	38,4	4.569	41,1	1.820	16,4	467	4,2	11.123
Penganiayaan	2.798	33,2	3.061	36,3	2.227	26,4	350	4,1	8.436
	634	21,3	723	24,2	1.442	48,4	183	6,1	2.982
	166	7,7	851	39,5	1.049	48,6	91	4,2	2.157
Pelanggaran Berbasis Seksual	109	12,8	354	41,5	367	43,0	23	2,7	853
Pelanggaran Properti/ Ekonomi	313	6,6	810	17,1	3.355	70,9	257	5,4	4.735
Lain-lain	807	18,6	1.661	38,3	1.631	37,6	240	5,5	4.339
	9.094	100,0	12.029	100,0	11.891	100,0	1.611	100,0	34.625

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

168. Kasus-kasus yang didokumentasikan oleh Komisi menunjukkan perubahan dalam hubungan antara pelanggaran nonfatal dan penahanan seiring dengan masuknya konflik ke fase yang terakhir. Sebagaimana yang terlihat dalam Bagan Pelanggaran yang Tercatat dan Konteks Penahanannya, Berdasarkan Tahap, 1974 – 1999, 56.7% (5592/9855) dari pelanggaran nonfatal pada 1999 dilakukan terhadap korban yang tidak berada dalam penahanan dan tidak pernah ditahan sebelumnya. Pada 1999 proporsi pelanggaran nonfatal yang dilaporkan yang dilakukan di luar

tempat-tempat penahanan adalah lebih dari dua kali lipat proporsi pada dua fase sebelumnya. Dengan demikian, tampak bahwa dalam dua fase pertama dari konflik, penggunaan penahanan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pelanggaran nonfatal yang lain.*

Tabel 21: Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan tahap, 1974 - 1999									
	Korban ditahan saat terjadinya pelanggaran	% korban ditahan saat terjadinya pelanggaran	Korban ditahan tapi pada tanggal yang tak diketahui	% penahanan dengan tanggal tak diketahui	Korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran	% korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran	Korban tak pernah ditahan	% yang tak pernah ditahan	Total
Tahap 1 (1974 – 1983)	2.963	18,8	8.006	50,8	4.357	27,6	446	2,8	15.772
Tahap 2 (1984 – 1998)	3.407	37,9	3.011	33,5	1.942	21,6	638	7,1	8.998
Tahap 3 (1999)	2.724	27,6	1.012	10,3	5.592	56,7	527	5,3	9.855
	9.094	100,0	12.029	100,0	11.891	100,0	1.611	100,0	34.625

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

169. Dari pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan selama periode penahanan yang diketahui , 16.5% (505/9094) terjadi di Dili. Dengan demikian, dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain, proporsi yang cukup besar dari pelanggaran yang dilakukan dalam penahanan terjadi di Dili. Sementara 42.8% (695/1,623) dari pelanggaran di Liquiçá dilaporkan terjadi dalam masa-masa penahanan dan 41.5% (886/2,135) di Covalima, angka untuk Dili adalah 40.3% (1,504/3,731). Sementara itu, dari pelanggaran nonfatal yang dialami orang-orang di Oecussi dan Indonesia, masing-masing 76.0% (2,209/2897) dan 73.2% (390/533) dialami oleh korban-korban yang tidak pernah ditahan sebelumnya. Sehingga, distrik-distrik yang melaporkan proporsi penyiksaan dan penganiayaan yang relatif lebih tinggi, juga cenderung melaporkan lebih banyak pelanggaran selama penahanan.

* Sulit untuk membuat temuan yang tuntas mengenai skala relatif pelanggaran-pelanggaran nonfatal yang dilakukan dalam penahanan pada Fase 1 dan 2 dari konflik, mengingat 50,8% (8.006/15.772) dari kasus penahanan selama Fase 1 dan 33,5% (3.011/8.998) dari penahanan selama Fase 2 tidak memiliki informasi tanggal yang cukup jelas untuk dapat menentukan apakah penahanan-penahanan tersebut berhubungan dengan pelanggaran lain yang dialami korban

Tabel 22: Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 - 1999									
	Korban ditahan saat terjadinya pelanggaran	% korban ditahan saat terjadinya pelanggaran	Korban ditahan tapi pada tanggal yang tak diketahui	% penahanan dengan tanggal tak diketahui	Korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran	% korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran	Korban tak pernah ditahan	% yang tak pernah ditahan	Total
Lautém	455	19,7	1.307	56,6	479	20,8	67	2,9	2.308
Viqueque	401	13,0	1.371	44,4	1.245	40,4	68	2,2	3.085
Baucau	785	31,8	891	36,1	639	25,9	155	6,3	2.470
Manatuto	271	16,0	921	54,5	465	27,5	34	2,0	1.691
Manufahi	771	23,8	1.305	40,3	924	28,5	237	7,3	3.237
Aileu	477	26,6	867	48,3	412	23,0	38	2,1	1.794
Ermera	986	24,8	1.128	28,4	1.641	41,3	216	5,4	3.971
Liquiçá	695	42,8	448	27,6	405	25,0	75	4,6	1.623
Dili	1504	40,3	1.267	34,0	646	17,3	314	8,4	3.731
Ainaro	457	21,6	1.005	47,5	582	27,5	72	3,4	2.116
Covalima	886	41,5	401	18,8	729	34,1	119	5,6	2.135
Oecussi	366	12,6	249	8,6	2.201	76,0	81	2,8	2.897
Bobonaro	992	32,7	793	26,1	1.133	37,3	116	3,8	3.034
Indonesia	48	9,0	76	14,3	390	73,2	19	3,6	533
	9.094	100,0	12.029	100,0	11.891	100,0	1.611	100,0	34.625

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

170. Kasus penahanan sebagian besar dialami oleh laki-laki, yakni 85,6% (21.273/25.383) dari keseluruhan kasus. Dibandingkan korban perempuan, laki-laki dua kali lebih mungkin untuk mengalami pelanggaran lainnya selama masa penahanan. Seperti yang tampak pada Tabel Pelanggaran yang Tercatat dan Konteks Penahanannya, Berdasarkan Jenis Kelamin, 1974 – 1999, dari keseluruhan korban penahanan laki-laki, setidaknya 28,1% (8.323/29.599) mengalami pelanggaran nonfatal yang lain, dibandingkan dengan 14,8% (716/4.833) dari perempuan yang mengalami pelanggaran lain selama penahanan.

Tabel 23: Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis kelamin, 1974 - 1999									
	Korban ditahan saat terjadinya pelanggaran	% korban ditahan saat terjadinya pelanggaran	Korban ditahan tapi pada tanggal yang tak diketahui	% penahanan dengan tanggal tak diketahui	Korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran	% korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran	Korban tak pernah ditahan	% yang tak pernah ditahan	Total
Perempuan	716	14,8	1.671	34,6	2.304	47,7	142	2,9	4.833
Laki-laki	8.323	28,1	10.303	34,8	9.505	32,1	1.468	5,0	29.599
Tak diketahui	55	28,5	55	28,5	82	42,5	1	0,5	193
	9.094	100,0	12.029	100,0	11.891	100,0	1.611	100,0	34.625

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

171. Menurut data pelanggaran nonfatal yang didokumentasi oleh Komisi, orang-orang dari kelompok umur yang berbeda mengalami tingkat penganiayaan yang berbeda selama dalam penahanan. Secara khusus, dari korban-korban yang menderita pelanggaran nonfatal yang diketahui selama masa penahanan, 55,5% (5.044/9.094) adalah orang dewasa yang muda atau berusia paruhbaya (yakni, orang-orang antara 15 sampai 49). Anak-anak dan orang-orang yang lebih tua ditahan jauh lebih jarang, dan jika ditahan, mereka mengalami tingkat penganiayaan yang jauh lebih rendah.

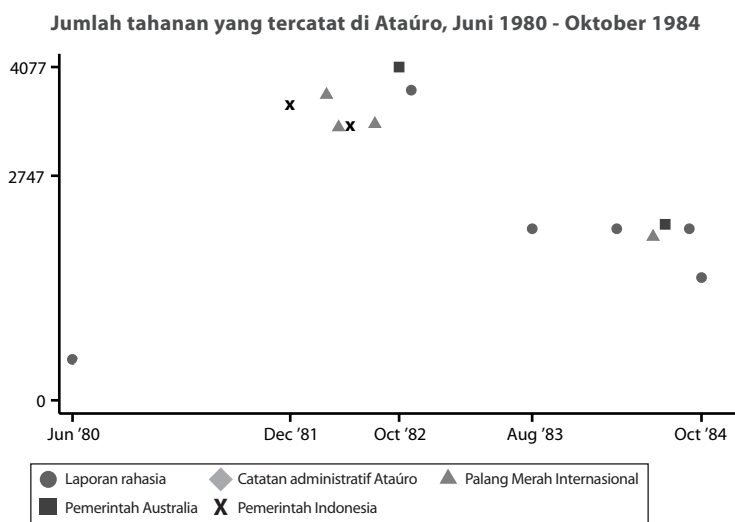
Tabel 24: Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan usia korban, 1974 - 1999									
	Korban ditahan saat terjadinya pelanggaran	% korban ditahan saat terjadinya pelanggaran	Korban ditahan tapi pada tanggal yang tak diketahui	% penahanan dengan tanggal tak diketahui	Korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran	% korban ditahan tapi bukan saat terjadinya pelanggaran	Korban tak pernah ditahan	% yang tak pernah ditahan	Total
0-4	89	15,4	202	34,9	277	47,8	11	1,9	579
5-9	20	10,9	45	24,6	113	61,7	5	2,7	183
10-14	62	11,7	219	41,2	241	45,4	9	1,7	531
15-19	384	26,4	564	38,7	451	31,0	58	4,0	1.457
20-24	942	32,4	1.070	36,8	725	24,9	171	5,9	2.908
25-29	1.080	34,4	924	29,4	960	30,6	174	5,5	3.138
30-34	1.058	31,8	1.049	31,5	1.049	31,5	173	5,2	3.329

35-39	719	28,2	789	30,9	889	34,8	154	6,0	2.551
40-44	564	26,4	704	33,0	755	35,4	111	5,2	2.134
45-49	315	23,0	512	37,4	450	32,9	91	6,7	1.368
50-54	235	19,7	513	43,1	402	33,8	40	3,4	1.190
55-59	82	17,4	176	37,3	188	39,8	26	5,5	472
60-64	93	20,9	188	42,2	147	33,0	17	3,8	445
65-69	32	17,7	78	43,1	67	37,0	4	2,2	181
70-74	18	9,7	95	51,4	64	34,6	8	4,3	185
75-79	12	19,7	23	37,7	24	39,3	2	3,3	61
80+	12	18,5	23	35,4	29	44,6	1	1,5	65
	3.377	24,4	4.855	35,1	5.060	36,5	556	4,0	13.848
	9.094	100,0	12.029	100,0	11.891	100,0	1.611	100,0	34.625

Sumber: Basis Data Pernyataan Naratif yang Diberikan kepada CAVR

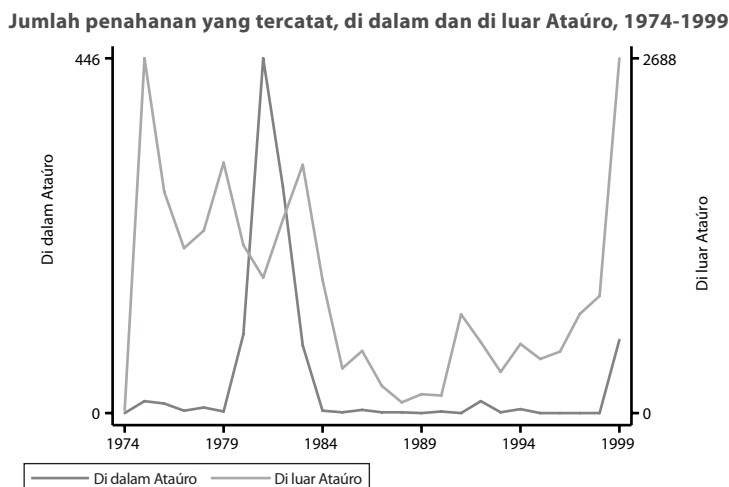
Pola-pola statistik yang dilaporkan tentang penahanan di Ataúro

172. Sementara penahanan sewenang-wenang digunakan sepanjang periode konflik di Timor-Leste, penahanan di Pulau Ataúro dilaporkan kebanyakan terjadi antara 1980 dan 1984. Hal ini sesuai dengan informasi yang dikumpulkan oleh Komisi secara langsung melalui proses pengambilan pernyataan dan dalam laporan-laporan sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber oleh Amnesty International. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara kedua sumber data ini. Sumber-sumber yang dikumpulkan oleh Amnesty International mengisyaratkan bahwa populasi tahanan di Ataúro meningkat dari sekitar 500 pada pertengahan 1980 menjadi kira-kira 4.000 pada September 1982 kemudian menurun menjadi sekitar 1.500 pada Oktober 1984, seperti yang tampak pada Bagan Jumlah Tahanan yang Tercatat di Ataúro, Juni 1980 – Oktober 1984.



Referensi: Amnesty International, *East Timor: Violations of Human Rights* (1985)

173. Menurut data Komisi, penahanan yang dilaporkan di Ataúro memuncak dengan 446 tahanan pada 1982, seperti yang terlihat pada Bagan Jumlah Tahanan yang Tercatat di Ataúro, Juni 1980 – Oktober 1984. Mengingat data Amnesty International dikumpulkan dari banyak cerita saksi mata, termasuk Komite Palang Merah Internasional, pejabat pemerintah Australia, dan dari catatan administrasi Indonesia, data Komisi yang dilaporkan kemungkinan berada jauh di bawah angka penahanan sebenarnya di Ataúro. Akan tetapi, baik data Amnesty International maupun data Komisi memastikan bahwa sejumlah besar orang pernah ditahan di Pulau Ataúro pada awal 1980-an.



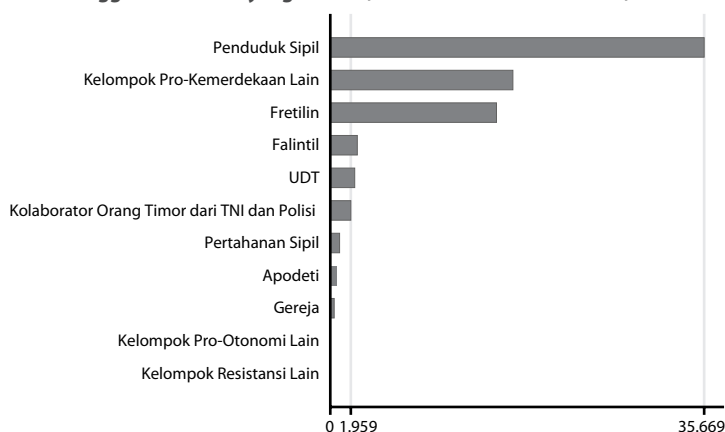
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Pola pelanggaran menurut afiliasi politik korban yang dilaporkan

174. Sejumlah hipotesis yang dibahas oleh Komisi mempertimbangkan apakah kampanye sistematis dan bersasaran didasarkan pada afiliasi politik korban. Bagian ini akan menerangkan cakupan dan pola pelanggaran yang dilaporkan terhadap penduduk sipil, petempur bersenjata Gerakan Resistansi, serta aktivis politik.

175. 88,7% (68.943/77.748) dari pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi adalah pelanggaran terhadap penduduk sipil, termasuk penduduk sipil yang tidak diketahui apakah mereka mempunyai afiliasi politik, ataupun penduduk sipil yang secara formal memang anggota dari suatu kelompok prokemerdekaan atau partai politik, seperti yang terlihat pada Bagan Pelanggaran Nonfatal yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1974 – 1999.

Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974-1999



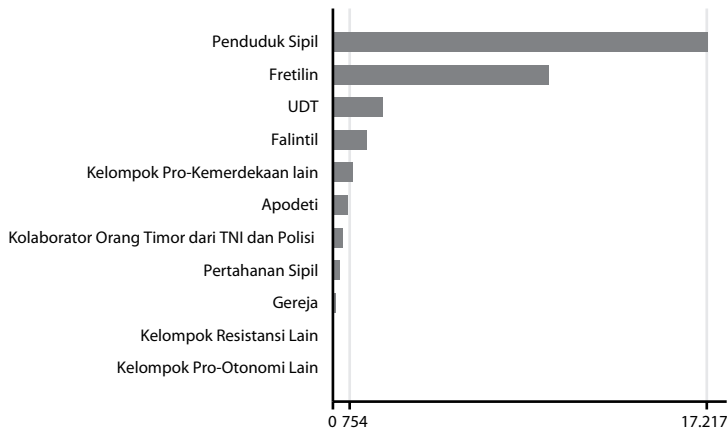
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

176. Pada waktu gerakan prokemerdekaan berkembang makin luas pada dasawarsa 1990, jumlah penduduk sipil yang berafiliasi prokemerdekaan yang mengalami pelanggaran nonfatal juga meningkat, seperti yang dapat kita lihat pada Bagan Pelanggaran Nonfatal yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1974 – 1979; Pelanggaran Nonfatal yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1980 – 1989; Pelanggaran Nonfatal yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1990 – 1998; dan Pelanggaran Nonfatal yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1999.*

* Namun, perlu dicatat bahwa hanya 87 pernyataan yang dikumpulkan di kamp pengungsian Timor Barat, dan proses sosialisasi Komisi berdasarkan distrik sering terjadi setelah bekerjasama dengan pejabat lokal. Sebagai akibatnya, orang-orang yang mempunyai afiliasi politik pro-otonomi mungkin saja kurang terwakili pada proses pengambilan pernyataan Komisi.

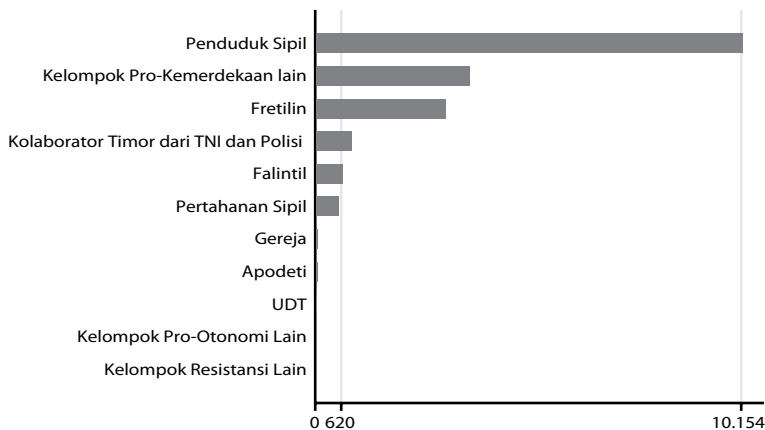
Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974-1979



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

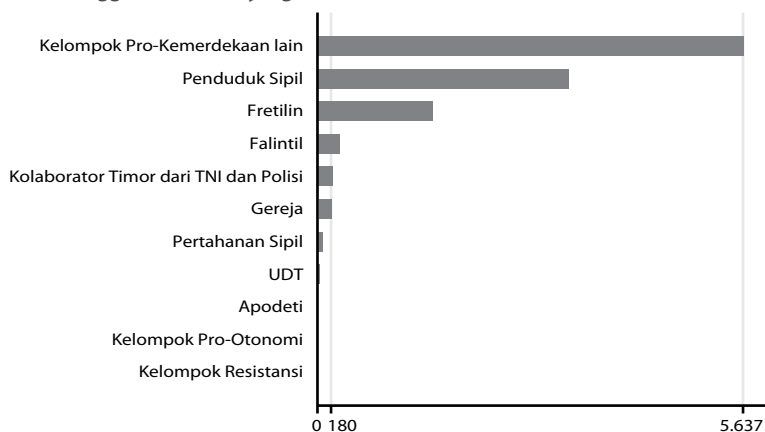
Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1980-1989



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

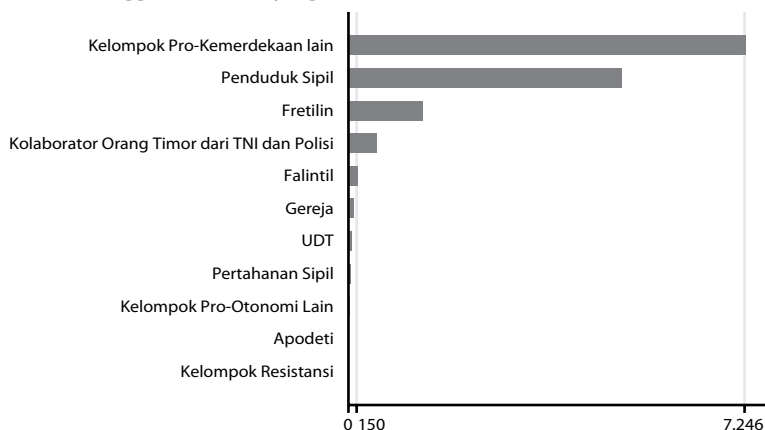
Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1990-1998



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

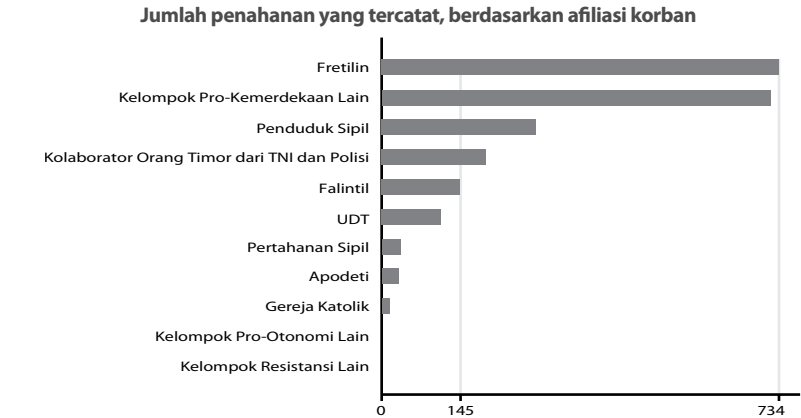
Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1999



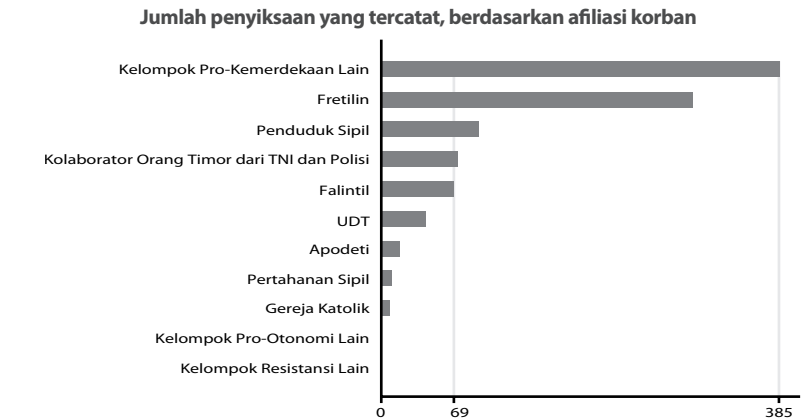
Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

177. Untuk jenis pelanggaran nonfatal utama (penahanan, penyiksaan, penganiayaan, kerja paksa, ancaman, dan pelanggaran hak milik/ekonomi), tidak ada perbedaan penting dalam jumlah yang tercatat mengenai korban dengan afiliasi politik/sosial, seperti yang tampak pada Bagan Jumlah Penahanan yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban; Jumlah Penyiksaan yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban; Tindakan Penganiayaan yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1974 – 1999; dan Tindakan Pelanggaran Properti/Ekonomi yang Tercatat, Berdasarkan Afiliasi Korban, 1974 – 1999: penduduk yang tidak diketahui afiliasi politiknya terhitung antara 40% sampai 48% dari korban yang tercatat, sebaliknya orang-orang yang berafiliasi prokemerdekaan terhitung antara 43% sampai 55% dari pelanggaran yang tercatat. Untuk pelanggaran seksual, penduduk sipil yang tidak diketahui afiliasi politiknya berjumlah sedikit lebih tinggi (56%, 441/770, dari pelanggaran seksual) daripada penduduk sipil yang diketahui ada hubungannya dengan kelompok prokemerdekaan dan partai-partai (43,1%, 427/770).

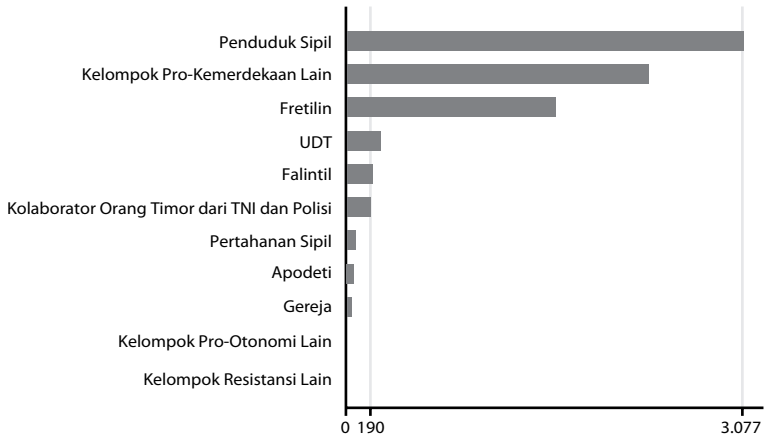


Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

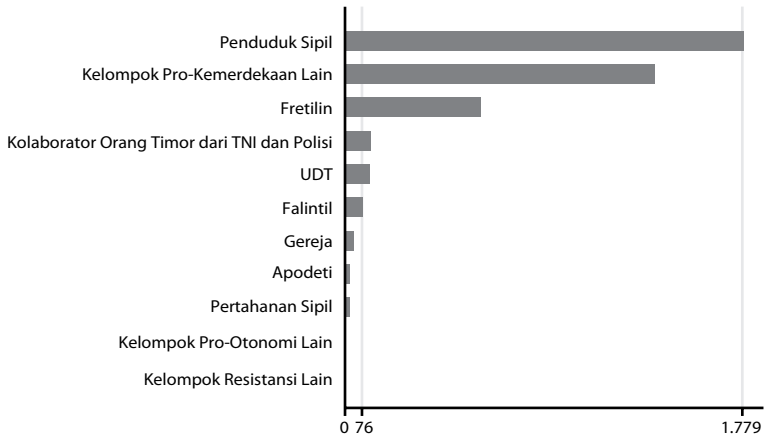
Tindak penganiayaan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

Tindakan pelanggaran properti/ekonomi yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: Beberapa pelanggaran mungkin dihitung lebih daripada satu kali karena pertanggungjawaban bisa dibagi di antara para pelanggar

Studi kasus Mau Chiga: analisis kuantitatif pelanggaran yang terjadi selama operasi menumpas Resistansi

Pendahuluan

178. Bagian ini menyajikan sebuah studi kasus secara terperinci mengenai sifat dan pola pelanggaran yang dialami oleh penduduk Mau Chiga (Hatu Builico, Ainaro) pada awal 1980-an. Kasus studi ini dibuat dalam bentuk analisis statistik deskriptif yang didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh dua orang pemimpin Desa Mau Chiga.

Latar belakang usaha pendokumentasian

179. Selama 18 tahun pemimpin-pemimpin desa Mau Chiga mencatat pemindahan, penahanan, dan pembunuhan yang terjadi karena operasi penumpasan Tentara Nasional Indonesia sehubungan dengan serangan yang dilakukan oleh Gerakan Resistansi di wilayah tersebut pada Agustus 1982. Proyek Pendokumentasian Mau Chiga dirampungkan pada Agustus 2004 ketika para pemimpin desa menyerahkan daftar tabel yang disusun dari wawancara naratif mereka kepada Komisi saat acara dengar pendapat Komisi dengan masyarakat di Mau Chiga.

180. Tujuan proyek tersebut adalah mengembangkan pendataan sejarah yang teliti atas lingkup, pola, kecenderungan, dan sifat pelanggaran yang dialami oleh anggota masyarakat Mau Chiga pada awal 1980-an. Para deponen diundang dan dianjurkan untuk berbicara mengenai pemindahan, penangkapan, atau pelanggaran fatal yang dialami oleh siapa saja yang mereka kenal yang berhubungan dengan pemberontakan pada Agustus 1982 (*levantamento*).

Keterbatasan data

181. Data yang mendasari studi kasus ini dikumpulkan melalui sampel nonacak (sampel kemudahan) dari orang-orang yang ingin melaporkan dan membagi pengalaman mereka mengenai pelanggaran hak asasi manusia (yaitu pemindahan, penahanan dan penangkapan, dan kematian yang berkaitan dengan konflik tersebut) yang ada hubungannya dengan pemberontakan Agustus 1982 dan penumpasan gerakan Resistansi. Abilio dos Santos dan Olga da Silva mengumpulkan data ini dalam dua tahapan yang terpisah.^{*} Tahap pertama pengumpulan data, dari Februari 1986 sampai dengan April 2003, Abilio dos Santos dan Olga da Silva secara berkala melakukan wawancara naratif di berbagai kampung (*aldeia*) di Desa Mau Chiga. Selama melakukan pengumpulan dan pendokumentasian data, kedua orang itu

^{*} Abilio dos Santos adalah sekretaris Desa Mau Chiga. Olga da Silva adalah guru sekolah dasar di Mau Chiga. Komisi memilih untuk mengikuti ejaan resmi RDTL 'Mau Chiga', meskipun banyak orang juga mengenali desa ini sebagai 'Mauxiga'.

mengunjungi *aldeia-aldeia* berikut: Mau Chiga, Hatuquero, Goulora, Leotelo-1, dan Leotelo-2. Deponen-deponen diseleksi berdasarkan jaringan sosial para pewawancara dan referensi orang yang diwawancarai. Tahap kedua pengumpulan data, dari Mei 2003 sampai Juli 2004, terdiri atas penyusunan daftar korban penahanan, pemindahan, dan kematian yang berkaitan dengan konflik. Selama tahap kedua ini, sejumlah responden yang pernah memberikan keterangan pada tahap pertama pengumpulan data, diwawancarai kembali untuk memperjelas secara lebih mendalam aspek yang kurang jelas dalam keterangan naratif yang sudah ada.

182. Proyek ini membatasi keterangan yang dikumpulkan pada beberapa pelanggaran spesifik, yaitu penahanan sewenang-wenang, pemindahan, dan kematian yang berkaitan dengan konflik yang secara langsung dapat dihubungkan pada peristiwa 20 Agustus 1982 dan penumpasan yang terjadi berikutnya. Oleh sebab itu proyek ini tidak mendokumentasikan pelanggaran dalam bentuk lain, seperti misalnya penghancuran milik pribadi dan kejahatan seksual. Yang juga tidak didokumentasikan adalah pelanggaran yang terkait dengan peristiwa lain yang tidak berhubungan dengan pemberontakan 20 Agustus.

183. Proyek ini memberikan perhatian khusus untuk menghindari masalah terjadinya laporan ganda tentang korban yang sama yang disampaikan deponen pada tahap berbeda dalam proses dokumentasi. Pertama, kelompok pengumpul data secara berkala memeriksa seluruh daftar untuk menghindari adanya laporan ganda tentang korban. Kedua, sesudah memasukkan data ke dalam *database* elektronik, kelompok proyek tersebut melakukan tes analitis dan pemeriksaan lewat komputer dalam upaya menentukan nama mana yang ada mungkin merupakan laporan ganda tentang korban yang sama.*

Latar belakang historis

184. Pada 6 Juli 1982 anggota-anggota Falintil dan gerakan klandestin setempat mulai merencanakan suatu rangkaian penyerangan pada pos militer Indonesia di sekitar Mau Chiga. Seorang informan membocorkan rencana tersebut kepada tentara Indonesia. Pada 10 Juli tentara Indonesia dan Hansip dari Hatu Builico mulai melaksanakan penggeledahan dari rumah ke rumah di Goulora, Mau Chiga, dan Hatuquero. Mereka menahan lebih dari 30 orang, termasuk 13 orang yang menghadiri pertemuan 6 Juli. Yang ditahan langsung dibawa ke markas besar wilayah (Kodim) di Kota Ainaro. Pada hari-hari berikutnya, tentara Indonesia menahan lebih banyak orang. Mereka membawa tahanan tersebut ke markas subdistrik (Koramil) di Hatu Builico.

185. Meskipun sebagian orang telah ditangkap, pada 20 Agustus 1982, sekitar pukul 04.30, Falintil bersama beberapa orang dari Dare dan Mau Chiga menyerbu beberapa pos ABRI di sekitar Mau Chiga, termasuk Koramil di Dare. Pada hari yang sama, tentara ABRI dan Hansip dari pos yang diserang dan juga pos lain di wilayah tersebut mengadakan serangan balasan. Pada hari-hari berikutnya tambahan pasukan ABRI

* Proses pemeriksaan ini menemukan tujuh laporan ganda mengenai pelanggaran fatal.

dari luar wilayah tersebut, termasuk satuan-satuan dari Batalion 745 dan 744, disebar di sekitar Mau Chiga. Antara 20 Agustus dan 24 Agustus pasukan tentara Indonesia dan Hansip menghancurkan dan menjarah milik pribadi masyarakat. Sejumlah besar penduduk Desa Mau Chiga dipaksa pindah atau melarikan diri ke luar desa karena takut akan keselamatan pribadi mereka. Tentara militer Indonesia memindahkan penduduk dengan paksa ke beberapa lokasi, termasuk Pulau Ataúro (Dili), Dotik (Alas, Manufahi), dan Dare (Hatu Builico, Ainaro).

Analisis statistik deskriptif pelanggaran yang dilaporkan pada Proyek Dokumentasi Mau Chiga

Laporan pemindahan dan penangkapan yang diderita penduduk Mau Chiga

Profil demografis para korban pemindahan dan penangkapan

186. Proyek ini mendokumentasikan 1.803 tindak pemindahan yang terjadi pada penduduk Mau Chiga antara Juli 1982 dan Januari 1986. 1.803 pemindahan ini dialami oleh 464 orang penduduk Mau Chiga: 48,7% (226/464) dari mereka adalah wanita dan 38,8% (180/464) adalah anak-anak.*

187. Ke-464 korban pemindahan dan penangkapan sama dengan kira-kira 20,4% (464/2.269) dari jumlah total penduduk Desa Mau Chiga.† Jadi, hasil temuan proyek ini sesuai dengan hipotesis bahwa pemindahan di Mau Chiga pada 1980-an dilakukan secara meluas.

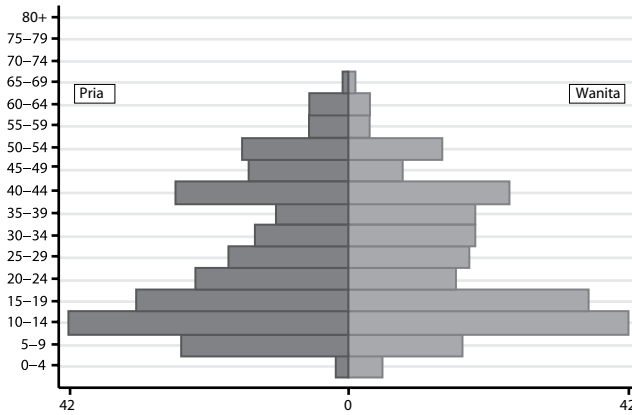
188. Dari korban pemindahan yang dilaporkan, 80,0% (371/464) di antaranya pada awalnya ditahan dan dipindahkan bersama keluarga mereka. Sisanya, yang 20% (93/464), pada awalnya ditahan sendiri (tidak bersama keluarganya).‡ Seperti yang tampak pada Bagan <gMauChigaASD1100.pdf>, 41,2% (191/464) pemindahan dialami oleh penduduk yang berusia antara 10 dan 24. Seperti yang dulu dan kini masih tetap terjadi pada kasus di sebagian besar Timor-Leste, penduduk Mau Chiga kebanyakan terdiri atas orang yang berusia di bawah 25 tahun. Oleh sebab itu, hasil temuan Proyek Dokumentasi Mau Chiga sesuai dengan hipotesis bahwa tentara militer Indonesia secara aktif berusaha memusnahkan dasar sosial dan operasional gerakan Resistansi di Mau Chiga dengan cara pemindahan paksa masyarakat umum (termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua).

* Komisi menggunakan standar yang diakui internasional yang mendefinisikan anak-anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun (lihat Artikel 1 dari Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (UN Doc A/44/49 (1989)), yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/25 20 November 1989 (resmi diberlakukan pada 2 September 1990.)

† Jumlah penduduk Mau Chiga berdasarkan Survei *Suco* Timor-Leste 2001.

‡ Orang yang dipindahkan secara individu (perorangan) dipindahkan dengan cara ini. Mereka ditangkap oleh tentara militer Indonesia ketika mereka sedang sendirian, biasanya orang itu sedang mengerjakan ladang taninya, atau di tempat lain yang jauh dari tempat tinggalnya.

Jumlah korban pemindahan yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



Sumber: Basis data pernyataan naratif yang diberikan kepada CAVR

Catatan: 0,4% data tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

Pertanggungjawaban pemindahan dan tindak penangkapan dalam skala besar terhadap penduduk Mau Chiga

189. Keseluruhan tindakan pemindahan dari 1.803 orang yang dilaporkan ini, yang didokumentasikan oleh Proyek Dokumentasi Mau Chiga, disangkutpautkan dengan militer Indonesia. Dalam beberapa kasus khusus, deponen melaporkan keterlibatan satuan tertentu dari tentara militer Indonesia atau kekuatan pertahanan sipil. Hansip Hatu Builico dilaporkan telah menjalankan 31,7% (571/1.803) dari tindak pemindahan yang menyangkut penduduk Mau Chiga. Pada peristiwa pemindahan yang sama, dilaporkan pada Proyek Dokumentasi Mau Chiga bahwa Hansip Hatu Builico bekerjasama dan bertindak dengan pengarah dari Komando Resort Militer (Korem) Dili, Komando Distrik Militer (Kodim) Ainaro dan Komando Rayon Militer (Koramil) Hatu Builico. Keseluruhan tindakan ini terjadi baik 7 Juli 1982, 29 Agustus 1982, maupun 30 Agustus 1982.

Pola tindak pemindahan dan penangkapan lintas waktu

190. Tindak pemindahan yang dilaporkan dipusatkan dalam dua periode utama, yaitu: kuartal ketiga 1982 ketika 51,0% (919/1.803) pemindahan itu dilaporkan, dan kuartal keempat 1985 ketika 40,6% (732/1.803) pemindahan itu dilaporkan. Pada kedua masa inilah sebagian besar penduduk Mau Chiga yang diasingkan ke Atauro dipindahkan dari Mau Chiga ke Atauro dan dikembalikan lagi ke Mau Chiga dari Atauro. Pada kedua periode ini, orang-orang pertama dipindahkan sementara ke lokasi transit untuk waktu singkat antara satu hari sampai dengan beberapa minggu.

Pola tindak pemindahan dan penangkapan lintas ruang geografis dan lamanya penahanan

191. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini, masa lamanya penahanan yang dilaporkan pada proyek dokumentasi sangat bervariasi, antara satu hari sampai dengan 1.005 hari. Sekitar 41,0% (739/1.803) dari keseluruhan yang dilaporkan berlangsung selama sepuluh hari atau kurang, 22,1% (399/1.803) dari peristiwa pemindahan berlangsung antara 101 dan 300 hari, dan 20% (368/1.803) antara 701 dan 900 hari. Data yang dikumpulkan oleh Proyek Dokumentasi Mau Chiga sesuai dengan hipotesis bahwa meskipun penduduk Mau Chiga dipindah-pindahkan beberapa kali (setiap orang rata-rata dipindahkan 3,9 kali), sekitar separuh dari pemindahan ini berlangsung dalam waktu yang singkat (dalam waktu kurang dari seminggu), sedangkan separuhnya lagi pada dasarnya lebih lama (bervariasi antara tiga sampai dengan 33 bulan).

Tabel 25: Tabel penyebaran lamanya periode dari peristiwa pemindahan penduduk Mau Chiga, 1982 - 1985		
Lama	Jumlah	% (Persentasi)
1 hari	192	10,7
2-10 hari	547	30,3
11-100 hari	113	6,3
101 – 300 hari	399	22,1
301-500 hari	87	4,8
501-700 hari	8	0,4
701-900 hari	368	20,4
901-1005 hari	87	4,8
Tidak diketahui	2	0.1
Total	1.803	100,0

Sumber: Data yang dikumpulkan oleh sekretaris Desa Mau Chiga.

192. Tentara Indonesia menahan penduduk Mau Chiga dalam jangka panjang di beberapa lokasi, termasuk Pulau Ataúro, Dotik, Kota Ainaro, dan Dare. 79,3% (368/464) penduduk Mau Chiga yang didokumentasikan oleh Proyek Dokumentasi Mau Chiga telah ditahan dalam jangka panjang di Ataúro.* Kelompok-kelompok lebih kecil penduduk Mau Chiga dilaporkan ditahan dalam jangka panjang di Dotik

* Tentara Indonesia mengirim 360 dari 368 penduduk Mauchiga ini ke Ataúro pada 30 Agustus 1982. Delapan orang sisanya dikirim ke Ataúro pada 5 September 1982 setelah diinterogasi selama satu minggu di Lesuhati.

dan Kota Ainaro: 80 orang ditahan selama dua tahun dan enam bulan di Dotik mulai November 1982, dan tujuh orang ditahan selama dua tahun dan sembilan bulan di Kota Ainaro mulai April 1983. Wawancara lanjutan yang diadakan oleh Komisi dengan penduduk Mau Chiga pada 2005 di Mau Chiga menunjukkan bahwa orang-orang yang ditahan dalam jangka panjang di Dotik dan Ainaro ditahan di sana karena Ataúro sudah terlalu penuh.*

193. Pola umum yang dilaporkan tentang pemindahan ke dan dari lokasi penahanan jangka panjang bagi penduduk Mau Chiga adalah sebagai berikut: korban biasanya ditangkap dan ditawan di Mau Chiga dan kemudian dibawa ke berbagai lokasi yang tidak jauh letaknya, tempat mereka biasanya ditahan selama satu sampai dengan sepuluh hari. Karena lokasi ini biasanya merupakan lokasi transit sementara menuju ke pusat penahanan jangka panjang atau kembali ke Mau Chiga, periode penahanan mereka biasanya merupakan rangkaian penahanan singkat. Tempat-tempat orang ditawan untuk periode pendek ini adalah Kota Ainaro, Bonuk (Hatu Udo, Ainaro), Dare (Hatu Builico, Ainaro), Lesuhati (Hatu Builico, Ainaro), Same (Manufahi), dan penjara Comarca di Dili. Yang lainnya ditawan di lokasi lain seperti Dotik, Kota Ainaro, dan Dare, sebelum atau sesudah periode penahanan jangka panjang mereka. Penduduk Mau Chiga juga ditawan untuk beberapa bulan di Dare, Dotik, Same, Kota Ainaro, dan Bonuk dalam perjalanan menuju atau dari lokasi-lokasi penahanan jangka panjang mereka.

Tabel 26: Tabulasi silang lamanya periode tindak pemindahan penduduk Mau Chiga menurut lokasinya, 1982 – 1985										
	1 hari	2 – 10 hari	11-100 hari	101-300 hari	301-500 hari	501-700 hari	701-900 hari	901-1005 hari	Tidak diketahui	Total
Ainaro	2	0	16	22	0	0	0	7	0	47
Ataúro	0	0	0	0	0	8	368	0	1	377
Bonuk	0	355	22	0	0	0	0	0	0	377
Comarca	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Dare	172	0	0	377	80	0	0	0	1	630
Dotik	0	0	6	0	7	0	0	80	0	93
Lesuhati	1	182	0	0	0	0	0	0	0	183
Same	4	10	69	0	0	0	0	0	0	83
Total	192	547	113	399	87	8	368	87	2	1.803

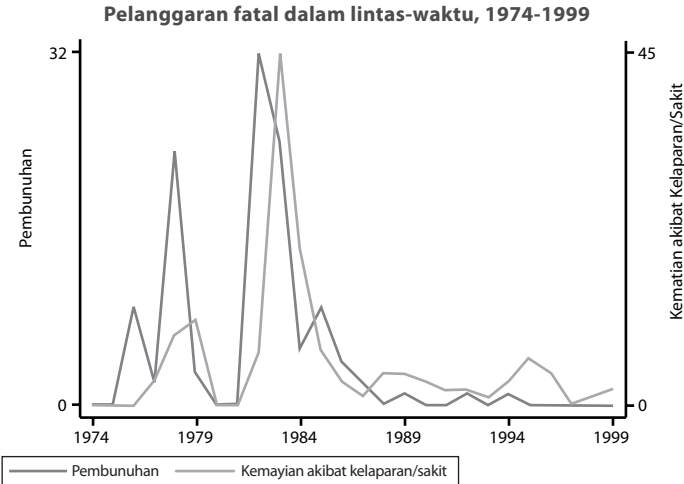
* Wawancara CAVR dengan Olga da Silva, Abilio dos Santos, Xavier do Amaral dan António Pires, di Mauchiga, 16 April 2005.

194. Data yang dikumpulkan Proyek Dokumentasi Mau Chiga sesuai dengan hipotesis bahwa di Ataúro dan di Dotik dan Kota Ainaro tentara Indonesia menggunakan penahanan jangka panjang terhadap para pendukung dan yang dicurigai mendukung gerakan Resistansi, sebagai suatu strategi untuk melumpuhkan dasar sosial dan dukungan operasional gerakan Resistansi di Mau Chiga. Data ini juga memperlihatkan bahwa Penduduk Mau Chiga mengalami serangkaian pemindahan dan penahanan sebelum dan sesudah masa penahanan jangka panjang mereka di Ataúro atau di Dotik dan di Kota Ainaro.

Pelanggaran fatal yang diderita Penduduk Mau Chiga

Distribusi pelanggaran fatal lintas waktu dan penyebab kematian yang dilaporkan yang dialami penduduk Mau Chiga

195. Proyek Dokumentasi Mau Chiga mendokumentasikan 262 kematian penduduk Mau Chiga yang berkaitan dengan konflik selama periode acuan Komisi: 44,7% (117/262) dari jumlah ini dibunuh, dan sisanya 55,3% (145/262) mati karena sakit atau kelaparan. Bagan Pelanggaran Fatal dalam Lintas Waktu, 1974 – 1999, menunjukkan bahwa 68,3% (179/262) dari pelanggaran fatal ini terjadi pada periode awal invasi dan pendudukan tentara Indonesia antara 1978 dan 1984. Selanjutnya, pola-pola pembunuhan dan kematian yang berhubungan dengan penyakit/kelaparan penduduk Mau Chiga berkorelasi secara positif.* Jadi data yang dikumpulkan Proyek Dokumentasi Mau Chiga sesuai dengan hipotesis bahwa pembunuhan dan kematian karena penyakit/kelaparan di Mau Chiga yang berkaitan dengan konflik sebagian besar terjadi pada waktu adanya operasi balasan terhadap gerakan Resistansi oleh tentara militer Indonesia.



Sumber: Data yang dikumpulkan oleh Sekretaris Desa Mau Chiga

* Koefisien korelasi antara kedua rangkaian ini adalah 0,57.

196. Meskipun pola pembunuhan dan kematian karena penyakit/kelaparan berkorelasi lintas waktu, ada beberapa perbedaan menonjol antara kedua kejadian itu. Pembunuhan yang terdokumentasi terpusat sebagian besar pada 1978 dan 1982 – 1983 (dengan 19,7% [23/117] yang terjadi pada 1978 dan 47,9% [56/117] pada 1982 – 1983), sedangkan 44,8% (65/145) kematian karena penyakit/kelaparan terpusat pada 1983 – 1984 ketika penduduk Mau Chiga mengalami deportasi massal dari kediaman mereka.

Pola pertanggungjawaban yang diterakan untuk pelanggaran fatal yang dilaporkan terjadi pada Penduduk Mau Chiga

197. Dari seluruh pembunuhan yang didokumentasikan oleh Proyek Dokumentasi Mau Chiga, 83,8% (98/117) dilaporkan merupakan tanggung jawab sepenuhnya tentara Indonesia, 6,0% (7/117) merupakan tanggung jawab sepenuhnya pasukan pembantu mereka asal Timor-Leste, dan 10,3% (12/117) tidak dilaporkan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Tidak ada laporan mengenai pembunuhan yang dilakukan bersama antara tentara Indonesia dan pasukan pembantu asal Timor-Leste, juga tidak ada laporan mengenai adanya pembunuhan yang dilakukan oleh perorangan yang terkait dengan gerakan Resistansi. Pola pertanggungjawaban terkait ini rupanya membedakan Mau Chiga dari bagian lain di Timor-Leste, di mana sejumlah besar pembunuhan merupakan tindakan bersama antara pasukan tentara Indonesia dengan pasukan pembantu mereka asal Timor-Leste (lihat di atas).

198. Dari pembunuhan-pembunuhan yang terdokumentasi terhadap penduduk Mau Chiga yang dikaitkan dengan tentara Indonesia, 66,3% (65/98) diderita oleh orang yang ada hubungannya dengan gerakan Resistansi, dan sisanya yang 33,7% (33/98) diderita oleh penduduk sipil.

Pola pelanggaran fatal terhadap penduduk Mau Chiga menurut afiliasi politik korban

199. Penyebaran pembunuhan dan kematian karena penyakit/kelaparan yang terdokumentasi sangat bervariasi menurut afiliasi politik para korban. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini, 64,1% (75/117) pembunuhan dilaporkan merupakan pembunuhan terhadap orang yang secara formal berkaitan dengan gerakan Resistansi. Sebaliknya, seluruh orang (kecuali satu) yang mati karena penyakit atau kelaparan adalah penduduk sipil tak bersenjata. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa meskipun pembunuhan terutama disasarkan pada anggota gerakan Resistansi dan anggota klandestin, tentara Indonesia dan pembantu-pembantu mereka membunuh sejumlah besar penduduk sipil selama berlangsungnya operasi penumpasan gerakan Resistansi.

Tabel 27: Tabel penyebaran pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik korban, 1974 - 1999				
Afiliasi korban	Pembunuhan		Kematian karena sakit/kelaparan	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Penduduk sipil tak bersenjata	42	35,9	144	99,3
Anggota Gerakan Resistansi/ Klandestin	75	64,1	1	0,7
Total	117	100,0	145	100,0

Sumber: Data yang dikumpulkan oleh sekretaris Desa Mau Chiga.

200. Penyebaran geografis pembunuhan penduduk Mau Chiga yang dilaporkan berbeda dengan penyebaran geografis kematian karena kelaparan dan penyakit. Seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini, kematian yang berhubungan dengan penyakit/kelaparan hampir selalu terjadi di kecamatan-kecamatan Kota Ainaro (Ainaro), Alas (Manufahi), dan Atauro (Dili), sebaliknya, pembunuhan yang dilaporkan sebagian besar terjadi di Kota Ainaro (Ainaro), Alas (Manufahi), dan Same (Manufahi).

Tabel 28: Penyebaran pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik dan lokasi geografis, 1974 – 1999						
Kecamatan di mana pelanggaran terjadi	Pembunuhan		Kematian karena sakit/ kelaparan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Ainaro, Ainaro	45	38,5	43	29,7	88	33,6
Maubisse, Ainaro	4	3,4	0	0	4	1,5
Bobonaro, Bobonaro	1	0,9	0	0	1	0,4
Alas, Manufahi	31	26,5	47	32,4	78	29,8
Fatuberliu, Manufahi	4	3,4	0	0	4	1,5
Same, Manufahi	31	26,5	0	0	31	11,8
Laleia, Manatuto	1	0,9	0	0	1	0,4
Atauro, Dili	0	0	55	37,9	55	21,0
Total	117	100	145	100	262	100

Sumber: Data yang dikumpulkan oleh sekretaris Desa Mau Chiga.

Pola pelanggaran-pelanggaran fatal terhadap penduduk Mau Chiga yang dilaporkan menurut usia dan jenis kelamin korban

201. Seperti kasus pembunuhan lainnya di seluruh Timor-Leste, sebagian besar korban pembunuhan di Mau Chiga yang dilaporkan kepada Proyek Dokumentasi Mau Chiga adalah laki-laki (92,3% [108/117] pembunuhan yang dilaporkan adalah terhadap laki-laki dan sisanya yang 7,7% [9/117] adalah perempuan). Kalau kita beralih dari hitungan pelanggaran sederhana ke hitungan pelanggaran berbasis penduduk, terlihat bahwa, secara rata-rata, relatif terhadap persentase penduduk Mau Chiga, angka berbasis penduduk menunjukkan laki-laki yang terbunuh sepuluh kali lebih tinggi. Sembilan puluh lima laki-laki per 1.000 dilaporkan terbunuh selama periode acuan Komisi, dibandingkan dengan delapan perempuan per 1.000.*

202. 41,0% (48/117) pembunuhan yang terdokumentasi adalah pembunuhan terhadap laki-laki muda berusia antara 15 dan 29. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa sebagai bagian dari strategi operasi balasan terhadap Gerakan Resistansi, tentara Indonesia mengarah pada laki-laki muda dalam usia dinas militer.

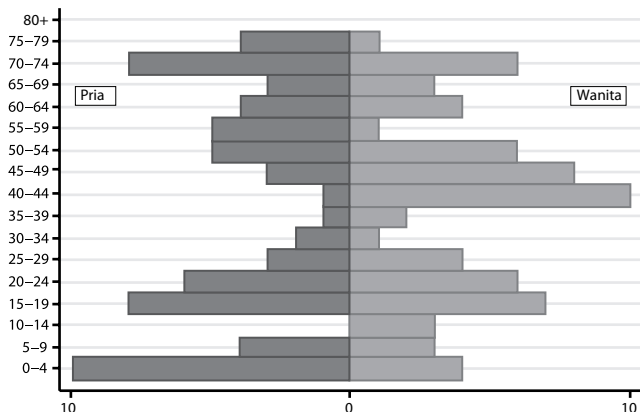
203. Sebaliknya penyebaran menurut jenis kelamin pada kematian karena penyakit dan kelaparan terlihat lebih merata: 50,3% (73/117) adalah kematian laki-laki dan 49,7% (72/117) adalah kematian perempuan. Dipandang dari segi persentase penduduk, angka berbasis penduduk yang sepadan tentang kematian karena sakit/kelaparan diselidiki untuk laki-laki dan perempuan: 64 per 1.000 lelaki di Mau Chiga dilaporkan mati karena kelaparan/sakit, hal yang sama juga terjadi pada kasus untuk perempuan.†

204. Seperti yang terlihat pada bagan di bawah ini, penduduk Mau Chiga yang paling sering dilaporkan mati karena sakit dan kelaparan adalah anak-anak dan orang berusia lanjut. Pola kerentanan mati karena kelaparan pada anak-anak muda usia dan orang yang lanjut usia adalah sama dengan yang tercatat oleh Komisi di seluruh Timor-Leste.

* Angka berbasis penduduk ini diambil dari jumlah penduduk berdasarkan Survei Suco Timor-Leste 2001.

† Angka berbasis penduduk ini juga diambil dari jumlah penduduk berdasarkan Suco Survey Timor-Leste 2001.

Jumlah kematian akibat kelaparan/sakit yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974-1999



Sumber: Data yang dikumpulkan oleh Sekretaris Desa Mau Chiga

Catatan: 1,4% data tidak merekam usia dan jenis kelamin korban

Ringkasan dan kesimpulan

205. Komisi mengumpulkan dan menggunakan serangkaian luas sumber-sumber data empiris. Komisi mengumpulkan hampir 8.000 pernyataan naratif dari orang-orang Timor-Leste berkenaan dengan pengalaman mereka selama 25 tahun berada dalam situasi konflik, melakukan survei rumahtangga yang menyelidiki tentang kematian dan pemindahan dari hampir sebanyak 1.400 rumahtangga, melakukan sensus perkuburan umum di seluruh 13 distrik Timor-Leste, dan mengembangkan *dataset* dari informasi yang dikumpulkan dari organisasi dan kelompok lain.* Tujuan bab mengenai statistik ini ada tiga:

- Menyajikan berbagai perkiraan yang beragam, independen, dan ilmiah mengenai keseluruhan cakupan, pola, dan kecenderungan dari kematian dan pemindahan yang terjadi selama periode acuan Komisi
- Menggambarkan secara garis besar serta menafsirkan statistik deskriptif berkenaan dengan sifat dan cakupan pelanggaran, tingkah laku para pelaku tindak kekerasan, dan penggambaran mengenai sifat korban, yang dikumpulkan dari berbagai sumber data independen, dan
- Mendokumentasikan metode-metode statistik yang digunakan untuk memperoleh temuan-temuan statistik Komisi.

* Informasi dari luar yang disusun ke dalam dataset termasuk laporan-laporan dan bahan-bahan materi lainnya dari Amnesty International, wawancara naratif dikumpulkan oleh Fokupers (organisasi wanita Timor Timur yang memperjuangkan hak-hak) dan daftar-daftar tabel yang dibuat oleh para pemimpin desa Mauchiga.

206. Untuk mencapai kedalaman dan keluasan analisis ini, Komisi dan Benetech Human Rights Data Analysis Group bekerjasama mengembangkan berbagai proyek data yang meliputi pengumpulan data dalam skala luas, kodifikasi data, penyajian *database*, *record linkage*, dan analisis statistik. Hasil analisis statistik menolong untuk membuka dan menjelaskan pengetahuan sosial dan historis dari kekerasan politik di Timor-Leste antara 1974 dan 1999. Meskipun demikian, sebagai satu bagian dari keseluruhan temuan-temuannya, temuan-temuan statistik Komisi harus digabungkan dan diintegrasikan dengan temuan-temuan kualitatif, historis, dan yuridis.

Catatan akhir

1. John Waddingham, "Timor-Leste Death Toll, 1975 – 1999," submisi kepada CAVR, 22 Juli 2003.
2. Terence Hull "From Province to Nation: The Demographic Revolution of a People" dalam James J. Fox dan Dionisio Babo Soares (ed), *Out of the Ashes: The Destruction and Reconstruction of East Timor*, (Crawford House Publishing. Bathurst, Australia: 2000), hal. 38.
3. Arnold Kohen dan John Taylor, *An Act of Genocide: Indonesia's Invasion of East Timor*, Tapol, London, 1979, hal. 58.
4. John G Taylor, "Encirclement dan Annihilation': The Indonesian Occupation of East Timor," dalam Robert Gelletely dan Ben Kiernan (eds) *The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
5. Report on Timor-Leste," dokumen Gereja Timor-Leste, 12 Juli 1979, dikutip dalam C. Gilbert dan J. Waddingham, "Timor-Leste – How many people are missing?," laporan dari Timor Information Service kepada sebuah komite di Senat Australia (Australian Senate Standing committee on Foreign Affairs dan Defence), 28 Maret 1982.
6. Artikel 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak, Dokumen Sidang Umum PBB A/44/49 (1989).
7. Biro Pusat Statistik, Sensus Penduduk Indonesia, 1990, Jakarta, 1994.

